KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

SERI 1

DUTA MERDEKA BELAJAR

Sepenggal Kisah Inspiratif Perjalanan Transformasi dan Advokasi UPT

ISBN 978-623-118-004-9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

SERI 1

DUTA MERDEKA BELAJAR

Sepenggal Kisah Inspiratif Perjalanan Transformasi dan Advokasi UPT

M Adib Minanurohim dkk

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia.
Dilindungi Undang-undang

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka sosialisasi Praktik Baik sebagian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP) dalam melaksanakan transformasi organisasi dan advokasi Kebijakan Merdeka Belajar kepada pemerintah daerah. Buku ini telah ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Masukan dari berbagai kalangan dapat dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Duta Merdeka Belajar
(Sepenggal Kisah Inspiratif Perjalanan Transformasi dan Advokasi UPT)

Pengarah	: 1. Dr. H. Muhammad Hasbi : 2. Drs. I Nyoman Rudi Kurniawan, M.T. : 3. Dr. Nilamsuri
Penanggung Jawab	: Budi Priantoro, ST., MT
Penulis	: 1. M Adib Minanurohim 2. Billy Antoro 3. Abdul Haq
Editor	: Dr. Fairul Zabadi Ir. Feddy Djunaedi
Riset	: Jati Raharjo
Penyedia Data	: Tim PDM 05, Tim Direktorat SMP, dan Tim GIAT Direktorat SD
Desainer	: Zainul Hasan R.
Ide Cover	: M Adib Minanurohim
Cetakan I	: November 2023
Penerbit	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh :
Direktorat SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 15
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Duta Merdeka Belajar
(Sepenggal Kisah Inspiratif Perjalanan Transformasi dan Advokasi UPT)
M Adib Minanurohim, Billy Antoro, dan Abdul Haq;

Cetakan Pertama, November 2023
ISBN: 978-623-118-004-9

Isi buku ini menggunakan huruf Myriad Pro, 10pt.
xx., 196 hlm,: 20 cm x 25 cm

Buku ini bebas diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhannya, tetapi tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersil.

Daftar **Isi**

Daftar Isi vi
Kata Pengantar viii
Kata Pengantar x
Prakata Penulis xii
Glosarium xiv

BAGIAN I
MENGINDONESIAKAN MERDEKA BELAJAR
Menggerakkan Merdeka Belajar 1
Serentak Bergerak, Jalankan Merdeka Belajar! 16
Bergerak Menjadi *Trusted Advisor* 22

BAGIAN II
TRANSFORMASI
Transformasi Harga Mati 29
Jalan Mendaki Transformasi 32
EmpatI dan Harapan 38
Belajar Bersama di Reboan 41

BAGIAN III
KISAH INSPIRATIF
Bertamadun Melayu dalam Advokasi di Kota Gurindam Dua Belas 47
Tiga Mitra Pembangunan yang Enggan Disebut Namanya 60
Buah Advokasi BPMP Kepulauan Riau; Siswa Rasakan Manfaat PSP 62
Luwes dan Bijak Mengawal Transformasi Organisasi 66
Saraba dan Kisah Advokasi di Negeri Bersemboyan Benuanta 71
Dedikasi Menggugah Hati 79
Kurikulum Merdeka Jadikan Belajar Tambah Menyenangkan 86
Mengawal Transformasi dengan Empati 91
Kopi dan Masjid dalam Advokasi di Serambi Makkah 98
Gotong Royong Majukan Pendidikan Aceh 106
Lika Liku Advokasi di Bumi Lambung Mangkurat 115
Keselarasan Visi Permudah Advokasi 121
Sikap Inklusif Perlancar Transformasi 128
Integrasi Perkuat Tugas Advokasi 134
Transformasi Internal dan Asa Meraih ZI WBK 139
Dari Tim Perwalian Hingga Mapalus Pendidikan 146
Strategi Piawai Mengatur Pegawai 154
Siap Mitigasi, Sukses Advokasi 156
Hasil Optimal Pendekatan Informal 159
Tak Sekadar Mengganti Nama 163
Cara Mudah Dekati Kepala Daerah 167
Lanjut Studi Tingkatkan Percaya Diri 170
Tak Lengah di Tengah Politik Daerah 172

BAGIAN IV
REFLEKSI
Mentoring, Upaya Meningkatkan Advokasi 177
Menguji Kepemimpinan, Mengukir Perubahan 181

Daftar Narasumber 192
Daftar Pustaka 194

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Kata **Pengantar**

SEJAK awal, kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merancang Merdeka Belajar lebih dari sekadar kebijakan. Kami menghadirkan Merdeka Belajar sebagai sebuah gerakan yang melibatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat. Berangkat dari gagasan tersebut, kami senantiasa mengupayakan agar komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terus berjalan dengan baik.

Untuk mewujudkan kemitraan yang strategis, Kemendikbudristek mendelegasikan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) untuk membangun kedekatan dengan pemerintah daerah. Melalui Kepala UPT, ekosistem pendidikan di daerah diperkuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Buku ini memotret upaya Kepala UPT dalam mengemban amanah itu. Secara perlahan tapi pasti, mereka menguatkan unsur-unsur ekosistem pendidikan sembari terus mengembangkan kapasitas individu dan organisasi secara konsisten.

Ibu dan Bapak Kepala UPT serta jajarannya—yang tidak kenal lelah untuk terus menjalin dan menguatkan kolaborasi di daerah, itulah para Duta Merdeka Belajar. Kejujuran, kegigihan, dan semangat pantang menyerah para Kepala dan pegawai UPT merupakan pelajaran terbaik yang dapat kita serap dari buku ini.

Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Ibu dan Bapak Kepala beserta pegawai UPT Kemendikbudristek di seluruh Indonesia atas upayanya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Berkat upaya dan kerja keras Ibu dan Bapak, cita-cita Merdeka Belajar untuk menjadi gerakan yang masif pun dapat terwujud.

Dengan semangat gotong royong, mari kita terus serentak melanjutkan Gerakan Merdeka Belajar.

Jakarta, 30 November 2023
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,Riset dan Teknologi

Nadiem Anwar Makarim, M.B.A.

Kata **Pengantar**

KEBIJAKAN Merdeka Belajar (KMB) menjadi panduan bagi kerja-kerja cerdas membangun dunia pendidikan tanah air. Kolaborasi diletakkan secara proporsional, tak sekadar melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ada porsi yang dibagi secara komprehensif, dan memberi ruang partisipatif bagi warga di dalamnya untuk membangun kepercayaan diri serta menumbuhkan kematangan individu dan lembaga.

Rambu-rambu di atas menjadi pegangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dalam mengemban amanah, mengawal, dan menuntaskan KMB. Melalui BBPMP/BPMP di daerah, program-program prioritas Kemendikbudristek dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan matang.

Layaknya film di bioskop dan sinetron di televisi, dinamika di daerah penuh dengan "drama". Kepala UPT perlu pintar-pintar menempatkan diri saat menjalin hubungan dengan Pemda. Karena kontestasi politik lokal masih nyata mewarnai dunia birokrasi. Di satu sisi BBPMP/BPMP berupaya menjaga netralitas dan independensinya. Di sisi lain, ia masuk secara perlahan memengaruhi kebijakan pendidikan daerah tanpa turut terlibat dalam arena perpolitikan lokal. Upaya ini sungguh tidak mudah.

Bagaimanapun, amanah harus tetap dijalankan. Sekeras apa pun tantangan perlu dihadapi dengan penuh keberanian. Sesulit apa pun situasi harus diterima dengan lapang dada. Serumit apa pun masalah harus dipecahkan dengan ketelitian dan tanggung jawab. Tak ada kata mundur dalam menjalankan advokasi. Kita dapat menyimak problematika di atas, yang dihadapi oleh para Kepala dan pegawai UPT, di buku ini.

Buku ini memotret kerja-kerja inspiratif sejumlah Kepala dan pegawai UPT dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kepala dan pegawai BBPMP/BPMP lain punya kisah tak kalah inspiratif, namun karena keterbatasan waktu dan tenaga tim kami, hanya sebagian yang terakomodasi. Ke depan, kami berencana menerbitkan buku jilid II yang dapat melengkapi sejumlah kekurangan, termasuk menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para Kepala dan pegawai UPT yang belum ada dalam buku ini.

Buku ini tidak berisi teori, panduan, atau tutorial menjalin interaksi Pusat-Daerah. Namun, percayalah, penyajiannya menggunakan pendekatan humanis. Kita dapat merasakan pikiran dan perasaan para aktor dalam menjalin interaksi. Hubungan personal dinarasikan tak sekadar lontaran argumentasi. Unsur-unsur kedekatan, empati, dan kesetaraan menyusup melalui diksi dan penceritaan yang menarik. Tak terasa kita sedang dibawa untuk memahami situasi dan pemikiran kompleks dengan cara yang santai dan tak membuat kening berkerut.

Tahniah atas penerbitan buku apik ini! Semoga para pembaca terinspirasi dan terpantik nyala semangat dalam membangun dunia pendidikan tanah air tercinta.

Jakarta, 30 November 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D

Prakata **Penulis**

(I)

JUMAT sore, tanggal 31 Maret 2023, Budi Priantoro, Ketua PMO PDM-05 Kemitraan Daerah, mengungkapkan empatinya terhadap tugas yang diemban BBPMP/BPMP. Menurutnya, sekarang tugas BBPMP/BPMP makin berat: dari penjaminan mutu satuan pendidikan, menjadi advokasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) kepada Pemda.

"Secara simultan, mereka juga melakukan transformasi organisasi," ujar Budi sambil menjaga keseimbangan mobilnya, yang saat itu melintasi rel kereta api.

"Transformasi organisasi meliputi penyelarasan struktur organisasi, gugus tugas lintas satuan kerja dengan yang ada di Direktorat Jenderal, dan penguatan SDM," tambahnya seraya mengendurkan laju mobilnya, lalu berhenti di salah satu warung nasi.

"Kita buka di pinggir jalan ya," ajaknya.

Saat itu Bulan Ramadhan. Budi sedang dalam perjalanan pulang dari Kegiatan Review Model dan Bahan Pendampingan UPT PDM di Hotel Onih, Bogor.

Sambil menanti hidangan berbuka puasa, Budi meminta saya untuk menulis kisah transformasi organisasi dan advokasi yang dilaksanakan BBPMP/BPMP.

"Memang, saat ini belum cukup untuk melihat keberhasilan mereka. Karena transformasi yang mereka jalani belum genap setahun. Namun saya dengar, ada beberapa kisah menarik dari mereka. Misalkan BPMP dari Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara," ceritanya.

"Ajak juga Mas Billy Antoro," ujar Budi, menunjuk sahabat karib saya.

(II)

BEBERAPA hari kemudian, saya segera membuat *outline* tentang buku yang saat ini berjudul Duta Merdeka Belajar. Lalu saya diskusikan dengan Billy. Setelah menemukan titik sepakat, *outline* itu saya ajukan kepada Budi, dan disetujui.

Mengingat buku ini akan berisi tentang sebuah kisah perjalanan transformasi dan advokasi BBPMP/BPMP, saya berinisiatif menuliskannya dengan gaya Jurnalisme Sastrawi, yaitu karya jurnalistik yang menggabungkan disiplin jurnalisme, riset akademis, dan daya pikat sastra. Genre ini mensyaratkan liputan mendalam namun memikat. Karena itu, pada proses wawancara, saya mengajak beberapa narasumber untuk bercerita panjang lebar, mulai organisasi masih bernama LPMP hingga menjadi BBPMP/BPMP, dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan, baik dalam transformasi organisasi maupun advokasi KMB. Dus, tanpa disadari, proses wawancara berjalan 1 jam lebih. Bahkan ada yang nyaris 2 jam!

Beberapa tulisan yang saya tulis dengan gaya penulisan Jurnalisme Sastrawi, di antaranya adalah kisah tranformasi dan advokasi pada BPMP Kepulauan Riau, BPMP Aceh, BPMP Kalimantan Utara, dan BPMP Kalimantan Selatan.

Dalam perjalanan penulisan buku ini, saya merasa beruntung dibantu oleh Billy. Dengan pengalaman jurnalistiknya, ia sangat meringankan beban saya dalam menulis beberapa kisah transformasi dan advokasi BPMP.

Saya juga beruntung dibantu saudara Abdul Haq dan Zainul Hasan, alumni Universitas Nurul Jadid. Mereka adalah anak-anak muda yang trengginas dan memiliki potensi besar dalam dunia jurnalistik. Ada juga Jati Rahardjo.

Tak terasa, delapan bulan terlewati. Menulis dengan gaya Jurnalisme Sastrawi memang tak mudah, karena harus memperhatikan plot atau alur cerita.

(III)

KETUNTASAN penulisan buku ini, tentu karena bantuan berbagai pihak. Karena itu, saya menghaturkan terima kasih kepada Mendikbudristek, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, serta seluruh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Lebih-lebih, mereka juga bersedia menjadi narasumber buku ini, meski tidak semuanya saya wawancarai secara langsung. Saya mengambil pernyataan mereka dari beberapa rekaman video, baik dari Akun Youtube Kemendikbud RI dan lainnya.

Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Supervisor PDM-05 Kemitraan Daerah, PIC PDM-05 Kemitraan Daerah, dan seluruh anggota PDM-05 Kemitraan Daerah.

Kepada Kepala BBPMP/BPMP yang menjadi narasumber pada buku ini, terima kasih sekaligus permohonan maaf saya haturkan, bila ternyata seluruh isi wawancara belum sempat saya tuangkan dalam bentuk tulisan.

Terima kasih juga saya haturkan kepada Direktur SMP beserta anggota Pokja KDPK, yang telah memfasilitasi penulisan buku ini, dan juga kepada editor buku, Dr. Fairul Zabadi dan Ir. Feddy Djunaedi, yang telah meneliti kata demi kata yang harus saya perbaiki. Terakhir, kepada semua pihak yang belum saya sebutkan satu per satu, saya sampaikan terima kasih.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak, sangat saya harapkan.

Jakarta, 30 November 2023

a.n. Tim Penulis.

Glosarium

ALT : *Active Learning Team*
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBGP : Balai Besar Guru Penggerak
BBPMP : Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan
BBPPMPV : Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BGP : Balai Guru Penggerak
BOS : Bantuan Operasional Sekolah.
BPKB : Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
BPMP : Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
BPPMPV : Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Celoteh Budak Sebauk : Sebuah drama pendidikan yang bernuansa Melayu diperankan oleh anak-anak.
CSR : *Corporate Social Responsibility*
DAU : Dana Alokasi Umum
Define : Menginterpretasikan data-data yang sudah dikumpulkan mengenai permasalahan pengguna di tahap sebelumnya.
Design thinking : Merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna.
Ditjen PAUD, Dikdas Dikmen : Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Duek Pakat : Tradisi kebersamaan khas ureueng Aceh, yang tidak jauh berbeda dengan model musyawarah, yang memiliki kekhasan tersendiri seperti berbagi pantun ala ureueng Aceh yang terkadang menjadi jawaban atas masalah yang sedang dibahas.
Emphatize : satu dari lima tahapan desain thinking yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang terjadi kemudian dipecahkan.
ESD : *Education for Sustainable Development* (ESD)
Google Master Trainer : Sebuah program pelatihan yang memperlengkap pendidik terpilih untuk menginspirasi perubahan dan memimpin pelatihan Google Workspace for Education di akun pembelajaran *belajar.id.*
Hearing : Rapat dengar pendapat yang merupakan fungsi pemerintah daerah untuk mengetahui aspirasi atau laporan mengenai masalah yang dihadapi.
Kapokja : Ketua Kelompok Kerja
Kasupokja : Ketua Sub Kelompok Kerja

KDPK : Kemitraan Daerah dan Penguatan Komunitas
KMB : Kebijakan Merdeka Belajar
LDP : *Leadership Development Program*
Learning loss : Hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu.
LPDP : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Mbrebes mili : berlinang air mata.
Ngluruk tanpo bolo, menang tanpo ngasorake : Filosofi ajaran Sunan Kalijaga yang memiliki arti "berjuanglah tanpa perlu membawa massa, menanglah tanpa mempermalukan."
Meugang : Ungkapan syukur masyakarat Aceh kepada Dzat Yang Maha Welas Asih, saban menyambut Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang diiringi dengan penyembelihan hewan kerbau, sapi, kambing, dan lainnya dalam jumlah yang banyak. Kemudian, daging-dagingnya dimasak dan dinikmati bersama-sama keluarga, kerabat, yatim piatu, dan seluruh masyarakat Aceh.
MoU : *Memorandum of Understanding* atau nota kesepahaman.
NPD : Neraca Pendidikan Daerah
NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Otsus : Otonomi khusus, yaitu desentralisasi asimetrik sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka.
P5 : Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila
PBD : Perencanaan Berbasis Data
PDM : PDM adalah singkatan dari PAUD, Dasar, dan Menengah, yang merupakan nama jenjang pendidikan di bawah pembinaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pada perkembangannya, PDM menjadi istilah yang digunakan untuk menunjuk gugus tugas lintas satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen.
PIRLS : *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS), yaitu studi internasional tingkat literasi membaca siswa kelas 4 jenjang sekolah dasar.
PISA : *Programme for International Student Assessment* (PISA), yaitu program studi internasional yang diikuti oleh lebih kurang 82 negara di dunia.

Glosarium

PMM : Plaform Merdeka Mengajar

PMO : *Program Management Office*

Power map : Pemetaan stakeholder yang dapat memberikan informasi penting untuk membangun strategi berhubungan dengan orang lain.

PPDB : Penerimaan Peserta Didik Baru

Problem Statement : Adalah kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan.

Profil Pelajar Pancasila : Kumpulan karakter dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi yang mencakup berbagai macam elemen.

PSP : Program Sekolah Penggerak

Refo Indonesia : Sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan.

RKA-K/L : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

SIPLah : Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

Siput Gonggong : Strategi Implementasi Peningkatan Mutu secara Bergotong-royong

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

Social style : Prilaku yang ditunjukkan seseorang saat berinteraksi dengan orang lain.

SPI : Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja

SPM : Standar Pelayanan Minimal

Talam sehidang : Kebiasaan masyarakat Melayu pada tempo dulu, yang bermakna silahturahmi, persaudaraan, kebersamaan dan berbagi rezeki.

Tasmiyah : Tradisi orang Banjar seputar pengajian ayat suci Al-Qur'an dan ceramah agama, yang dilakukan dalam rangka memberi nama kepada anak yang baru lahir.

TIMSS : *Trends in Mathematic and Science Study* (TIMSS) merupakan sebuah riset internasional untuk mengukur kemampuan anak-anak kelas 4 dan kelas 8 di bidang matematika dan IPA.

UKG : Uji Kompetensi Guru

UPT : Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek yang terdiri dari BBPMP/BPMP, BBGP/BGP, dan BBPPMPV/BPPMPV.

USBN : Ujian Sekolah Berstandar Nasional

ZI-WBK : Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

“MERDEKA BELAJAR DARI AWAL DIBANGUN, BUKAN HANYA SEBAGAI KEBIJAKAN, MELAINKAN JUGA SEBAGAI SEBUAH GERAKAN!”

NADIEM ANWAR MAKARIM MENDIKBUDRISTEK

BAGIAN I

MENGINDONESIAKAN MERDEKA BELAJAR

MENGGERAKKAN MERDEKA BELAJAR

Berawal dari Pemikiran Ki Hadjar Dewantara, Merdeka Belajar diharapkan menjadi gerakan yang mentradisi dan membudaya di tengah-tengah masyarakat.

(I)

BERKAOS hitam lengan pendek dengan tulisan Merdeka Belajar warna merah-putih dan bercelana hitam, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim atau yang akrab disapa Mas Menteri, nampak duduk santai di atas sofa merah. Di sebelahnya ada Iwan Syahril, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen, yang berkaos sama dengan Mas Menteri, bertopi hitam dengan tulisan Merdeka Belajar, dan bercelana jins warna biru, serta duduk di atas sofa merah. Sementara di depan mereka ada 74 Kepala UPT Kemendikbudristek dan para pejabat eselon II dari lintas Unit Utama Kemendikbudristek, yang berkaos sama dengan Mas Menteri, dan duduk lesehan menyimak dialog antara Mas Menteri, Dirjen, dan para audiens.

"Gak usah formal ya," ujar Mas Menteri.

Waktu itu, Selasa, 13 Desember 2022, Mas Menteri menjadi *keynotes speaker* dalam kegiatan *Leadership Development Program I* yang diselenggarakan PDM-05 Kemitraan Daerah melalui Direktorat SD, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Kegiatan yang dilaksanakan di InterContinental Jakarta Pondok Indah ini, diikuti 34 Kepala BBPMP/BPMP, 33 Kepala BBGP/BGP, dan 7 Kepala BBPPMPV/BPPMPV.

Di hadapan 74 Kepala UPT Kemendikbudristek itu, Mas Menteri mengatakan bahwa inspirator Kebijakan Merdeka Belajar adalah Ki Hadjar Dewantara.

"Yang menginspirasi gerakan Merdeka Belajar kita bersama, ya, paling besar menurut saya Ki Hadjar Dewantara. Itu *udah* jelas. Dari filsafat beliau," ujarnya.

Kiri: Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim.
Kanan: Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Iwan Syahril

"Kata merdeka itu, ya, dari beliau!" tambah Mas Menteri.

Kekaguman Mas Menteri terhadap sosok Ki Hadjar Dewantara sangat beralasan. Karena Ki Hadjar merupakan salah satu tokoh pendidikan yang turut membangun pondasi pendidikan Indonesia melalui pemikiran-pemikiran yang melampaui zamannya, dan terpahat apik di berbagai buku, surat kabar, majalah, dan penerbitan lain, baik di Indonesia, Belanda, maupun negara lainnya.

Atas dedikasi Ki Hadjar tersebut, banyak tokoh yang memberikan apresiasi. Salah satunya adalah Prijono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke-12 (Masa Bakti 14 Maret 1957 - 28 Maret 1966), yang waktu itu nomenklaturnya adalah Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudajaan.

"Ki Hadjar Dewantara adalah salah seorang patriot paripurna jang perkataan-perkataannja, sikap hidupnja, tindak-tanduknja, kesetiaan terhadap nusa dan bangsanja, tidak pernah bertentangan satu sama lain. Beliau adalah seorang patriot dan pendidik jang kehidupanja dalam segala lapangan dapat ditjontoh oleh semua murid-muridnja, baik oleh murid-murid di perguruan Taman Siswa, maupun murid-muridja di luar perguruan tersebut," tulis Prijono dengan Ejaan Van Ophuijsen atau Ejaan Lama pada 1 Juli 1961, dalam buku berjudul *Karja Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*, yang diterbitkan Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa, tahun 1962.

Apresiasi juga datang dari Presiden RI ke-1, Soekarno. "Karangan-karangan beliau adalah sangat luas dan mendalam, jang tidak sadja dapat membangkitkan semangat perdjoangan nasional sewaktu djaman pendjadjahan, tetapi djuga meletakkan dasar-dasar jang kuat bagi pendidikan nasional jang progressip untuk generasi sekarang dan generasi jang akan datang," tulisnya dalam buku yang sama pada 20 Januari 1962.

Sementara itu, kata 'merdeka' yang menurut Mas Menteri berasal dari Ki Hadjar, dapat ditemukan pada butir-butir Pidato Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan dan Pengadjaran Nasional, yang disampaikan dalam Kongres Permufakatan Persatuan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) ke-1 tanggal 31 Agustus 1928 di Surabaya. Berikut ini adalah sebagian butir pidatonya:

1. *Pengaruh pengadjaran itu umumnja memerdekakan manusia atas hidupnja lahir, sedang merdekanja hidup batin itu terdapat dari pendidikan.*
2. *Manusia merdeka jaitu manuisa jang hidupnja lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri.*
3. *Maksud pengadjaran dan pendidikan jang berguna untuk perikehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggauta dari persatuan (rakjat).*
4. *Dalam pendidikan harus senantiasa diingat, bahwa kemerdekaan itu bersifat tiga matjam: berdiri sendiri (zelfstanding), tidak tergantung kepada orang lain (onafhankelijk) dan dapat mengatur dirinja sendiri (vrijheid, zelfsbeschikking)*

Dari butir pidato Ki Hadjar tersebut—selain kata merdeka—ada dua kata yang sering digunakan, yaitu pengadjaran dan pendidikan. Terhadap dua kata ini, Ki Hadjar pernah menjelaskannya dalam tulisan berjudul Dasar-dasar Pendidikan yang dimuat dalam Majalah Keluarga tahun 1937, sebagai berikut:

1. *Ketahuilah, pembatja jang terhormat, bahwa sebenarnja yang dinamakan 'pengadjaran' (oderwijs) itu tak lain dan tak bukan ialah salah suatu bagian dari pendidikan. Djelasnja, pengadjaran itu tidak lain ialah pendidikan dengan tjara memberi ilmu atau pengetahuan, serta djuga memberi ketjakapan kepada anak-anak, jang kedua-duanja dapat berfaedah buat hidup anak-anak, lahir maupun batin.*
2. *Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnja anak-anak. Adapun maksudja pendidikan jaitu: menuntun segala kekuatan kodrat jang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggauta masjarakat dapatlah mentjapai keselamatan dan kebahagiaan jang setinggi-tinggnja.*

Mas Menteri membaca buku Ki Hadjar Dewantara.

Pendidikan adalah tuntunan—bukan tuntutan atau bahkan paksaan—kepada para murid untuk dapat mengeksplorasi bakat dan minatnya (baca; kodrat alamiahnya) secara optimal agar kelak mereka menjadi manusia yang bermanfaat, baik bagi diri mereka, keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun untuk masyarakat luas.

Pendidikan sebagai tuntunan ini selaras dengan semboyan pendidikan yang diciptakan Ki Hadjar, dan telah dipedomani oleh seluruh insan pendidikan, yaitu *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani,* yang artinya adalah menjadi pendidik, (baca; jika) di depan memberi suri teladan, di tengah menggugah semangat dan kemauan, dan di belakang memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya.

Berangkat dari uraian di atas, tak mengherankan bila Mas Menteri mengatakan bahwa inspiratornya dalam merumuskan Kebijakan Merdeka Belajar adalah Ki Hadjar Dewantara.

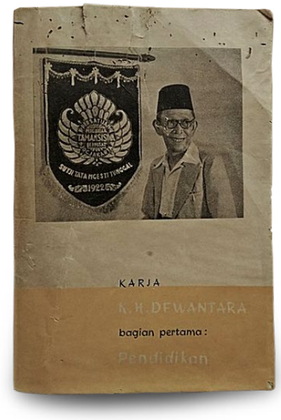

Buku Bunga Rampai pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang diterbitkan oleh Majlis Luhur Taman Siswa.

(II)

SECARA kronologis, kelahiran Kebijakan Merdeka Belajar berangkat dari kondisi SDM Indonesia, yang dari sisi kuantitas sangat besar, namun dari sisi kualitas kurang merata. Jika dibandingkan dengan negara maju, rerata kualitas SDM Indonesia masih harus terus-menerus ditingkatkan. Hal ini seperti hasil sejumlah survei tentang literasi siswa berskala internasional, seperti PIRLS, TIMSS dan PISA yang secara konsisten meletakkan posisi Indonesia di level rendah. Bahkan, survei tiga tahunan PISA yang dilakukan sejak tahun 2000 hingga 2018 secara tegas menunjukkan kompetensi literasi membaca, Matematika, dan sains siswa Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara lain.

Kondisi tak jauh berbeda dialami guru. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) selalu tidak menggembirakan. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2019, nilai rata-rata UKG guru jenjang SD sebesar 54,80, guru SMP 58,60, dan guru SMA 62,30. Rata-rata nilai UKG nasional, secara agregat, yaitu 57 dari nilai maksimal 100. Hal ini mengindikasikan ada problem besar yang tengah dihadapi para guru terkait profesi mulia yang tengah dijalaninya.

Kondisi di atas diperburuk dengan Pandemi COVID-19 yang seketika mengubah wajah pendidikan di Indonesia menjadi suram. Perubahan yang paling nyata tampak pada proses pembelajaran yang awalnya bertumpu pada metode tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini berakibat pada penurunan intensitas belajar mengajar secara signifikan, baik jumlah hari belajar dalam seminggu maupun rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari.

Studi lebih lanjut menunjukkan telah terjadi ketertinggalan pembelajaran

(*learning loss*), yaitu ketika siswa kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas, atau mengalami efek majemuk karena tidak menguasai pembelajaran pada setiap jenjang.

Kondisi itu berkontribusi pada penurunan kemampuan siswa, ketidaktercapaian pembelajaran, ketimpangan pengetahuan yang semakin lebar, perkembangan emosi dan kesehatan psikologis yang terganggu, kerentanan putus sekolah, dan potensi penurunan pendapatan siswa di kemudian hari.

Berangkat dari kondisi tersebut dan menimbang Arahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tentang prioritas pembangunan SDM, agenda pembangunan RPJMN 2020 - 2024 tentang SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Arah Kebijakan Pemerintah yang menghendaki Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, Kemendikbudristek menerbitkan Kebijakan Merdeka Belajar.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024, Lampiran I, disebutkan bahwa Merdeka Belajar adalah cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh (1) angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, (2) hasil pembelajaran berkualitas, dan (3) mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat, untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Kebijakan Merdeka Belajar berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Gambar 1.1
Konsep Kebijakan Merdeka Belajar

Gambar di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui: (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya; (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan; (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbudristek akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma dari guru sebagai penyampai informasi semata, menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator

dari beragam sumber pengetahuan, akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna, memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajaran. Merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pemelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*).

Dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Insdustri (DUDI). Sementara itu, sistem penilaiannya bersifat formatif,, mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran.

(III)

RABU, 11 Desember 2019, satu bulan setengah setelah Mas Menteri dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Episode Pertama Merdeka Belajar diluncurkan. Episode perdana ini meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Asesmen Nasional (AN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Mas Menteri di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Setelah itu, Mas Menteri menjelaskan satu per satu dari empat program Episode Pertama Merdeka Belajar kepada para peserta yang terdiri dari atas kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Penjelasan Mas Menteri ini juga dapat disimak pada tuatan Youtube: ***https://s.id/Episode1KMB.***

Pada perkembangannya, saat ini ada 26 Episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan Mas Menteri, yaitu:

KE-26 EPISODE MERDEKA BELAJAR

EPISODE KE-01 : ASESMEN NASIONAL, USBN, RPP DAN PPDB;
EPISODE KE-02 : KAMPUS MERDEKA
EPISODE KE-03 : PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS;
EPISODE KE-04 : PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK
EPISODE KE-05 : GURU PENGGERAK
EPISODE KE-06 : TRANSFORMASI DANA PEMERINTAH UNTUK PERGURUAN TINGGI
EPISODE KE-07 : PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK;
EPISODE KE-08 : SMK PUSAT UNGGULAN
EPISODE KE-09 : KIP KULIAH MERDEKA
EPISODE KE-10 : PERLUASAN PROGRAM BEASISWA LPDP
EPISODE KE-11 : KAMPUS MERDEKA VOKASI
EPISODE KE-12 : SEKOLAH AMAN BERBELANJA DENGAN SIPLAH;
EPISODE KE-13 : MERDEKA BERBUDAYA DENGAN KANAL INDONESIANA
EPISODE KE-14 : KAMPUS MERDEKA DARI KEKERASAN SEKSUAL
EPISODE KE-15 : KURIKULUM MERDEKA DAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR;
EPISODE KE-16 : AKSELERASI DAN PENINGKATAN PENDANAAN PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN;
EPISODE KE-17 : REVITALISASI BAHASA DAERAH
EPISODE KE-18 : MEREKA BERBUDAYA DENGAN DANA INDONESIANA
EPISODE KE-19 : RAPOR PENDIDIKAN INDONESIA;
EPISODE KE-20 : PRAKTISI MENGAJAR
EPISODE KE-21 : DANA ABADI PERGURUAN TINGGI
EPISODE KE-22 : TRANSFORMASI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
EPISODE KE-23 : BUKU BACAAN BERMUTU UNTUK LITERASI INDONESIA;
EPISODE KE-24 : TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN;
EPISODE KE-25 : PENCENGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN; DAN
EPISODE KE-26 : TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DAN AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI

Penjelasan ke-26 Episode Merdeka Belajar tersebut, secara ringkas dapat disimak pada laman ***https://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/***

(IV)

BERKOPIAH hitam dan berkemeja batik lengan panjang warna coklat dan hitam, Iwan Syahril menjelaskan tentang korelasi antara pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan Kebijakan Merdeka Belajar.

"Yang menjadi dasar kita adalah sebuah kesadaran atau komitmen untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan, dan berpihak pada murid. Dalam hal ini kita melihat Bapak Pendidikan kita itu adalah sumber inspirasi yang luar biasa. Kita melihat pemikiran Ki Hadjar Dewantara itu sangat sesuai dengan tantangan zaman, juga dengan konteks kita saat ini," kata Iwan pada acara siniar #pojokdikbud yang diunggah akun Kemendikbud RI tanggal 27 Mei 2021.

Iwan menambahkan bahwa semboyan *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*, merupakan sebuah komitmen melahirkan manusia yang merdeka.

"Itu sebenarnya sebuah komitmen bahwa kita harus mencetak manusia-manusia yang merdeka," tegas Iwan yang waktu itu menjabat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Sementara itu, salah satu potret pemikiran Ki Hadjar yang tersemat dalam Kebijakan Merdeka Belajar dapat dilihat pada Episode Ketujuh Merdeka Belajar tentang Program Sekolah Penggerak (PSP), yaitu program pendidikan yang mendorong sekolah untuk meningkatkan hasil belajar murid secara holistik (mencangkup kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan berfokus pada kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter), yang diawali dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru.

Melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, dan beberapa intervensi lain seperti pendampingan konsultatif-asimetris, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Perencanaan Berbasis Data (PBD), dan digitalisasi sekolah, sekolah pelaksana PSP (negeri/swasta dan dalam kondisi apa pun) diharapkan dapat bergerak (baca; bertransformasi) 1-2 tahap lebih maju dan terintegrasi antarekosistem pendidikan, secara bertahap dalam waktu 3 tahun ajaran

Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, **Iwan Syahril,** saat menyampaikan pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Ada empat potret tahapan transformasi pada sekolah pelaksana PSP yang meiliputi hasil belajar, lingkungan belajar, pembelajaran, serta refleksi diri dan pengimbasan, sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Tahapan Proses Transformasi Sekolah pelaksana PSP.

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK AKAN MENGAKSELERASI SEKOLAH NEGERI/SWASTA UNTUK BERGERAK 1-2 TAHAP LEBIH MAJU DALAM WAKTU TIGA TAHUN AJARAN. HARAPANNYA, SELURUH SEKOLAH BERGERAK MENCAPAI TAHAP IV

	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4
				DI ATAS LEVEL YANGDIHARAPKAN
			DI LEVEL YANGDIHARAPKAN	AMAN, NYAMAN, INKLUSIF DAN MENYENANGKAN
		1-2 TINGKAT DI BAWAH DARI YANG DIHARAPKAN	PERUNDUNGAN TIDAK TERJADI	BERPUSAT PADA MURID
HASIL BELAJAR	>3 TINGKAT DI BAWAH DARI YANG DIHARAPKAN	PERUNDUNGAN MASIH TERJADI NAMUN TIDAK MENJADI	SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TINGKAT KEMAMPUAN MURID	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BERBASIS REFLEKSI DIRI
LINGKUNGAN BELAJAR	PERUNDUNGAN MENJADI NORMA	BELUM MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN DAN TINGKAT KEMAMPUAN MURID	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BERBASIS REFLEKSI DIRI	REFLEKSI GURU DAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN TERJADI
PEMBELAJARAN	SECARA RUTIN ALAMI GANGGUAN	-	GURU MULAI MELAKUKAN REFLEKSI DAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN	GURU DAN KEPALA SEKOLAH MELAKUKAN PENGIMBASAN
REFLEKSI DIRI DAN PENGIMBASAN	-	-		

Pada tahap IV, transformasi yang diharapkan meliputi: (1) hasil belajar murid berada di atas level yang diharapkan; (2) lingkungan sekolah aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan; (3) kegiatan pembelajaran berpusat pada muird; (4) perbaikan pembelajaran dan perencanaan serta penganggaran sekolah berbasis refleksi; (5) refleksi guru untuk perbaikan pembelajaran menjadi tradisi; dan (6) kepala sekolah dan guru aktif melakukan pengimbasan dan/atau mengembangkan komunitas belajar.

Dari karakter sekolah pelaksana PSP yang berada pada tahapan IV itu, dapat diketahui bahwa pemikiran Ki Hadjar tentang pendidikan sebagai tuntunan yang memerdekakan dan memanusiakan telah mengejawantah dalam Kebijakan Merdeka Belajar.

(IV)

JUMAT 6 Januari 2023, nampak Mas Menteri duduk lesehan di hadapan para guru penggerak, kepala sekolah pelaksana PSP, dan organisasi penggerak di salah satu ruangan SMP Lokon St. Nikolaus, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan mengenakan kaos putih lengan panjang yang ditekuk setengah lengan dan bertuliskan merdeka belajar warna merah dan hitam, Mas Menteri menyatakan bahwa Merdeka Belajar bukan sekadar kebijakan, namun gerakan.

"Saya dari awal selalu bilang bahwa Merdeka Belajar, kalau hanya menjadi kebijakan pemerintah pusat, itu tidak akan ke mana-mana. Pasti akan *mandek* (berhenti), setelah saya *nggak* jadi menteri lagi. *Udah* hilang," ujar Mas Menteri pada saluran Youtube ***https://s.id/GerakanMerdekaBelajar.***

"Ini adalah kenapa Merdeka Belajar dari awal itu dibangun, bukan hanya sebagai kebijakan, melainkan juga sebagai sebuah gerakan!" tegasnya.

Mendengar pernyataan Mas Menteri tersebut, para audiens nampak terdiam.

Sejurus kemudian, Mas Menteri melanjutkan pernyataannya bahwa ada banyak guru penggerak dan kepala sekolah pelaksana PSP yang bertanya tentang kelanjutan Merdeka Belajar bila suatu ketika nanti ia tidak lagi menjadi menteri.

"Ujung-ujungnya, apakah Merdeka Belajar ini lanjut apa tidak? Itu ada di tangan Bapak dan Ibu. Itu kuncinya," tegas Mas Menteri.

Menurut Mas Menteri, ke mana pun arah kebijakan kementerian ditujukan tidak akan memengaruhi Gerakan Merdeka Belajar. Apalagi bila guru-guru penggerak diangkat menjadi kepala sekolah, pengawas, bahkan kepala dinas,

Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim.

maka Gerakan Merdeka Belajar akan menjadi sebuah gerakan produktif di tengah-tengah masyarakat dan di dunia pendidikan.

"Kalau misalnya Kurikulum Merdeka *udah* bukan hanya menjadi suatu kebijakan, tapi *udah* menjadi suatu filsafat baru dalam membuat kurikulum, dan guru-guru terlibat dalam membuat kurikulum di sekolah masing-masing yang cocok untuk muridnya, pada saat asessmen nasional ini benar-benar dimengerti, dan kenapa literasi-numerasi serta survei karakter itu begitu penting, saya rasa akan sangat sulit membendung gerakan ini," jelas Mas Menteri, yang disambut tepuk tangan para audiens.

Merdeka Belajar sebagai gerakan di tingkat sekolah, bukan sekadar mimpi di siang bolong. Karena saat ini, telah tersedia aktor-aktor penggerak Merdeka Belajar yang tersebar hampir di seluruh denyut nadi wilayah Indonesia.

Foto Bersama: Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Iwan Syahril, dan Dirjen GTK, Nunuk Suryani, foto bersama dengan seluruh UPT Kemendikbudristek se-Indonesia

Mereka adalah para guru penggerak dan kepala sekolah pelaksanan PSP, yang siap melakukan transformasi pembelajaran yang berpusat pada murid, dan mengimbaskannya ke sekolah-sekolah di sekitarnya

Ketika murid sebagai penerima manfaat merasa aman, nyaman, dan senang di sekolah, secara otomatis orangtua mereka juga akan bahagia. Kepuasan mereka tentu akan menjadi umpan balik positif bagi para aktor penggerak untuk lebih meningkatkan produktivitasnya dalam melahirkan generasi bangsa Indonesia yang sesuai dengan karakter Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, tradisi positif yang telah dibangun para aktor penggerak di tingkat sekolah ini akan bertransformasi menjadi sebuah budaya baru, yang secara serentak bergerak bersama-sama dan terus-menerus meningkatkan mutu pendidikan di 436.552 sekolah di Indonesia.

Geliat budaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah itu, tentu harus diimbangi dengan upaya melahirkan budaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat Pemda. Karena bila diabaikan, bisa jadi budaya yang telah diperjuangkan secara berdarah-darah oleh Mas Menteri beserta jajarannya akan berhenti. Lantas, bagaimana menciptakan transformasi ekosistem pendidikan di tingkat pemerintah daerah, yang diharapkan dapat mengakselerasi kelahiran budaya peningkatan mutu di daerah?

Menjawab hal itu, Kemendikbudristek telah menyiapkan UPT-nya sebagai aktor transformasi ekosistem pendidikan di tingkat daerah. Ini tercermin dari unggahan Iwan Syahril pada akun instagramnya tanggal 27 Februari 2023.

"Kunci dari sebuah transformasi adalah sumber daya manusia (SDM) dan kunci dari kekuatan tim SDM adalah pemimpinnya. Kita ingin Kepala UPT Kemendikbudristek menjadi Kepala UPT Penggerak!" tulis Iwan.

UPT yang dimaksud Iwan Syahril adalah 34 BBPMP/BPMP, 33 BBGP/BGP, dan 7 BBPPMPV yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Sebagaimana filosofi yang kita gemborkan tentang keteladanan, kitalah yang sebenarnya menjadi teladan dalam ekosistem pendidikan di tempat kita masing-masing," terang Iwan.

Untuk mewujudkan impian tersebut, Kemendikbudristek melalui unit utamanya telah mengadakan LDP bagi 74 Kepala UPT. Harapannya para kepala UPT dapat melakukan transformasi internal pada lembagannya. Pada tahap selanjutnya dapat menjalankan advokasi Kebijakan Merdeka Belajar kepada Pemda di wilayah kerja mereka masing-masing hingga tercipta gotong royong, mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar di seluruh wilayah Indonesia.

Tentu, harapan tersebut bukan perkara mudah. Apalagi, tugas mengindonesiakan Kebijakan Merdeka Belajar ke-34 pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia ini, bagi UPT Kemendikbudristek, relatif merupakan tugas baru. Lebih-lebih, kepedulian Pemda terhadap pendidikan—yang menjadi sasaran advokasi UPT—memiliki potret yang beragam. Sebagian Pemda ada yang memiliki level komitmen tinggi di bidang pendidikan, sebagian lain masih berada pada level komitmen rendah.

"Kita kuatkan kemauan kita untuk belajar, dimana ada kemauan, di situ selalu ada jalan. Kuncinya adalah kemauan, kemauan, dan kemauan. *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa*. Bangun kemauan, kuatkan kemauan, agar kita bisa menjadi pemimpin yang *Tut Wuri Handayani*, melahirkan manusia yang merdeka!" pesan Iwan Syahril di akun instagramnya.*

SERENTAK BERGERAK, JALANKAN MERDEKA BELAJAR!

Dalam menyukseskan implementasi KMB, Kemendikbudristek tidak bergerak sendirian. Melainkan juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghela semua potensinya memajukan pendidikan bermutu tinggi.

(I)

MUHAMMAD Hasbi sedang sibuk. Azkia Syafira, pegawai yang ditugaskan mengatur jadwal kegiatannya nampak mondar-mandir mengatur tamu. "Sebentar lagi ya, masih ada tamu," ujarnya seraya mempersilahkan duduk di kursi yang telah disediakan.

Senin, 16 Oktober itu, tamu Hasbi cukup banyak. Mulai pegawai dari unit kerja yang ia pimpin, yaitu Direktorat SD, hingga pegawai dari lintas unit kerja. Maklum, selain menjabat sebagai Direktur SD, Hasbi juga menjabat sebagai Supervisor PDM-05 Kemitraan Daerah, yang di dalamnya terdapat para pegawai lintas unit kerja. Ia harus pandai-pandai membagi waktu agar semua pegawai yang hendak berkonsultasi dapat ia layani.

Muhammad Hasbi
Direktur SD sekaligus Supervisor PDM-05 Kemitraan Daerah.

Setelah sekian menit berlalu, akhirnya Azkia membukakan pintu dan mempersilahkan menemui Hasbi. Dari dalam ruangan, terdengar suara Hasbi menyambut hangat.

"Silahkan Mas," ujarnya sambil tersenyum, seraya mengajak duduk di sofa hitam.

"Kemendikbudristek bukan satu-satunya aktor dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat, sesuai cita-cita kemerdekaan Indonesia," ujar Hasbi membuka perbincangan.

"Karena sebenarnya, kalau Pemerintah sendirian, kita tidak akan mampu menjangkau semuanya. Jadi pendidikan ini perlu menjadi sebuah gerakan, dan UPT perlu menjadi roda penggeraknya," tambahnya.

Hasbi melanjutkan bahwa Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim telah memosisikan diri sebagai salah satu aktor penggerak.

"Nah aktor lain itu siapa? ya dari masyarakat, dari sektor swasta dan seterusnya. Sehingga pendidikan yang kita gagas di bawah Mas Menteri ini merupakan gerakan," tegasnya.

"Mengapa gerakan? karena ini melibatkan berbagai aktor, berbagai sumber daya yang dimiliki oleh aktor, sehingga kita dapat mencapai tujuan itu. Nah itulah yang dimaksud dengan mengindonesiakan Merdeka Belajar, menyambut peran berbagai aktor dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar di tingkat yang lebih operasional," tambahnya.

(II)

MERDEKA Belajar sebagai gerakan, disampaikan Mas Menteri pada saat dialog bersama para guru penggerak, kepala sekolah pelaksana PSP, dan organisasi penggerak di salah satu ruangan SMP Lokon St. Nikolaus, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

"Ini adalah kenapa Merdeka Belajar dari awal itu dibangun, bukan hanya sebagai kebijakan, melainkan juga sebagai sebuah gerakan!" tegas Mas Menteri, sebagaimana dimuat dalam tulisan berjudul Menggerakkan Merdeka Belajar.

Terhadap ide tersebut, beberapa pimpinan unit kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menyambut dengan semangat. Selain Hasbi, ada juga Komalasari, Plt. Direktur PAUD. "Merdeka Belajar sebagai sebuah Gerakan? Yes banget," jawabnya melalui Aplikasi WA.

"*Why*? Merdeka Belajar telah menggerakkan sebagian besar insan pendidikan Indonesia untuk tumbuh dengan cara baru dalam belajar, dan bekerja secara mandiri. Selain itu, mindset kerja ini telah bergerak dan berpotensi terus menggerakkan, karena ruh kemauan dalam diri telah ditiupkan, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara," tambahnya.

Komalasari melanjutkan bahwa kesadaran diri untuk tumbuh dan menggerakkan orang lain untuk 'ayo maju bersama', jauh lebih penting dibandingkan beberapa dekade sebelumnya, pada saat kebanyakan pelaku

dan pelanggan pendidikan lebih banyak 'disuapi' daripada 'masak sendiri'.

"Padahal, meracik sendiri hingga menyajikan 'menu' secara mandiri adalah jauh lebih berdampak untuk mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia," katanya.

Mengingat Merdeka Belajar merupakan sebuah gerakan, Komalasari mengatakan bahwa perlu cara alternatif untuk mengajak dan merangkul para pemangku kepentingan menjalankan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah pendekatan budaya.

"Pengalaman untuk sukses mencapai tujuan program memang ditentukan oleh banyak aspek, dan memahami budaya setempat adalah salah satunya," katanya.

"Menyelami budaya selaras dengan pepatah *di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung*. Pendekatan budaya adalah modal strategis untuk mejalankan komunikasi tentang Kebijakan Merdeka Belajar. Pendekatan budaya merupakan satu pendekatan penting sebelum misi disampaikan," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Hasbi. Menurutnya, pendekatan budaya untuk membumikan Merdeka Belajar sangat penting agar dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan di daerah.

"Untuk sampai ke situ, tentunya kita harus memahami budaya, karakter dari orang atau pun lembaga yang kita advokasi. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi UPT untuk memahami itu dan merancang berbagai strategi agar tujuan Merdeka Belajar bisa dicapai," tegasnya.

(III)

HASBI membenarkan letak lengan kemeja batiknya yang waktu itu ia tekuk setengah lengan, lalu melanjutkan perbincangan. Menurutnya, BBPMP/BPMP yang nota bene merupakan UPT Kemendikbudristek di daerah harus memaknai Merdeka Belajar sebagai gerakan. Empati, berbagi, dan kolaborasi harus dikedepankan saat merangkul segenap pemangku kepentingan, terutama Pemda untuk menjalankan Merdeka Belajar.

"Saya yakin, dengan transformasi yang ada sekarang, BPMP akan dapat memahami hal itu. Karena transformasi yang dilakukan oleh BPMP sekarang ini adalah transformasi untuk menjadi salah satu aktor penggerak, bukan menjadi satu-satunya aktor. Jadi bagaimana mereka menggalang dukungan dari Pemda dan sektor swasta melalui advokasi, sehingga semua elemen masyarakat dapat melaksanakan gerakan pendidikan yang dikoordinir oleh Kemendikbudristek," kata Hasbi.

Hasbi melanjutkan, untuk membekali BBPMP/BPMP menjalankan advokasi,

Tengah: Komalasari foto bersama murid-murid jenjang PAUD.

PDM-05 Kemitraan Daerah telah memberikan sejumlah program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas SDM, mulai dari internalisasi Kebijakan Merdeka Belajar hingga *Leadership Development Program*.

"Kita di PDM-05 kan telah melakukan berbagai hal, misalnya bagaimana memberi pemahaman dan kompetensi kepada UPT untuk menganalisis *social style* dari setiap kepala daerah yang ada di tingkat daerah. Kemudian, dengan memahami *social style* itu, UPT dapat menyesuaikan untuk dapat mengadvokasi Kebijakan Merdeka Belajar," tambanya.

Agar dapat menggerakkan seluruh elemen untuk bersama-sama membumikan Merdeka Belajar, Hasbi memberikan beberapa tips. *Pertama*, memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memahami tujuan mulia Kebijakan Merdeka Belajar.

"Apa tujuan mulia dari Kebijakan Merdeka Belajar? yaitu bagaimana agar murid, murid, dan murid bisa menikmati keuntungan sebesar-besarnya. Jadi pendekatan berbasis kepada murid," tegasnya.

Kedua, BBPMP/BPMP harus mampu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung Kebijakan Merdeka Belajar dan memasukkan mereka dalam ekosistem pendidikan.

"Tentunya ini bukanlah tugas yang mudah, karena ada saja kondisi di mana sebenarnya pemangku kepentingan itu memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pendidikan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus

berkontribusi. Sehingga BPMP harus mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan beserta sumber dayanya untuk berpartisipasi dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. Itu sangat penting," katanya.

Hasbi menjelaskan bahwa ekosistem pendidikan yang dimaksud tidak terbatas yang ada di lokal wilayah BBPMP/BPMP, tetapi ekosistem pendidikan lintas wilayah.

"Karena ketika kita berbicara mengenai ekosistem maka kita berbicara mengenai siapa saja yang dapat membantu kita untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, pembelajaran berkualitas, dan itu bisa dari mana saja," jelasnya.

Menyambung pernyataan Hasbi, Komalasari memberikan sembilan tips agar BBPMP/BPMP dapat menjadi Duta Merdeka Belajar yang dipercaya. *Pertama*, BBPMP/BPMP harus melakukan refleksi atas pemahaman tugas dan fungsi dengan melibatkan semua warga UPT. *Kedua*, meninjau kembali sejumlah pengalaman advokasi terhadap pemda. *Ketiga*, memetakan pengalaman advokasi pemda ke dalam kategori sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. *Keempat*, mengindentifikasi apa saja yang masih perlu diperbaiki, apa saja yang masih perlu ditambahkan, apa saja yang sudah kebanyakan, dan apa saja yang masih perlu diperkuat. *Kelima*, menetapkan kembali target prioritas. *Keenam*, meracang inovasi strategi advokasi yang relevan dengan target prioritas. *Ketujuh*, mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi. *Kedelapan,* memantau, mengevaluasi, melaporkan, dan merancang rencana perbaikan pelaksanaan tugas, dan *kesembilan,* menguatkan *wellbeing* pegawai UPT guna menjadi pembelajar sepanjang hayat.

(IV)

PADA beberapa kesempatan, Iwan Syahril, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, pernah berpesan bahwa UPT Kemendikbudristek harus menjadi Penggerak Merdeka Belajar. Bahkan, pesan ini ditulis dalam instagramnya.

Hasbi menyambut positif pesan itu dan memberikan beberapa tips untuk BBPMP/BPMP agar dapat menjadi Penggerak Merdeka Belajar yang dipercaya. *Pertama*, memiliki pemahaman yang baik mengenai Kebijakan Merdeka Belajar.

"Jadi UPT tidak boleh gagap ketika menjelaskan Merdeka Belajar," tegasnya.

Kedua, mengetahui audiens. *Ketiga*, menguasai data.

"Jadi kita tidak bisa datang kepada kabupaten/kota atau provinsi tanpa memiliki data yang lengkap agar mampu memberikan masukan-masukan, mampu memberikan *advice* kepada daerah, bagaimana seharusnya daerah itu menjalankan kebijakan pendidikan di daerahnya," jelasnya.

Keempat, pendampingan yang berkesinambungan.

"Tidak cukup UPT itu hanya sekali datang ke daerah terus mengharapkan perubahan yang besar. Komunikasi yang berkesinambungan itu perlu dilakukan, dan dirawat, supaya kita bisa memastikan bahwa daerah itu bergerak menuju ke arah yang kita inginkan. Apa itu? yaitu menindaklajuti rapor pendidikan dalam bentuk perencanaan berbasis data," tambahnya.

Sementara itu Komalasari berharap BBPMP/BPMP dapat menjalankan 5 fungsi. *Pertama*, berpola pikir tumbuh (*growth mindset*) dengan meminimalisir zona nyaman di internal pegawainya melalui refleksi yang bersiklus. *Kedua*, menggunakan sejumlah keterampilan abad 21 untuk menggerakkan warga UPT dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Ketiga, terampil menggunakan sejumlah *tools* yang ada dalam UPT untuk mendukung upaya pencapaian Profil Pelajar Pancasila. *Keempat*, terampil membangun kemitraan yang mendukung strategi dan target/misi, dan *kelima,* memimpin praktik siklus refleksi sebagai kebiasaan baru, hingga membudaya dalam organiasi/UPT sebagai bentuk transformasi penjaminan mutu internal untuk menjamin mutu eksternal.

(V)

JARUM jam bergerak ke angka 10.15 WIB. Batas waktu wawancara segera berakhir. Tamu berikutnya akan masuk menemui Hasbi.

Di ujung wawancara itu, Hasbi berharap agar BBPMP/BPMP harus memosisikan dirinya sebagai *trusted advisor*.

"UPT juga telah dibekali agar menjadi *trusted advisor* kan, bagaimana menjadi adviser yang bisa dipercaya. Nah itu merupakan ilmu ketika Ingin berkomunikasi dengan target audiensnya. Tidak akan mungkin UPT itu berhasil kalau dia tidak memiliki kompetensi *trusted advisor* itu," ujarnya.

Di samping itu, Hasbi juga berharap BBPMP/BPMP mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat.

"Harapan saya, BBPMP/BPMP dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang terus belajar untuk mengantisipasi disrupsi perkembangan zaman yang berlangsung sangat cepat. Hanya dengan cara ini, kita bisa terus melakukan advokasi dan memfasilitasi kepentingan pemerintah daerah di berbagai jenjang, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di provinsi," tutupnya.*

BERGERAK MENJADI *TRUSTED ADVISOR*

Sebagai coach atau pelatih, Pramudianto paham tentang progress kemajuan Kepala BBPMP/BPMP. Ia juga memiliki beberapa tips agar Kepala BBPMP/BPMP dapat menjadi trusted advisor.

(I)

JUM'AT malam, 24 February 2023, Pramudianto nampak duduk santai di kursi sofa depan Nusantara Ballrom, Hotel Mercure Jakarta Batavia. Pria yang akrab disapa *Coach* Pram ini baru saja mendampingi 74 Kepala UPT Kemendikbudristek dalam Kegiatan *Leadership Development Program II* (LDP II) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek.

Meski hampir 2 jam aktif berbicara tentang signifikansi *empathize* bagi 74 Kepala UPT, raut muka *Coach* Pram masih segar. Malam itu, ia mengenakan kaos hitam dengan tulisan sarat pesan di dada, yaitu "*Think Without The Box, Merdeka Berpikir.*"

Pramudianto,
pelatih Leadership Development Program .

"Mereka yang tidak tahu, berusaha untuk tahu, lalu coba-coba untuk memberitahu timnya di UPT, itu kan sebuah proses. Bila mereka salah, minta feedback. Lalu saya betulkan. Dan itu ada cukup banyak, cukup banyak."

Mengetahui kedatangan saya dan seorang teman bernama Billy Antoro, seketika ia berdiri dan menjabat tangan kami dengan seulas senyum ramah. Sejurus kemudian ia bergeser ke tempat duduk yang lebih nyaman untuk wawancara.

Selama pelaksanaan LDP, *Coach* Pram telah menjadi pelatih para kepala UPT, baik pada LDP I yang dilaksanakan di InterContinental Jakarta Pondok Indah, Bulan Desember 2022, maupun LDP II di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Bulan February 2023. Dari dua kali LDP itu, sedikit banyak ia mengetahui potret kepemimpinan para kepala UPT Kemendikbudristek, khususnya Kepala BBPMP/BPMP selama menakhodai lembaga masing-masing di daerah.

"Buat saya menarik, karena saya mendampingi mereka dan saya keliling ke beberapa daerah," ujar *Coach* Pram.

Saat itu, *Coach* Pram dipercaya menjadi pendamping 7 A*ctive Learning Team* (ALT). "Paling tidak ada 5 ALT telah saya dampingi. Beberapa kali bertemu, ya. Minggu depan saya mendampingi yang keenam. Jadi tinggal satu kelompok yang belum saya dampingi. Mungkin sebelum puasa," tambahnya.

Dari proses pendampingan yang telah dilakukan, *Coach* Pram memperoleh gambaran tentang potret 34 BBPMP/BPMP di 34 Provinsi Indonesia.

"Ada tiga kriteria. *Pertama*, mereka itu berproses untuk maju. Indikasinya, mereka melakukan apa yang sudah menjadi proses pembelajaran di LDP 1, bertahap. Mereka yang tidak tahu, berusaha untuk tahu, lalu coba-coba untuk memberitahu timnya di UPT, itu kan sebuah proses. Bila mereka salah, minta *feedback*. Lalu saya betulkan. Dan itu ada cukup banyak, cukup banyak," ujar *Coach* Pram dengan sorot mata yang lebar.

"*Kedua*, sedang berproses. Prosesnya, maju-mundur, maju-mundur. Itu kan proses. Itu ada. Dan yang ketiga, adalah mereka yang sudah tidak bisa diapa-apakan. Ini ada beberapa," tambahnya.

Menurut *Coach* Pram, beberapa Kepala BBPMP/BPMP yang masuk kategori ketiga tersebut susah untuk diubah.

"Yang *ketiga* ini bukan cara belajar. Lebih condong pada karakter. Jadi setiap orang bisa belajar, tapi kalau karakter ini sudah terbentuk, ini susah," tegasnya.

(II)

COACH Pram masih bersemangat. Ia mengatakan bahwa kelemahan Kepala BBPMP/BPMP yang masuk kategori ketiga adalah kepercayaan atau *trust*.

"Ya, jadi teman-teman ini kelemahannya adalah persoalan *trust*," ujarnya.

Untuk menjadi Duta Merdeka Belajar, tambah *Coach* Pram, Kepala BBPMP/BPMP perlu menguasai lima *trust*, yaitu *self trust, relationship trust, organisation trust*, *market trust,* dan *social trust.*

"Yang *pertama* yang disebut *self trust.* Dia harus punya sebuah kemampuan di mana orang lain harus percaya pada dirinya. Di dalam self trust ini dia harus membentuk karakter diri," jelas *Coach* Pram.

"*Self trust* itu ada dua, yaitu kompetensi dan karakter. Dua hal itu harus dimiliki untuk membangun *self trust*," tambahnya.

"*Kedua*, adalah *relationship trust.* Jadi kenapa dia ragu-ragu, dia tidak bisa mengambil eksekusi? Karena relasi dia dengan misalnya Pemda, itu masih belum *match, gitu*. Vokasi dengan Mitra Dudi itu belum *match*. Itu yang harus dibangun *relationship trust*nya. *Ketiga,* adalah *organisation trust.* Dia harus *firm* bahwa BPMP ini adalah organisasi yang kuat, di bawah Kemendikbudristek. Oleh karena itu dia harus memperkuat organisasinya melalui training, supaya mereka kuat. Kalau organisasinya sudah kuat, maka dia keluar mau mengeksekusi itu nggak akan ragu-ragu lagi," jelas *Coach* Pram.

Pramudianto,
pelatih Leadership Development Program .

Coach Pram melanjutkan penjelasan *trust* keempat dan kelima.

"*Keempat* adalah *market trust*. Market itu kan berkaitan dengan bagaimana dia memasarkan dirinya memasarkan organisasinya. Kalau saya tidak bisa memasarkan organosasi saya di depan

BPMP perlu menguasai lima trust, yaitu self trust, relationship trust, organisation trust, market trust, dan social trust.

Pemda, saya nggak punya Mitra. Maka harus menjual. Orang yang menjual berarti punya keyakinan bahwa barangnya bagus, kan gitu. Nah barang yang bagus, harus dimulai dengan sebuah proses yang panjang," kata *Coach* Pram.

"Yang *kelima* adalah *sosial trust*. Harus dipercaya oleh masyarakat. Maka saya katakan tadi kalau sampai *stakeholder* sudah percaya terhadap proses yang dilakukan Kemendikbudristek, masyarakat akan mendukung kita, itu sosial trust," jelas *Coach* Pram.

Coach Pram melanjutkan bahwa ketika *social trust* sudah terbangun, maka kebijakan merdeka belajar akan terus dicintai masyarakat meskipun ada suksesi atau pergantian kepemimpinan.

"Wong produk kita sudah dicintai masyarakat. Pasti mikir. Tapi kalau tidak dicintai masyarakat, pasti ganti. Ini yang harus dibangun. Jadi itu yang dibutuhkan saat ini, seperti itu," pungkasnya.*

FILOSOFI JEMBATAN

**“BANGUNLAH JEMBATAN, BUKAN TEMBOK.
JEMBATAN UNTUK BERINTERAKSI, BERKOMUNIKASI, DAN BERKOLABORASI SALING MEMAHAMI ASPIRASI.
BERDIRILAH KITA DI ATAS KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA, BUKAN DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.
CARILAH JEMBATAN UNTUK JEMPUT PENGETAHUAN, YANG SESUAI DENGAN KODRAT ALAM DAN KODRAT ZAMAN.**

Kita adalah pewaris nenek moyang, leluhur pendiri Republik, pemimpi dan pejuang untuk gapai cita-cita bersama, merdeka lahir dan batin.

Saya berpikir tentang sebuah revolusi, revolusi belajar, revolusi cara pikir, yang mensyaratkan kita bergerak, jawab panggilan kodrat zaman kita.

Tujuan revolusi belajar adalah melayani, melayani anak-anak generasi penerus bangsa, para pemimpin masa depan negeri ini; bukan lagi untuk generasi masa kini. Di generasi masa depan inilah kita titipkan segala asa dan harapan. Semua dipersyaratkan untuk bekerja keras, mempersiapkan lahirnya generasi ini, kerja keras tanpa pamrih, ikhlas dan produktif.

Marilah kita berlomba-lomba menjadi jembatan, besar kecil tak masalah. Jadilah penghubung antara kegelapan dan terang benderang, antara generasi saat ini dan masa depan. Peliharalah harapan sekecil apa pun.”

IWAN SYAHRIL DIRJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN

BAGIAN II

TRANSFORMASI

TRANSFORMASI
HARGA MATI

Tranformasi merupakan sebuah keniscayaan jika ingin organisasi bergerak progresif. Perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP merupakan angin segar bagi arus perubahan itu.

(I)

DI AWAL Februari 2019, Feddy Djunaedi bersama tim bergerilya. Fiona Handayani, Staf Khusus Menteri Bidang Isu-isu Strategis, menugaskan satu hal: cari tahu kenapa Pemerintah Daerah (Pemda) belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan Pusat.

Gerilya itu dimulai di Jawa Barat. Ia mengunjungi sejumlah tempat dan mewawancarai banyak orang: Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Pendidikan, dan orang-orang yang berhubungan dengan UPT. Karena Pandemi COVID-19 menyerang di awal Maret 2020, ruang gerak tim menjadi terbatas. Keleluasaan menemui orang-orang pun berkurang. Tetapi Feddy, bersama tim, terus bergerak untuk menangguk masukan.

Sejumlah pertemuan dan diskusi terpumpun itu menelurkan kesimpulan: kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) tidak sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) yang diemban. Dari hasil analisis terhadap jumlah pegawai di semua UPT, ditemukan bahwa pekerjaan LPMP kebanyakan bersifat administratif. Tugas yang bersifat kearsipan menumpuk, alih-alih melakukan penjaminan mutu. "Tidak terlalu banyak menunaikan penjaminan mutu yang sesungguhnya," ungkap Feddy. Lembaga ini juga sarat Widyaiswara yang rutin membuat rapor mutu, standar penjaminan mutu internal, serta melakukan pelatihan Standar Penjaminan Mutu Internal di sekolah.

Evaluasi Diri Sekolah (EDS), yang dilakukan oleh Tim Pengembang Sekolah, juga tidak maksimal dimanfaatkan. Laporan EDS ke Dinas Pendidikan pun tidak

ditindaklanjuti. Hanya sedikit pejabat Dinas yang hadir dalam pembahasan EDS. Banyak diwakilkan kepada staf. Akhirnya, analisis rapor mutu yang disampaikan kepada Pemda terkesan tidak serius. "Itu yang menyebabkan sebagian besar Pemda memakai caranya sendiri dalam memaknai apa yang terjadi di daerahnya dan apa yang akan dilakukan," ucap Feddy.

Di sisi lain, hasil analisis terhadap instrumen EDS juga tidak bagus-bagus amat. EDS kurang bisa memotret mutu pendidikan. "Kebanyakan itu subyektivitas dari yang mengisi, yaitu kepala sekolah dan guru," tutur Feddy.

Hasil analisis temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Feddy dan tim memaparkan masalah, penyebab, dan rekomendasi terkait LPMP kepada mereka. Tentang pelaksana Tusi, struktur SDM, dan pekerjaan sarat administratif. Ia juga melaporkan tentang sedikit personel LPMP di bagian eksekusi kebijakan yang memengaruhi Pemda untuk menjalankan kebijakan Pusat.

Tim juga merekomendasikan sejumlah hal. *Pertama*, Tusi LPMP tidak seperti yang sudah ada. *Kedua*, Tusi yang perlu dilakukan adalah advokasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi. *Ketiga*, penugasan yang tepat kepada pegawai adalah jabatan fungsional Widyaprada, yang bertugas melaksanakan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.

(II)

REKOMENDASI itu berujung manis. Pertengahan Maret 2022 menjadi hari bersejarah bagi para pegawai UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen). Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, meneken Peraturan Mendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan Feddy kepada pimpinan diakomodasi dalam regulasi itu.

Regulasi ini menghendaki BPMP bertransformasi. Sebelumnya LPMP lebih banyak berkoordinasi langsung ke satuan pendidikan dan dinas pendidikan dilangkahi. Padahal, kata Feddy, Undang-undang tentang Otonomi Daerah terang-terang menyatakan bahwa satuan pendidikan dinaungi oleh Pemda. Menurut Feddy, salah satu penyebab ketidakberlanjutan program seperti Sekolah Percontohan dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah tiadanya pelibatan Pemda. Pemda tidak mempunyai rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap Sekolah Percontohan dan RSBI. Ketika Sekolah Percontohan dan RSBI tidak lagi didampingi dan dibiayai oleh Pusat, kemudian pengelolaannya dikembalikan kepada Pemda, tak ada pendampingan khusus oleh Pemda kepada sekolah-sekolah itu.

Feddy Djunaedi, Tim SKM.

Kini, dengan regulasi baru, BPMP wajib berkoordinasi dengan Pemda. UPT menjadi partner, konsultan, dan teman berbagi bagi Pemda. "Kemampuan UPT kita yang baru ini untuk bisa memengaruhi Pemda," jelas Feddy. "Agar mau mendukung dan memiliki program-program yang dilahirkan oleh Pusat sehingga menjadi program mereka di daerah."

Sejumlah konsekuensi juga mengiringi perubahan nomenklatur. Pertama, para pegawai BBPMP/BPMP memiliki jabatan fungsional sebagai Widyaprada. Tentu tugas-tugasnya sangat berbeda daripada Widyaiswara, yang bertugas mendidik, mengajar, melatih PNS. Kedua, mengubah paradigma widyaprada tentang interaksi. Setelah berpuluh tahun berinteraksi dengan guru dan kepala sekolah, kini mereka harus menjalin hubungan dengan Dinas Pendidikan dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Mengubah pola pikir ini tentu tak mudah. Butuh proses.

Konsekuensi ketiga adalah pandangan tentang eselonisasi. Pegawai BPMP tak perlu mempermasalahkan kesetaraan jabatan dengan pegawai Pemda. Sebab perbedaan level jabatan pada dasarnya tidak berpengaruh pada kemampuan memengaruhi kebijakan Pemda. Pegawai Pemda tidak melihat tingkat jabatan. "Tapi apakah di mata Pemda kamu memberi nilai tambah atau tidak? Kehadiranmu itu memberi manfaat atau tidak?" tegas Feddy. "Kalau dirasakan memberi manfaat kepada Pemda, maka Pemda tidak akan melihat kamu itu golongannya apa."

Transformasi di tubuh BBPMP/BPMP tersebut memerlukan proses. Butuh waktu untuk berubah secara utuh. Feddy yakin semua BBPMP/BPMP sedang berjalan di rel transformasi yang benar. "Masalah waktu saja," katanya.*

JALAN MENDAKI TRANSFORMASI

Transformasi LPMP menjadi BBPMP/BPMP seperti jalan mendaki bukit yang tinggi. Banyak yang kewalahan karena stamina yang dibutuhkan lebih besar daripada biasanya.

(I)

SABTU pagi tanggal 29 April 2023, Budi Priantoro, Koordinator Project Management Office (PMO) PDM 05, sedang tidak disibukkan dengan urusan kantor. Di rumahnya yang terletak di kompleks Vila Dago, Pamulang, Tangerang Selatan, ia bercerita tentang transformasi LPMP menjadi BBPMP/BPMP.

"Ada arahan dari pimpinan untuk menjadikan UPT itu lebih adaptif terhadap tuntutan yang terjadi di kementrian kita. Apalagi 2 tahun kita mengalami Pandemi COVID-19, yang berakibat pada *learning loss*. Bahkan, skor PISA kita selalu stagnan," ujar Budi.

Pria yang juga menjabat sebagai Kapokja KDPK Direktorat SMP ini mengatakan bahwa pimpinan di Kemendikbudristek menghendaki BBPMP/BPMP menjadi lebih berdaya tatkala mendampingi pemerintah daerah dalam memulihan pembelajaran. Kehendak ini berangkat dari beberapa evaluasi, yang salah satunya adalah rendahnya dukungan Pemda terhadap program peningkatan mutu pendidikan yang diterbitkan kementerian.

"Daerah itu selalu menganggap, itu adalah program pusat, bukan program kita. Jadi, begitu ada pergantian kepemimpinan, maka program putus. Tidak ada keberlanjutannya sama sekali. Itulah kenapa kita seperti berjalan di tempat. Makanya perlu cara *extra ordinary,*" jelasnya.

Berangkat dari evaluasi tersebut, tambah Budi, pimpinan Kemendikbudristek mengganti nama LPMP menjadi BBPMP/BPMP dan menambah tugas dan fungsinya sebagai Duta Kebijakan Kemendikbutistek.

"Tugasnya ada 3. Pertama, melakukan advokasi Kebijakan Merdeka Belajar. Kedua, melakukan supervisi atau pendampingan. Ketiga, melakukan *improvement*, mengembangkan diri atau bertransformasi terhadap tuntutan perubahan yang ada," kata Budi.

Transformasi LPMP menjadi BBPMP/BPMP seperti jalan mendaki bukit yang tinggi. Banyak yang kewalahan karena stamina yang dibutuhkan lebih besar dari biasanya.

Menghadapi perubahan tersebut, tak sedikit BBPMP/BPMP yang kewalahan. Hal ini seperti disampaikan Hendri Putra, Kepala Sub Bagian Umum BPMP Kepulauan Riau. Ia tak menyangka, perubahan LPMP menjadi BPMP, menuntutnya bekerja lebih ekstra. Waktu 1x24 jam terasa tak cukup.

"Pulang hari ini, besok sudah penugasan lagi," ujar Hendri.

Kini, tambah Hendri, strategi pun berubah dan tak mudah. Advokasi lebih ditekankan agar regulasi dan kebijakan Pemda mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Sasarannya lebih tajam menyasar pucuk pimpinan daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Tak cukup menyambangi dinas pendidikan.

Sementara Nugraheni Triastuti, Kepala BBPMP Jawa Tengah, mengatakan bahwa transformasi LPMP menjadi BBPMP/BPMP sempat membuatnya kebingungan. Apalagi, transformasi itu diiringi dengan pemangkasan jabatan kepala bidang dan kepala seksi seiring arahan Presiden Joko Widodo tentang perampingan struktur birokrasi.

"Saya tidak punya kewenangan apa pun. Kalau mau ambil keputusan, ya langsung ke kepalanya saja. Saya sudah fungsional, saya tidak punya kewenangan," kata Heni menirukan perubahan sikap para pegawainya.

Kala itu, Heni masih menjabat Kabag Umum dan Plt. Kepala LPMP. Perubahan sikap para pegawainya cukup kental Heni rasakan. Meskipun ada kebijakan Kapokja dan Kasupokja, Heni melihat, para pelaksana dan para fungsional merasa setara. "Mereka merasa, kamu tidak berhak membina saya, kamu tidak berhak menegur saya, kan bukan pimpinan saya," ungkap Heni.

"Waktu itu saya sempat *down*," tambah Heni sambil tertawa.

(II)

ANGIN berhembus pelan dari lorong belakang ruang tamu rumah Budi. Sejenak ia menghirup nafas, kemudian kembali melanjutkan ceritanya.

"Ya mereka kewalahan. Tuntutannya besar dan itu berbarengan dengan proses transformasi internal yang mereka lakukan," tambahnya.

Untuk meringankan beban tugas BBPMP/BPMP, Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen membentuk gugus tugas lintas satuan kerja yang dikenal dengan istilah PDM. Budi mengatakan bahwa PDM adalah singkatan dari PAUD, Dasar, dan Menengah, yang merupakan nama jenjang pendidikan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas, dan Dikmen, yaitu jenjang Pendiidkan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Secara terminologi, PDM adalah sebuah gugus tugas dengan obyektif turunan dari Kebijakan Merdeka Belajar, yang didukung anggaran dan SDM lintas satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal, dan diharapkan dapat menuntaskan obyektifnya dalam satu tahun anggaran.

Saat ini ada 13 PDM di lingkungan Ditjen PAUD Dikdas Dikmen, yaitu PDM-01 tentang Program Sekolah Penggerak, PDM-02 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka, PDM-03 tentang Transformasi Digital, PDM-04 tentang Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data, PDM-05 tentang Kemitraan daerah, PDM-06 tentang Asesmen Nasional, PDM-07 tentang Publikasi dan Komunikasi, PDM-08 tentang Regulasi dan Transformasi Tata Kelola, PDM-09 tentang Profil Pelajar Pancasila, PDM-10 tentang Pemulihan Pembelajaran, PDM-11 tentang Transisi PAUD-SD, PDM-12 tentang Gerakan Sekolah Sehat, dan PDM-13 tentang Transformasi Organisasi.

"PDM-PDM tersebut memiliki tugas yang spesifik, antara PDM satu dan PDM berikutnya. Sementara untuk mengawal transformasi UPT menjadi duta kebijakan yang *powerful*, itu yang kemudian dibebankan ke PDM-05," jelas Budi.

(III)

TRANSFORMASI yang dialami BBPMP/BPMP diawali dengan transformasi di tubuh Kemendikbudristek. Salah satunya di lingkungan Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen. Menurut Budi, saat ini struktur organisasinya lebih ramping. Jabatan struktural hanya terdiri dari eselon I, II, dan IV, yang dipegang oleh direktur jenderal, dirketur/sekretaris, dan kepala subbagian tata usaha. Sementara itu, eselon III dihilangkan dan eselon IV hanya disisakan untuk kepala subbagian tata usaha. Sebagai gantinya, muncul istilah kelompok kerja atau Pokja, yang dipimpin oleh Kapokja dan dibantu Kasupokja.

Budi Priantoro, Koordinator Project Management Office (PMO) PDM-05 Kemitraan Daerah.

"Pokja itu struktur yang sangat cair, yang bisa berubah setiap saat. Berbeda dengan struktur sebelumnya, yang sulit berubah dalam waktu tahun berjalan," jelasnya.

"Ini bukan hanya di Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, melainkan juga di UPT dibuat sama," tambah Budi.

Transformasi kedua, lanjut Budi, adalah desain kegiatan. Menurut Budi, dulu kegiatan dicanangkan lima tahunan. Anggaran dan kegiatan antarunit kerja acapkali berbeda. Apalagi dengan BBPMP/BPMP yang waktu itu masih bernama LPMP, cukup berbeda.

"Dulu apa yang dikerjakan di pusat, belum tentu *inline* dengan apa yang dikerjakan di UPT dalam soal program kerja. Dulu antarunit utama itu memiliki program unggulan masing-masing, yang belum tentu program tersebut *inline* dengan direktorat dan/atau unit utama yang lain," jelas Budi.

"Sekarang kita tidak menemui itu lagi. Semua program di unit utama dan unit kerja itu sekarang sudah *Inline*, dan UPT harus mengikutinya," tambah Budi.

Budi menjelaskan bahwa pembuatan RKKL BBPMP/BPMP sekarang masuk pada *project* yang terintegrasi dengan *project* pusat. Pusat menetapkan ada 12 PDM yang memiliki sekitar 40 objektif/goal. BBPMP/BPMP harus mengikutinya.

"Dia tidak punya objektif lain, selain objektif yang sudah ditetapkan. Jadi, apa yang dilakukan oleh UPT di daerah dengan apa yang dilakukan oleh unit utama di pusat, sekarang menjadi satu. Muaranya satu, yaitu untuk mengakselerasi Merdeka Belajar, yang pada ujungnya nanti diharapkan melahirkan generasi yang memiliki nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila," ujarnya.

Transformasi ketiga, tambah Budi, adalah kerja kolaboratif.

"Kolaborasi menjadi tuntutan. Ini yang saya rasakan," ujarnya.

Budi mencontohkan bahwa SDM PDM-05 tidak hanya diisi oleh SDM dari satu satuan kerja, tetapi juga lintas satuan kerja. Ada Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat PMPK dan Sekretariat Ditjen PAUD Dikdas Dikmen.

Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, **Iwan Syahril** (mengangkat tangan), memberikan arahan kepada UPT Kemendikbudristek.

Transformasi keempat, pelaksanaan kegiatan tidak berorientasi penyerapan anggaran *an sich*.

"Penyerapan *is ok*, karena itu bagian dari audit kinerja di Kemenkeu. Akan tetapi ada satu lagi yang kemudian kita dorong, yaitu tentang akuntabilitas dan *performance*," tegas Budi.

"Jadi sekarang orientasi kita beda, bukan sekedar program dijalankan uang habis, sudah. Tidak. Sekarang, kamu harus menjalankan program dengan benar, *output-nya* terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

(IV)

"BANGUNLAH jembatan, bukan tembok. Jembatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Saling memahami aspirasi. Berdirilah kita di atas kepentingan bangsa dan negara, bukan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Carilah jembatan untuk jemput pengetahuan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman."

Kalimat di atas merupakan penggalan puisi Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen berjudul *Filosofi Jembatan*. Kalimat itu menjadi inspirasi bagi 74 UPT Kemendikbudristek, khususnya 34 BBPMP/BPMP yang berada di bawah naungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dalam melaksanakan tugas advokasi KMB kepada Pemda. Budi mengatakan bahwa pada awal transformasi, BBPMP/BPMP belum semuanya berhasil menjadi jembatan pusat dan Pemda.

"Beberapa UPT masih belum dianggap begitu kuat di mata Pemda. Bahkan, kalau ada masalah, mereka larinya ke pusat, tidak kepada BBPMP/BPMP. Memang ada beberapa UPT yang berhasil membangun hubungan yang baik dengan Pemda, tapi belum banyak," ujarnya.

Karena itu, tambah Budi, perlu ada upaya penguatan kepada SDM BBPMP/BPMP agar berdaya dan mampu menjadi jembatan yang kokoh antara kementerian dan Pemda.

Penguatan kapasitas SDM itu makin urgen tatakala dihadapkan dengan target masing-masing PDM, yang cukup tinggi. Misalkan untuk PDM-05 itu ada 3 obyektif. Pertama, persepsi Pemda terhadap dampak positif KMB meningkat minimal positif 90% melalui advokasi UPT. Kedua, pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah meningkat sebesar 80 - 100% melalui advokasi UPT kepada Pemda. Ketiga, peningkatan capaian delta AN sebesar 30% melalui advokasi UPT kepada Pemda. Untuk mencapai target itu, BBPMP/BPMP diwajibkan untuk membuat turunannya.

"Jadi objektif yang ada di kita ini harus diturunkan oleh UPT. Turunan di UPT 1 dengan UPT yang lain bisa berbeda. Misalkan soal pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah, itu tidak semua Pemda memiliki kuota pengangkatan guru penggerak yang sama. Bahkan ada Pemda yang tidak memilikinya," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan target obyektif masing-masing PDM yang dirasa tinggi tersebut, Budi menukil arahan Iwan Syahril.

"Pak Iwan sendiri mengatakan, Bapak dan Ibu jangan takut bermimpi kalau punya target. Targetnya harus setinggi bintang di langit. Jangan rendah. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa mencapainya tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Kami tidak akan marah. Kami akan menghargai setiap tetesan keringat bapak dan ibu," ungkap Budi.*

Peran BBPM/BPMP adalah sebagai jembatan yang menghubungkan pesan dari Kemendikbudristek kepada pemerintah daerah.

EMPATI
DAN HARAPAN

Empati PDM-05 terhadap perjuangan BBPMP/BPMP dalam menjalankan tugas transformasi kelembagaan dan advokasi KMB kepada Pemda, diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kapasitas SDM secara terstruktur dan berkelanjutan

/adik bercita-cita menjadi seorang arsitek
/sementara kakak ingin jadi wartawan
/BPMP adalah Duta Pendidikan Kemendikbudristek
/membantu Pemda meningkatan mutu pendidikan

SEBAIT pantun di atas, dibaca Nilamsuri, PIC PDM-05, di hadapan para peserta Kegiatan Advokasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran, yang terdiri atas kepala bagian/kepala subbagian umum BBPMP/BPMP se-Indonesia.

"Cakeppp," timpal para peserta seraya bertepuk tangan.

Membaca pantun merupakan kebiasaan Nilam setiap tampil di hadapan publik, baik dalam kegiatan luring maupun daring. Bagi perempuan kelahiran Bangka Belitung ini, pantun adalah warisan bangsa Indonesia yang harus dirawat sebaik-baiknya.

Kamis malam, setelah kegiatan tersebut, nampak Nilam duduk-duduk bersama koleganya di salah satu sudut Restoran Hotel Ciputra Jakarta. Nilam bercerita tentang empati PDM-05 terhadap perjuangan BBPMP/BPMP melaksanakan advokasi KMB kepada Pemda. Menurutnya, PDM-05 tidak ingin melihat BBPMP/BPMP berjuang sendirian melakukan transformasi dan advokasi. Apalagi ketersediaan SDM di UPT masih perlu dioptimalkan. Karena itu, PDM-05 berempati dan perlu membantu SDM BBPMP/BPMP melalui program peningkatan kapasitas SDM.

"Kita harus berempati terhadap BBPMP/BPMP tersebut. Dan itulah yang kemudian mendorong kita di PDM-05 untuk memberikan beberapa program penguatan yang diharapkan dapat mendorong semangat mereka menjadi duta kebijakan merdeka belajar," tegasnya.

Nilamsuri,
PIC PDM-05
Kemitraan Daerah.

Menurut Nilam, program penguatan pertama yang diselenggarakan PDM-05 adalah Penyusunan Perencanaan 2023 antara Pusat dan UPT. Pada kegiatan ini, SDM UPT, khususnya BBPMP/BPMP didampingi untuk merumuskan perencanaan program prioritas kementerian dalam *Microsoft Project*, yaitu *tool* yang digunakan untuk mengelola kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Menurut Nilam, kegiatan yang diselenggarakan secara kolaboratif dengan PDM-13 ini akan berlanjut pada akhir tahun dengan kegiatan bernama Penyusunan Perencanaan 2024 antara Pusat dan UPT. Dalam kegiatan ini, SDM BBPMP/BPMP juga didampingi dalam mengelola isu, mitigasi risiko, dan *power map* pemangku kepentingan.

Penguatan kedua adalah Internalisasi KMB, yang menurut Nilam, ada 9 kegiatan, yaitu Internalisasi KMB Episode ke-1 tentang USBN, AN, RPP, dan PPDB; Internalisasi KMB Episode ke-3 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS dan DAK; Internalisasi KMB Episode ke-5 tentang Program Guru Penggerak; Internalisasi KMB Episode ke-7 tentang Program Sekolah Penggerak; Internalisasi KMB Episode ke-12 tentang Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah; Internalisasi KMB Episode ke-16 tentang Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan; dan Internalisasi KMB Episode ke-19 tentang Rapor Pendidikan Indonesia dan PBD.

"Termasuk menyelenggarakan Internalisasi Kebijakan Sekolah Aman Bebas dari Perundungan dan Kebijakan Sekolah Sehat," tambahnya. "Kegiatan internalisasi ini ditindaklanjuti dengan IHT."

Penguatan berikutnya adalah membangun komunitas pembelajar antar-UPT dalam bentuk Berbagi Cerita Antar-UPT. Kegiatan ini menghadirkan kepala BBPMP/BPMP dari beberapa wilayah di Indonesia, untuk berbagi cerita tentang kisah advokasi KMB kepada Pemda.

"Kita juga mendampingi PMO BBPMP/BPMP, terutama dalam mengawal perencanaan berbasis Ms Project. Ada juga Refleksi Pemda, dan penguatan kolaborasi antar UPT dalam Reboan. Nah Reboan ini sudah familiar dan biasa diikuti 500-800 orang peserta," kata Nilam bangga.

"Kita harus berempati terhadap BBPMP/BPMP tersebut. Itulah yang kemudian mendorong kita di PDM-05 untuk memberikan beberapa program penguatan yang diharapkan dapat mendorong semangat mereka menjadi duta kebijakan merdeka belajar,"

Selain itu, PDM-05 juga memberikan pelatihan kepemimpinan secara intensif dan berkelanjutan bernama *Leadership Development Program* (LDP), yang saat ini telah dilaksanakan 4 kali. Menurut Nilam, kegiatan yang diikuti 74 UPT Kemendikbudristek se-Indonesia ini diharapkan dapat mendorong Kepala UPT menjadi pembelajar aktif agar dapat mengambil langkah-langkah efektif untuk menjawab tantangan dan isu-isu kepemimpinan.

Secara khusus, tambah Nilam, LDP memiliki 5 tujuan. *Pertama,* mendorong kerja sama tim, pemikiran kritis, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. *Kedua,* menggunakan keterampilan dan kreativitas untuk mencapai tujuan. *Ketiga,* mengidentifikasi ide paling efektif yang dilakukan selama proses berlangsung melalui proses refleksi. *Keempat,* mendorong seluruh anggota tim untuk berkontribusi dalam proses dengan berbagi solusi unik mereka sendiri; dan *kelima*, menciptakan tim yang berwawasan dan produktif.

Melalui berbagai intervensi pelatihan dan pendampingan tersebut, kata Nilam, PDM-05 ingin agar BBPMP/BPMP menjadi duta merdeka belajar yang berdaya. Artinya, BBPMP/BPMP memiliki daya tawar kepada Pemda, sehingga mampu menjadi jembatan antara pusat dengan daerah, dan mampu menyampaikan pesan dari pusat secara tepat.

"Termasuk menjadi *problem solver* bagi permasalahan yang ada di daerah, khususnya menyangkut kebijakan Merdeka belajar. Jadi, tempat bertanya pertama mereka itu bukan hanya ke pusat, melainkan juga ke UPT di daerah," jelas wanita yang energik ini.*

BELAJAR BERSAMA DI REBOAN

Komunitas Belajar Reboan merupakan wadah belajar bersama lintas Unit Utama dan UPT Kemendikbudristek. Di samping itu, kolaborasi, koordinasi, dan sinergi kian rekat dan kuat dengan forum yang digelar saban Rabu itu.

SABAN malam Rabu, Nilamsuri sibuk dengan gawainya. Ia mengirim *link zoom meeting* ke setiap kontak pribadi pejabat di lingkungan Kemendikbudristek. *Link* tersebut berisi kegiatan rutin mingguan, yakni Reboan. Nilam adalah PIC PDM-05 tentang Kemitraan Daerah, yang salah satu tugasnya menggawangi agenda Reboan.

"Reboan adalah komunitas belajar UPT," ujar Nilam di sela-sela kesibukannya membuka Kegiatan Pendampingan PMO Daerah.

Komunitas Belajar Reboan diselenggarakan secara daring saban hari Rabu mulai pukul 08.00 - 11.00 WIB dan diikuti oleh seluruh pegawai Kemendikbudristek, baik yang ada di unit utama dan satuan kerja, maupun pegawai yang ada di 74 UPT Kemendikbudristek.

Sementara itu, narasumbernya berasal dari lintas unit utama Kemendikbudristek. Nilam acapkali menjadi moderator pada kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai terhadap KMB beserta epsiode-episodenya tersebut.

Di sisi lain, tambah Nilam, Komunitas Belajar Reboan sangat penting memupuk rasa empati, berbagi, dan kolaborasi antarpegawai di Kemendikbudristek.

"Maka tim PDM-05 lah yang memulai itu, memulai kolaborasi, koordinasi, sinergi, yang sudah kita buktikan dengan Reboan. Saya dengar *nggak* ada komunitas belajar besar di kementerian lain. Tapi di kita, Kemendikbudristek ada. Apa? Reboan," ungkap Nilam sembari tersenyum bangga.

"Sekarang seluruh unit pelaksana teknis (UPT) dan unit utama, ikut terlibat. Saya meneruskan ini (*link*, red) ke semua eselon 1, eselon 2, direktur, kepala pusat, Sesditjen, dan Dikti, saya kirim," imbuhnya.

Semua elemen yang Nilam hubungi memang merespon dengan positif. Namun, terkadang, masih ada batu sandungan yang kerap Nilam temui di

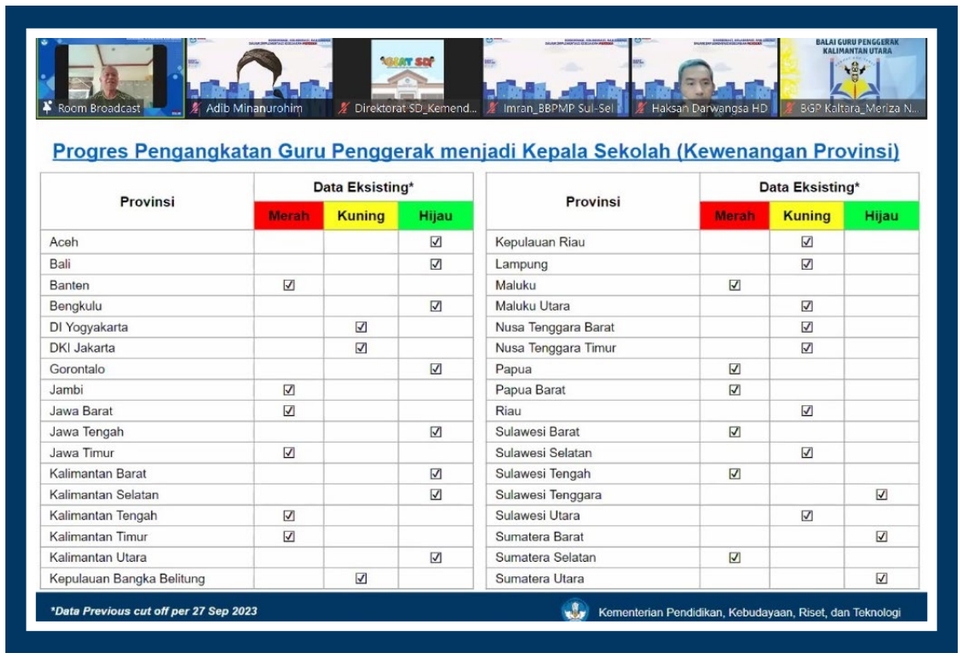

Provinsi	Data Eksisting*		
	Merah	Kuning	Hijau
Aceh			☑
Bali			☑
Banten	☑		
Bengkulu			☑
DI Yogyakarta		☑	
DKI Jakarta		☑	
Gorontalo			☑
Jambi	☑		
Jawa Barat	☑		
Jawa Tengah			☑
Jawa Timur	☑		
Kalimantan Barat			☑
Kalimantan Selatan			☑
Kalimantan Tengah	☑		
Kalimantan Timur	☑		
Kalimantan Utara			☑
Kepulauan Bangka Belitung		☑	

Provinsi	Data Eksisting*		
	Merah	Kuning	Hijau
Kepulauan Riau		☑	
Lampung		☑	
Maluku	☑		
Maluku Utara		☑	
Nusa Tenggara Barat		☑	
Nusa Tenggara Timur		☑	
Papua	☑		
Papua Barat	☑		
Riau		☑	
Sulawesi Barat	☑		
Sulawesi Selatan		☑	
Sulawesi Tengah	☑		
Sulawesi Tenggara			☑
Sulawesi Utara		☑	
Sumatera Barat			☑
Sumatera Selatan	☑		
Sumatera Utara			☑

Zoom Meeting Reboan, dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 2023.

perjalanan Reboan. Ia acapkali merasa beberapa orang yang ia hubungi tak membutuhkan Reboan. Hanya saja, itu tak menjadi masalah bagi Nilam. Ia tak patah arang. Ia masih terus *share link* setiap Selasa malam.

"Yang penting bapak/ibu itu tahu ada komunitas belajar. Mungkin suatu saat mereka butuh walaupun tidak sekarang. Saya terus berbagi informasi," ujar Nilam sembari membenarkan letak kacamatanya.

Ikhtiar Nilam dan tim PDM-05 tak sia-sia. Saban Reboan digelar, peserta yang hadir tak pernah mengecewakan. Bahkan, setiap hari Rabu, *link zoom meeting* itu diikuti sebanyak 500 - 800 peserta. Dalam forum tersebut *update-update* informasi terjadi. Di wadah itu pula, setiap peserta belajar bersama.

"Apa sih yang ter-*update* dari kebijakan yang ada dari PDM. Kita perlu *update*. Ini loh, dengan program-program PDM yang ada. Nah ini yang kita terus *update*," kata Nilam mencontohkan

Informasi-informasi yang muncul saban Reboan, kata Nilam, mesti diturunkan ke staf masing-masing. Sebab ia melanjutkan, tidak semua orang bisa diajak bergabung. Namun, ia berharap yang mengikuti Reboan itu mengimbaskan.

"Harapannya mereka mengimbaskan," tegas Nilam. "Apakah kepala UPT terus pendam sendiri ilmunya? Kan *enggak*."

Pengimbasan itu, bagi Nilam, tak bisa rampung hanya sekali. PDM memang hanya bisa memfasilitasi satu atau dua kali pelatihan. Karena itu, Nilam berharap, mereka yang telah mengikuti pelatihan, seperti LDP, harus terus-menerus mengimbaskan.

"Mengulang, mengulang, dan mengulang. Penguatannya melalui Reboan dan kegiatan-kegiatan lain di samping PDM 05. Tidak hanya PDM 05, tapi PDM lain pun punya program untuk menguatkan," terang Nilam.

Bagi Nilam, keberadaan Komunitas Belajar Reboan itu juga menjadi penanda kolaborasi yang berjalan. Menjadi salah satu ikhtiar untuk merekatkan pelbagai *stakeholder* yang terlibat memajukan dan menguatkan program serta kebijakan Kemendikbudristek. Itu sebabnya, Nilam berharap, dengan program-program yang diturunkan dari pusat bisa diterima dengan lapang dada oleh masing-masing UPT.

"Karena semuanya itu kan untuk penguatan transformasi pendidikan. Nah, UPT bisa membantu proses penguatan itu melalui pemda, dan mudah-mudahan proses itu bisa bergerak cepat," harapnya.*

"Mengulang, mengulang, dan mengulang. Penguatannya melalui Reboan dan kegiatan-kegiatan lain di samping PDM 05. Tidak hanya PDM 05, tapi PDM lain pun punya program untuk menguatkan."

“KITA INGIN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENDIKBUDRISTEK **MENJADI KEPALA UPT PENGGERAK!**”

IWAN SYAHRIL DIRJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN

BAGIAN III

KISAH INSPIRATIF

BERTAMADUN MELAYU DALAM ADVOKASI DI KOTA GURINDAM DUA BELAS

Kesuksesan Warsita dalam melaksanakan tugas advokasi KMB di provinsi yang dikenal dengan sebutan Kota Gurindam Dua Belas tak dapat dilepaskan dari usahanya bertamadun Melayu.

(I)

SEBUAH Ubin Istana Damnah Kerajaan Melayu Riau-Lingga Tahun 1722 - 1911, tertanam rapi di lantai tengah ruang tamu kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau (BPMP Kepri). Di atas ubin tersebut, terpahat satu kalimat tebal, ***takkan Melayu hilang di bumi***, tertanggal 4 Maret 2022.

Ubin Kerajaan Damnah tertanam di ruang tamu kantor BPMP Kepulauan Riau.

/tepian kanal tempat berenang
/sayang terendam si kain katun
/salam kenal dan selamat datang di Tanjungpinang
/Kota Gurindam si negeri pantun

"Tuan puan harus berpantun untuk dapat melewati ubin ini," tegas Warsita, Kepala BPMP Kepri usai membacakan satu bait pantun.

/Gunung Daek bercabang tiga
/patah ketinggian satu, tinggallah due
/tuan hambe jauh datang dari Jakarta
/maksud hati disimpan, saye nak bertanye

"Ubin ini adalah palang pintu. Kuncinya adalah pantun," tambahnya dengan satu pantun lagi.

Seketika saya dan ketiga teman terhenyak. Kaget, karena tidak mempersiapkan satu pantun pun. Kamis siang, 11 Mei 2023 itu, saya pun harus berdiskusi dengan teman-teman saya, dan akhirnya bermufakat membacakan sebuah pantun pembuka:

/Unyil Usro bermain di bawah pohon salam
/Upin ipin di kampung durian runtuh
/izinkan saya awali silaturahim dengan salam
/assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Sepenggal pantun itu dijawab Warsita dengan tiga bait pantun yang indah.

/sungguhlah lebat si batang kayu
/kayunye hanyot ke ujung tanjung
/berucap basmalah saye sambut di Tanah Melayu
/perhelatan anak negeri, kami terime penuh sanjung.

/basoh kaen di tepi perigi
/kaen dibasoh si anak dara
/jika tidak ada pertanyaan lagi
/kami persile ncek-puan ke dalam anjangsana.

/tetak batang si panjang buluh
/belah satu serta bersihkan
/kami jurai jari sepuluh
/salah kata kenan tuan maafkan.

Setelah berbalas pantun, saya dan ketiga teman bernama Rofiatul Adawiyah, Ihsan Maulana, dan Isablela Imani, yang sedang menjalankan tugas dari Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Kemendikbudristek, dipersilahkan masuk ke dalam kantor BPMP Kepri.

"Bapak Dirjen, kalau ke sini, juga harus berpantun," kata Warsita.

(II)

BERPAKAIAN lengan panjang warna putih yang ditekuk ke atas, dengan kartu PNS melingkar di leher dan bercelana warna krem, Warsita mengajak saya ke halaman belakang kantornya. Ia memilih duduk dekat kandang burung yang ramai berkicau sambil menyeruput secangkir kopi hitam.

"Saya TMT (tanggal mulai tugas, *red*) di sini per Mei 2022," ujar Warsita memulai perbincangan.

Pria kelahiran Solo, Kamis, 4 Desember 1975 itu bercerita, setelah dilantik sebagai Kepala BPMP Kepri, ia langsung terbang ke Kota Gurindam Dua Belas.

Setiba di bandara, ia tak langsung menuju kantor BPMP Kepri. Ia pergi ke Pulau Penyengat, menemui Tokoh Masyarakat Melayu. Namun setiba di sana, waktu sudah larut malam. Akhirnya, ia merancang ulang jadwal pertemuan.

Warsita mengatakan, dulu, Kepri masuk Provinsi Riau, dan muncul istilah Riau Darat dan Riau Laut. Kemudian, Riau Laut menjadi provinsi baru bernama Kepulauan Riau. Orang-orangnya sangat menjunjung tinggi budaya Melayu. Posisi Tokoh Masyarakat Melayu sangat dihormati. Karena itu, setelah menemukan jadwal yang tepat, Warsita segera sowan kepada para Tokoh Masyarakat Melayu.

Warsita bersama tokoh masyarakat Melayu, Ibu Aminah Ahmad.

Ekspresi Warsita ketika menceritakan pertemuannya dengan tokoh Masyarakat Melayu.

"Langkah pertama saya adalah ke Tokoh Masyarakat Melayu. Mereka punya *power* untuk memberikan nasehat kepada para kepala daerah," kata Warsita.

Para Tokoh Masyarakat Melayu yang ditemui Warsita adalah Husrien Hood, Suryatati, Ismet Junaedi, dan Aminah Ahmad.

Dalam silaturahim tersebut, Warsita memperkenalkan diri dan disambut dengan baik. Bahkan, keempat Tokoh Masyarakat Melayu itu memberikan 3 nasihat kepada Warsita. *Pertama,* angkat budaya Melayu sehingga menjadi karakter yang kuat untuk siswa. *Kedua,* dorong para pemangku kebijakan untuk berpikir bagaimana melahirkan sebuah peraturan agar budaya Melayu terinternalisasi di setiap satuan pendidikan, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan hingga pegawai pemerintahan. *Ketiga,* jadikan anak-anak Kepulauan Riau bertamadun Melayu.

"Bertamadun itu artinya resam, meresapi, menjiwai budaya dan tanah Melayu. Tidak hanya diucap saja. Bertamadun, beresam Melayu. Saya ingat kalimat itu," kenang Warsita.

Kiri: Warsita bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Melayu, Bapak Husrien Hood.

Kanan: Warsita bersama tokoh masyarakat Melayu, Ibu Suryatati.

Setelah memperoleh restu dan 3 nasehat dari Tokoh Masyarakat Melayu, selanjutnya Warsita mulai beradaptasi dengan lingkungan. Ia sering berkunjung ke kampung-kampung Melayu. Mengenal seni budaya Melayu, memahami, dan menjiwainya.

"Sepanjang bulan-bulan awal saya di sini, saya *blusukan* ke kampung-kampung asli, yang mereka itu, memang cakapnya cakap Melayu asli. Itu cara saya menyerap," tambahnya.

(III)

SESEKALI Warsita menyesap kopinya untuk mengusir letih yang hinggap di wajahnya. Maklum, hari itu, ia baru datang dari dinas luar kota bersama stafnya.

Sesaat kemudian, ia melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa waktu itu, lembaga yang ia nakhodai sedang mengalami transisi, dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

"LPMP itu tusinya penjaminan sistem mutu internal satuan pendidikan, kemudian (setelah menjadi BPMP, *red*) bergeser ke advokasi. Pendampingan tidak ke satuan pendidikan, tetapi ke Pemda. Itu kan luar biasa," ujar Warsita seraya tertawa.

Mengingat hal itu, Warsita berinisiatif untuk membangun SDM BPMP Kepri, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta melakukan internalisasi KMB beserta episode-epsiodenya.

Warsita beralasan pembangunan SDM itu sangat penting karena selain dituntut memahami KMB yang diterbitkan Kemendikbudrstek, SDM BPMP juga dituntut untuk memahami urusan Pemda, yang merupakan sasaran advokasinya.

Kepulauan Riau terdiri atas 1 provinsi dan 7 kabupaten/kota, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan.

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km^2 berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Sekitar 96 persen wilayahnya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang.

"Urusan Pemda itu banyak sekali, Mas. Kalau kita berbicara urusan Pemda berdasarkan Permendagri 59, *waduh* luar biasa. Makanya internalisasi BPMP sendiri melalui *people development*, itu penting," jelasnya.

People development yang dilakukan Warsita juga berkaitan dengan metode advokasi, yang bertujuan agar Pemda dapat memasukkan program-program Kemendikbudristek dalam anggarannya. Hal ini penting, karena menurutnya, Pemda sudah memiliki program, anggaran, dan SDM-nya. Akan tetapi Program Kemendikbudristek yang ia advokasikan belum tentu masuk di dalamnya.

"Padahal, program baru Kemendikbud harus segera ditransferkan kepada Pemda, kan seperti itu?" ujarnya.

Melihat kondisi itu, ia gamang. Apalagi, sebagai orang baru, ada juga resistensi yang ia alami.

"Awalnya (Pemda, *red*) pasti akan menolak. Orang baru di mana pun itu pasti ada rintangan, ditolak itu pasti ada. Tetapi tetap, kartu *truf* kita kan harus kita simpan dan kita keluarkan pada waktunya," kata Warsita.

Berangkat dari kondisi pelik tersebut, Warsita dan pegawainya berinisiatif merumuskan Strategi Implementasi Peningkatan Mutu secara Bergotong-royong atau disingkat Siput Gonggong. Pilihan nama ini merujuk pada makanan khas Kepulauan Riau, yaitu Siput Gonggong yang hidup di perairan Tanjungpinang dan dapat dijumpai di rumah makan sepanjang pinggir laut Tanjungpinang.

"Itu adalah layanan Tusi kita kepada Pemda, yang tidak menggurui. *Ngluruk tanpo bolo*, kan begitu kan? *Menang tanpo ngasorake*, gitu. Kita datang menyampaikan program-program Kemendikbud supaya berterima, tapi mereka merasa tidak digurui dan tidak didikte. Itu hal yang paling berat, Mas," katanya.

Siput Gonggong, Siput yang hidup di perairan Tanjungpinang, dan dapat dijumpai di rumah makan sepanjang pinggir laut Tanjungpinang.

Dalam perkembangannya, Siput Gonggong berhasil diterima oleh para pemangku kepentingan di Kepri. Namun demikian, Warsita merasa Siput Gonggong kurang menyentuh pucuk pimpinan di Pemda. Karena sepengetahuannya, para pimpinan daerah di Kepri cenderung enggan menggunakan pendekatan formal.

"Sebab kepala daerah begitu didekatkan dengan formal, itu mentah," ujarnya.

Warsita berpikir, harus ada katalisator atau konduktor yang bisa menghubungkannya dengan kepala daerah. Karena bila tidak ada, maka Kebijakan Kemendikbudristek akan terhenti. Tidak masuk dalam program dan anggaran Pemda.

"Semua OPD dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, konsultasinya itu pasti kepada kepala daerah. Lah, kalau kepala daerahnya belum kita sentuh, sebaik program apa pun pasti akan mentah!" katanya.

Mengingat hal itu, Warsita memilih aktivitas Secangkir Kopi Sejuta Inspirasi, yang sifatnya tidak formal.

"Budaya kami, setelah sholat dan macam-macam itu *ngopi*. Di situ kita lakukan pendekatan sesuai jadwal-jadwal beliau. Di situlah kita *sharing session*. Itu cara kita melakukan pendekatan kepala darah," cerita Warsita.

Dalam aktivitas Secangkir Kopi Sejuta Inspirasi, bahasa yang digunakan cair, tidak formal, dan bisa dilakukan kapan pun. Pagi, siang, malam bahkan tengah malam bisa dilakukan.

"Saya biasa ketemu dengan gubernur itu setengah dua malam, setengah satu malam. Itu bisa dan biasa. Saya diskusi dengan Bupati sambil makan martabak, biasa," ujarnya.

Advokasi KMB melalui media secangkir kopi itu akhirnya sukses.

"Dan Itu tembus. Mungkin saya, satu-satunya kepala BPMP di Indonesia itu yang masuk dalam Forkopinda. Jadi, saya punya grup, ada gubernur, walikota bupati, plus satu Kepala BPMP," tambahnya.

(IV)

WARSITA meletakkan cangkir kopinya di meja secara perlahan. Lalu, melanjutkan perbincangan. Menurutnya, ada empat strategi advokasi KMB kepada Pemda Kepri. *Pertama*, pendekatan formal, yang diwujudkan dalam bentuk Strategi Implementasi Peningkatan Mutu secara Gotong-royong atau Siput Gonggong. *Kedua*, pendekatan nonformal melalui media Secangkir Kopi Sejuta Inspirasi, Teh Tarik, dan safari politik ke daerah. *Ketiga*, Pendekatan budaya melalui Talam Sehidang dan Celoteh Budak Sebauk. *Keempat*, adalah Pendekatan Tokoh Adat Melayu.

Keempat strategi itu, ia bungkus dalam perilaku tamadun Melayu, atau berkeadaban Melayu. Langkah ini dipilih karena Warsita ingat prinsip ASN agar memegang teguh nilai Ber-AKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

"Di mana pun bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita harus belajar dari lokatif setempat. Supaya kita diterima, ada rasa *trust* yang akan muncul," kata Warsita.

Warsita menambahkan bahwa kepercayaan atau *trust* dari mayarakat Kepri, dan khususnya para pemangku kepentingan Kepri, sangat penting untuk dapat melanjutkan agenda advokasi KMB.

"Setelah *trust* baru kita cakaplah *sikit-sikit*, khususnya tentang transisi LPMP ke BPMP. Setelah itu, program-program apa yang akan kita lakukan kepada mereka. Kemudian, barulah berbicara anggaran, kapan penyusunan jadwal, dan kapan saya harus bertemu dengan legislatif," tambahnya.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya Warsita terbiasa dengan logat Melayu dan ahli mencipta pantun. Bahkan, beberapa orang menganggapnya lebih Melayu dibandingkan orang Melayu.

"Apalagi kepala BPMP sekarang, kan lebih jago kalau masalah pantun," kata Armaisal, Kepala Sekolah SMAN 1 Toapaya. "Jadi kalau beliau membuka suatu *event*, itu selalu dengan pantun. Kemudian, kalau kita bertanya, buka dulu dengan pantun."

"Padahal, beliau bukan orang Melayu. Tapi lebih Melayu," tegas Armaisal.

Hal senada disampaikan Lego Suhada, Pegawai Dinas Pendidikan Kepulauan Riau yang saban hari mengurusi PSP dan IKM.

"Umpamanya dia membuka acara dengan pantun. Mau memulai bicara harus dengan pantun, mau bertanya *password*nya dengan pantun. Jadi, pantun betul-betul dihidupkan, dihargai," ujar Lego.

Selain pantun, menurut Lego, Warsita juga menganjurkan seluruh pegawainya di BPMP Kepri berpakaian Adat Melayu pada waktu-waktu tertentu.

"Kalau kita rapat PMO bulanan, itu mereka menganjurkan suruh pakai pakaian Melayu," kata Lego.

"Beliau itu mengedepankan budaya kita, budaya Melayu," pungkasnya.

Kepiawaian Warsita dalam menjiwai Budaya Melayu akhirnya memperlancar tugas advokasinya kepada Pemda Kepri. Apalagi ada restu Tokoh Masyarakat Melayu yang mengiringinya.

Armaisal,
Kepala Sekolah
SMAN 1 Toapaya.

Lego Suhada,
Pegawai Dinas
Pendidikan
Kepulauan Riau

Amunisi advokasi KMB yang dimiliki Warsita makin lengkap tatkala ia menggunakan *power map* saat melakukan pendekatan kepada kepala daerah.

"Diskusi orang-orang tua, oh pak bupati ini tunduknya kepada siapa? Salah satunya ambil aja dari pesan berempat (baca Empat Tokoh Masyarakat Melayu, *red*) ini, Pak. Atas restu beliau-beliau, akhirnya jadi tunduk," kata Warsita.

Selanjutnya, tambah Warsita, setelah kepala daerah menerima pesan Tokoh Masyarakat, mereka akan memandatorikan amanah kepada kepala SKPD seperti dinas pendidikan kabupaten/kota, dan provinsi.

"Pasti akan menitipkan *omongan*. Tolong bantu budak itu. Budak di sini istilahnya anak. Tolong bantu budak itu. Budak itu baik. Tolong bantu. Wujudkan apa yang divisikan oleh BPMP itu," ujar Warsita menirukan kalimat yang disampaikan kepala daerah tentangnya.

Ada yang menarik saat melakukan pendekatan dengan kepala daerah. Karena menurut Warsita, membuat mereka dapat melafalkan BPMP itu, ternyata prosesnya panjang. Lidah mereka nampak kelu untuk mengucapkan BPMP.

"BPMP itu cemana. Itu tak bisa. Harus panjang, harus *trust*, dan dilancarkan B – P – M - P, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu harus diucapkan terus, harus disampaikan terus, dan dititipkan terus," ujarnya.

Setelah mulai lancar melafalkan BPMP, Warsita mulai menjalankan advokasi KMB secara perlahan.

"Bahwa Pemda harus melaksanakan KMB ini dengan koridor DAU yang mereka punyai dan mereka harus mencapai SPM. Padahal, pencapaian SPM ini harus didasarkan berbagai hal dalam kebijakan-kebijakan KMB, mulai dari strategi episode 01 sampai dengan strategi episode 26," cerita Warsita.

"Betapa berat advokasi setiap episode itu, yang harus disampaikan kepada kepala daerah. Tak bisa sekali. Tak bisa hanya kunjungan *hearing,* kemudian foto-foto, lalu ditampikan, tak bisa. Tak seronoklah, cakap Melayu," tambahnya.

Beban berat itu acapkali dirasakan Warsita tatkala KMB menelurkan episode baru. Ia bersama stafnya di BPMP Kepri harus bergegas bergerilya ke berbagai pemangku kepentingan dengan media advokasi yang tepat, agar episode baru KMB dapat masuk anggaran Pemda.

"Ya, melalui jadwal mereka sesuai dengan tradisi secangkir kopi. Kita tak butuh rokok di sini. Karena jarang kepala daerah merokok. Tetapi semua kepala daerah *ngopi*. Kopi O. Kopi O itu kopi hangat, kopi panas namanya kopi O. Kopi O macam ini," ujarnya, sambil menunjuk kopi dalam cangkirnya yang tinggal setengah.

(V)

KICAU burung di kandang belakang kantor BPMP Kepri masih bersahut-sahutan. Nampak Warsita menghela nafas panjang dan menghembuskannya secara perlahan.

Dari sekian advokasi KMB kepada kepala daerah, bagi Warsita, hampir semuanya memiliki kesan yang baik. Namun, ada satu kepala daerah yang unik dan membekas di benaknya.

"Jadi kami itu punya 7 kabupaten/kota dan satu provinsi. Dari semua kepala daerah yang sudah dekat, saya anggap kakak atau saudara saya di sini. Ada yang paling berkesan. Itu Bupati Kabupaten Lingga, namanya Pak Nizar," ceritanya.

Menurut Warsita, Bupati Lingga merupakan sosok petualang dan gemar naik gunung.

"Iya. Dia itu orang gunung. Di Kabupaten Lingga itu ada Gunung Daik, yang vegetasinya itu sangat lebat sekali. Gunungnya masih perawan dan pokok-pokok kayunya itu 8 - 10 orang melingkar begini," tambah Warsita seraya memperagakan lingkar tangannya.

Gunung Daik yang disebut Warsita terletak di Pulau Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, sekitar 1.165 meter di bawah permukaan laut, dan memiliki tiga puncak, yakni Gunung Daik, Gunung Pejantan dan Gunung Cindai Menangis.

Menyebut Gunung Daik, seseorang akan terkenang dengan sebuah pantun yang sangat familiar, terutama pada masyarakat rumpun Melayu:

/Pulau Pandan jauh di tengah
/Gunung Daik bercabang tiga
/hancur badan dikandung tanah
/budi baik dikenang juga.

Cabang gunung yang paling tinggi disebut Gunung Daik, yang menengah dinamakan Gunung Pejantan atau Gunung Pinjam-pinjaman, dan yang paling rendah dinamakan Gunung Cindai Menangis.

Warsita pernah mendaki Gunung Daik. Ceritanya, Bupati Lingga yang bernama M Nizar tersebut, berjanji akan menerima KMB beserta seluruh episodenya dengan sebuah syarat, yaitu Warsita harus membuat ucapkan Hari Jadi Kabupaten Lingga dari puncak Gunung Daik.

"Saya nak terima program KMB, seluruhnya yang situ kasih ke saya. Situ Minta berapa dana?" kata Warsita menirukan kalimat Bupati Lingga.

"Untuk memajukan Kabupaten Lingga, berapa dana?"

"20%. Karena itu amanat Undang-Undang Sisdiknas. Abang tak bisa turun dari itu. 21%, 22%, 23%, boleh meskipun itu adalah akumulasi dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang untuk meningkatkan kompetensi. Tapi tak apa, termasuk dana transfer daerah, tak apa, bang," jawab Warsita.

Setelah *deal*, Warsita segera melaksanakan syarat yang diminta Bupati Lingga. Ia naik Gunung Daik, dan membuat *streaming* Hari Jadi Kabupaten Lingga.

"Itu vegetasi luar biasa, persis Film Jurassic Park. Pohon-pohonnya, tingginya bisa 100 meter. Dan tak boleh itu ditebang. Masyarakat sangat mensucikan gunung itu," jelas Warsita,

"Kebetulan waktu itu ada sinyal untuk live streaming. Tak tau ceritanya gimana. Tapi ada. Ada sinyal. Antara logis tak logis, tapi faktanya begitu. Kami itu kalau tak ada sinyal kami bawa turun ke bawah, eh kebetulan ada sinyal, pas hari jadi kabupaten," tambahnya, takjub.

Setelah Warsita membuat live streaming, Bupati Lingga memenuhi janjinya secara bertahap. Tahun pertama anggaran pendidikan Kabupaten Lingga naik 7%.

"Ya tidak bisa langsung *jlep* 20%, bertahap begitu. Tahun pertama itu ada kenaikan sekitar 5 - 7%. Saya dapat kenaikan anggaran untuk mendukung KMB, dan itu dikeluarkan dengan Peraturan Bupati. Perda *lho* untuk mendukung KMB," ujar Warsita bangga.

Warsita pantas berbangga karena tak mudah membujuk kepala daerah mengubah mata anggarannya.

"Mereka ini kan orang-orang Kemendagri, punya regulasi dan aturan sendiri *kan* gitu? Sekolahnya punya mereka, gurunya punya mereka, semua-semuanya punya mereka. Kita *kan* hanya punya NSPK-nya saja. Nah gitu *kan*," jelas Warsita.

"Nah bagaimana jualan kita ini berterima oleh mereka, tapi mereka merasa tidak didikte dan didrilling gitu loh?" tambahnya. "*Menang tanpo ngasorake*, kayak gitu kan. Itu caranya, *kayak gitu*. Angkat yang mereka *maui*, wujudkan yang mereka *punyai*. Istilahnya orang Jawa itu, dipangku jatuhlah (berterima, red) dia."

Hingga saat ini, tambah Warsita, semua program Kemendikbudristek diterima oleh seluruh kepala daerah di Kepri. Bahkan karena upayanya menjiwai budaya Melayu, ia diberi gelar sebagai Pemersatu Kepri.

"Iya. Pak Armia, Kadisnya sempat cakap semacam itu," kata Warsita.

"Luar biasa. BPMP ini membuat kita bangkit. Memang benar pemersatu Kepri. Begitu," ujar Warsita, menirukan kalimat yang disematkan padanya.

"Kalau sudah senang hatinya, namanya resam, orang Melayu cakap resam itu senang. Situ minta apa saya wujudkan," pungkas Warsita.

(VI)

KESUKSESAN Warsita menjalankan tugas advokasi KMB tak hanya terjadi di Kabupaten Lingga, namun hampir semua kabupaten/kota dan provinsi di Kota Gurindam Dua Belas juga telah mengalokasikan anggaran untuk menjalankan KMB. Salah satunya adalah Provinsi Kepualauan Riau.

Heru Sulistyo,
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau,

Heru Sulistyo, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan bahwa selama ini Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan bantuan pada sekolah pelaksana PSP.

Totok Haryanto,
Pegawai Provinsi Kepulauan Riau.

"Tahun kemarin ada 10 juta buat sekolah. Khusus sekolah pelaksana PSP angkatan 1 dan angkatan 2. Ini per tahun," ujar Heru, di salah satu Rumah Makan Pinggir Laut di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Saat itu, Heru ditemani dua temannya, yaitu Totok Haryanto dan Lego Suhada.

Selain itu, Pemprov Kepri juga mendaftarkan sekolah-sekolahnya pada IKM. "Tahun ini sudah kami daftarkan juga semua sekolah untuk mengikuti IKM," tambahnya.

Menurut Heru, implementasi KMB di Kepri terhitung lancar karena satuan kerja yang berkaitan dengan pendidikan juga memberikan dukungan. Hal ini tak lepas dari upaya BPMP Kepri dalam menetapkan sasaran advokasi KMB.

"Selama ini Bappeda diundang juga untuk Perencanaan Berbasis Data (PBD). Ini ada acara di Batam juga ya hari ini," kata Heru.

Advokasi informal dilakukan Warsita bersama Gubernur Kepulauan Riau.

"Kemarin kita juga sempat mengajukan anggaran untuk bantuan kegiatan sekolah penggerak," tambah Lego yang duduk di sebalah Heru.

Pelaksanaan KMB khususnya epeisode ke-7, yaitu PSP di Kepri terhitung lancar karena saat ini sudah ada landasan hukumnya.

"Untuk sekolah penggerak kita sudah ada Pergubnya. Isinya terkait dengan ketercapaian dari apa yang kita lakukan. Termasuk kewajiban Pemda untuk mengalokasikan anggaran guna membantu sekolah pelaksana PSP. Sementara untuk IKM belum," jelas Heru.

Penerbitan peraturan gubernur tersebut, menurut Heru tak lepas dari dorongan BPMP Kepri.

"BPMP meminta Pemda untuk menyiapkan pergub, perwali, dan perbub. Jadi setiap kabupaten/kota kayaknya sudah ada, ya. Sudah diminta juga," kata Heru diamini dua kawannya.

Sementara itu, Totok yang duduk di samping Heru mengatakan, bahwa pelaksanaan KMB di Kota Gurindam Dua Belas lumayan lancar karena Kepala BPMP lebih proaktif.

"Komunikasinya tak ada *gap*. Baguslah menurut saya BPMP. Cuma kan kami di Pemda yang harus lebih keras lagilah. Harus lebih *greget* lagilah," kata Totok

"Tidak kaku lah menurut saya sih BPMP," timpal Heru

Tak mau ketinggalan, Lego menambahkan bahwa BPMP juga diajak ke sekolah. "Tanggapan sekolah juga bagus," ujarnya.

Lego yang duduk di samping Heru menambahkan bahwa untuk menyukseskan PSP, dinas pendidikan provinsi rutin melaksanakan rapat PMO dengan BPMP Kepri.

"Kita setiap bulan itu ada rapat PMO dengan BPMP untuk memantau sejauh mana sekolah penggerak, atau implementasi kurikulum merdeka itu beraktivitas, gitu. Aktivitasnya terkait dengan kurikulumnya. Kemudian, dengan komunitas belajarnya, guru penggeraknya, gitu. Kita pantau melalui rapat PMO, bulanan. Jadi setiap bulan gerak," ujarnya.

Di sisi lain, tambah Heru, Pemerintah Provinsi Kepri juga memberikan perhatian kepada akses sekolah berupa bantuan transportasi laut untuk siswa.

Menurut Heru, secara geografis, Kepri terdiri atas 4% daratan dan 96% lautan. Posisi sekolah jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemrpov Kepri tersebar di 7 kabupaten/kota. Oleh karena itu, siswa pendidikan menengah perlu perjuangan untuk sampai ke sekolahnya.

"Jadi siswa itu kami kasih bantu biaya transport dari rumah ke sekolah. Sesuai dengan biaya rutenya, biaya tiketnyalah, untuk sampai ke sekolah itu. Itu ada 37 sekolah kita yang di Kepri. Ada 1.600 anak atau mungkin 1.700-an anak yang kita beri biaya transportasi laut. Selain itu, kita ada biaya transportasi darat juga karena jaraknya jauh. Ada juga satu kabupaten/kota itu dari sekolah itu 40 km. Ada yang 30 km," jelas Heru.

"Jadi kita juga ada bantuan transportasi darat," pungkasnya.

(VII)

SINAR mentari mulai meredup. Semburat warna kuning keemasan mulai terlihat di sisi barat Kota Gurindam Dua Belas. Kopi hitam yang ada di cangkir Warsita sudah habis.

/jika diawali dengan bismillah
/hendaknya diakhiri dengan hamdalah
/bapak kepala, maafkan kami atas segala salah
/terima kasih atas segala jamuan dan hadiah

Sebait pantun itu saya sampaikan kepada Warsita. Ia tersenyum dan membalasnya dengan dua buah pantun berlogat Melayu:

/tabur bertih di atas pelaminan
/beras ditabur sebagai penande hati
/terima kaseh beribu kate kami ucapkan
/semoga menjadi resam hati dalam silaturahmi.

/sungguh indah mekar bunge sekuntum
/sayang terendak di tepi perigi
/bermula dan berakhir dengan assalamu'alikum
*/semoga terkenang setelah perpisahan ini.**

TIGA MITRA PEMBANGUNAN YANG ENGGAN DISEBUT NAMANYA

Di Kepulauan Riau, ada tiga mitra pembangunan yang turut mendukung Kebijakan Merdeka Belajar dan mendampingi Pemda dan satuan pendidikan melesatkan transformasi digital. Namun, keberadaannya enggan disebut-sebut.

IKHTIAR membenahi iklim pendidikan di Kepulauan Riau tak dilakukan seorang diri oleh BPMP Kepulauan Riau. Pelbagai elemen ia libatkan, termasuk membangun dan mengeksekusi mimpi bersama tiga mitra pembangunan.

Di Kepulauan Riau, salah satu mitra pembangunan yang cukup membantu adalah mitra pembangunan yang fokus pada digitalisasi sekolah. Warsita, Kepala BPMP Kepulauan Riau, mengaku terbantu dengan kehadirannya, yang ia analogikan sebagai laboratorium terbesar se-Asia, dan mendukung percepatan transformasi digital. Di tempat itu, para guru dan peserta didik belajar secara gratis tentang digitalisasi.

Warsita mengungkapkan bahwa nama dan peran mitra pembangunan itu tak mau diekspose ke publik.

"Disebutkan namanya saja tak mau mereka," kata Warsita.

"Kami ini Corporate Social Responbillity (CSR) murni," tambah Warsita menirukan ucapan pihak Mitra pembangunan tersebut.

Laboratorium yang terletak di Kota Batam ini mampu mengubah wajah digital satuan pendidikan di Kepulauan Riau melesat lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Bahkan, di tahun 2022, Gubernur Kepulauan Riau meraih penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Award untuk nominasi Tranformasi Digital yang diselenggarakan oleh Inews.

Selain itu, ada mitra pembangunan lain yang namanya juga enggan disebut-sebut, tapi aktif membantu percepatan transformasi digital di Kepulauan Riau. Di wadah itu, para guru dididik untuk memaksimalkan penggunaan *tools* dalam memproduksi konten.

"Di PMM kita kan diminta membuat konten. Itu mereka *nggak* mau dibayar nggak mau apa pun, *free bill*," kata Warsita.

Namun transformasi digital itu membutuhkan jaringan internet. Di titik itulah, kendala dan tantangan mulai muncul. Sebab, kondisi geografis Kepulauan Riau tak semua memiliki akses internet.

"Sinyal tak ada terkadang dan sebagainya. Jadi jangan dianggap remeh dan enteng," tutur Warsita.

Meskipun demikian, tantangan itu dapat diatasi dengan adanya mitra pembangunan lain yang juga turut membantu BPMP Kepulauan Riau. Mereka membawa peralatan WIFI dan peralatan akses internet ke pulau-pulau yang tak memiliki akses internet.

"Mereka itulah yang membawa-bawa (peralatan WIFI, red) ke sini memberi pendampingan supaya mereka (para guru, red) itu jangan sampai ketinggalan," ungkap Warsita.

"Semuanya sendiri. Sendiri mereka bawa," imbuh Warsita menegaskan.

Uluran tangan tiga mitra pembangunan itu bagi Warsita cukup unik. Pasalnya, mereka tak mau mendaftarkan dirinya sebagai mitra pembangunan. Bahkan, mereka tidak mau disebut-sebut. Warsita menyebut bahwa ketiganya itu ikhlas membantu tanpa pamrih.

"Sampai detik ini saya suruh daftar tak mau. Akan tetapi, berkat merekalah ekosistem kita itu berjalan baik," pungkas Warsita.*

"Sampai detik ini saya suruh daftar tak mau. Akan tetapi berkat merekalah ekosistem kita itu berjalan baik."

BUAH ADVOKASI BPMP KEPULAUAN RIAU;

SISWA RASAKAN MANFAAT PSP

Advokasi yang dilaksanakan Kepala BPMP Kepulauan Riau beserta pegawainya, mulai dirasakan manfaatnya oleh para siswa di Kepulauan Riau

Sisilia, siswi kelas X 1 SMAN 1 Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau

JUM'AT pagi, di ruang kepala sekolah SMAN 1 Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, nampak dua siswa menyampaikan pendapat tentang pembelajaran pada sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP). SMAN 1 Toapaya merupakan sekolah pelaksana PSP Angkatan II.

"Menurut saya, sangat keren. Jadi ya, sangat membekas sekali. Sangat senang," ujar Sisilia, siswi kelas X 1 seraya tersenyum manis, 12 Mei 2023.

Muhammad Muzaki Yazid Akbar, siswa kelas X 2 SMAN 1 Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau

Sisilia menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang disukai dalam PSP adalah Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Dalam P5, Sisil mengaku mempelajari aneka pelajaran, mulai IPA, IPS hingga pembelajaran tentang karakter.

"Kebetulan kemarin pernah membuat pupuk kompos. Di situ yang kami pelajari memang bukan hanya sekedar ilmu pelajaran, tapi kami juga banyak mempelajari *life skill, skill-skill* yang baru gitu, yang tentunya sangat berguna sekali untuk kami di masa depan," cerita Sisil, panggilan akrabnya.

Senada dengan Sisil, Muhammad Muzaki Yazid Akbar, siswa kelas X 2 mengatakan bahwa pada P5, IPS dan IPA dipelajari secara holistik. Siswa yang akrab dipanggil Zaki ini menunjuk sebuah lilin aromaterapi.

"Salah satu produk kami dari kelas X 2 yaitu lilin aromaterapi berbahan dasar minyak jelantah, dalam tema P5 Meraup Untung dari Limbah," tegasnya.

Zaki menambahkan bahwa dalam PSP, ia merasa merdeka untuk belajar, karena para guru tidak memaksakan metode pembelajaran. Para guru memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk memilih cara menyelesaikan sebuah masalah, dan/atau memilih cara membuat sebuah produk, yang awalnya hanya melihat tutorial dari *Youtube.*

"Kita olah sini, olah sana, berbagai kegagalan kita temui. Sehingga itu membuat mental kami, para pelajar siap untuk selanjutnya terjun di masyarakat, di masa yang akan datang," kata Zaki.

Sementara itu, ketika ditanya soal cara mengajar guru, Sisil mengatakan bahwa dalam PSP, para murid dibiasakan untuk mempelajari materi secara Mandiri. Guru hanya menjelaskan poin-poin utama dalam materi pelajaran. Baginya, pembelajaran yang memberikan kesempatan lebih luas pada siswa ini sangat menyenangkan.

"Kita jadi lebih bisa mengeksplore diri kita. lebih banyak berdiskusi, menjelaskan satu sama lain kepada teman-teman yang lain. Jadi banyak sekali *skill-skill* lain yang terasah. Mulai dari *skill* presentasi, *skill public speaking*, dan lainnya" jelas Sisil.

Zaki yang duduk di sebelah Sisil menambahkan bahwa para guru dalam kurikulum merdeka memfokuskan apa yang ingin dipelajari muridnya. Tidak lagi berfokus kepada guru.

"Sehingga benar seperti yang dikatakan Sisil, kita itu banyak dibikinin kelompok-kelompok untuk berdiskusi," ujar Zaki.

Selain itu, Zaki melihat bahwa para guru juga melakukan kolaborasi dalam menciptakan sebuah media belajar yang menyenangkan. Dia menyebut guru Diah Elvira dan guru Martina, yang telah berkolaborasi menciptakan media pendeteksi polusi udara, dengan menggabungkan pelajaran fisika dan biologi.

"Saya sangat terpukau ketika bu guru dapat menciptakan hal sedemikian rupa itu dan bercerita bagaimana cara kerjanya, dilihat secara biologi dan juga secara fisika. Itu lebih menyenangkan, dan yang paling penting adalah praktiknya. Ada bendanya, tidak hanya teori, sehingga benar-benar bisa dipahami secara jelas," jelas Zaki.

Melihat pernyataan Sisil dan Zaki, Diah Elvira, Guru SMAN 1 Toapaya, mengaku senang.

Diah juga menambahkan, dalam PSP, ia juga sering mengajak siswa-siswinya berkunjung ke *home* industri. Salah satunya *home* industri kerupuk. "Jadi kami belajar kesana, diajarkan juga ilmu-ilmu bagaimana membuat kerupuk dan dikasih tahu rahasianya supaya kerupuknya itu renyah, gitu," ceritanya.

Diah Elvira,
Guru SMAN 1 Toapaya,
Bintan, Kepulauan Riau

Menurut Diah, para siswanya sangat tertarik sekali dan ingin bisa berwirausaha. Apalagi saat diceritakan jatuh-bangunnya menjadi penguasa kerupuk hingga perjuangannya bangkit kembali.

"Beliau juga memberi nasihat kepada siswa untuk berusaha membuat peluang usaha, supaya bisa berwirausaha," katanya.

Kebanggaan terhadap dua siswa itu, juga disampaikan Armaisal, Kepala Sekolah SMAN 1 Toapaya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa keberhasilan pembelajaran itu, menurut Armaisal, tak dapat dilepaskan dari peran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepulauan Riau.

"Ya, BPMP sendiri memberikan motivasi kepada kami untuk menjadi kepala sekolah penggerak. Mereka berperan penting dalam memotivasi kepala-kepala sekolah se-Kabupaten Bintan ini untuk ikut berpartisipasi dalam tes kepala sekolah penggerak," tegas Armaisal.

Armaisal menambahkan bahwa BPMP bersama dinas pendidikan juga sering melakukan sosialisasi PSP mulai dari syarat dan ketentuan pendaftaran sampai dengan seleksi dan pelatihan-pelatihan yang akan diberikan.

Dalam melakukan sosialisasi, tambah Armaisal, BPMP Kepulauan Riau acapkali membungkusnya dengan Seni Budaya Kepulauan Riau.

"Apalagi kepala BPMP sekarang lebih jago kalau masalah pantun," kata Armaisal. "Jadi kalau beliau membuka suatu *event*, itu selalu dengan pantun. Kemudian, kalau kita bertanya, buka dulu dengan pantun."

"Padahal, beliau bukan orang Melayu, tapi lebih Melayu," tegasnya.

Melihat kepiawaian Kepala BPMP tersebut, Armaisal mengaku masyarakat Kepulauan Riau merasa senang karena seni budayanya dihargai dan dipentaskan dalam setiap kegiatan.

Kebiasaan membawa pantun dalam saban kegiatan tak hanya dipraktikkan Kepala BPMP, tetapi juga pegawainya.

"Begitu juga dengan kawan-kawan BPMP yang lain, seperti Ibu Mariana, kalau jadi narasumber juga membawakan pantun," pungkasnya.*

LUWES DAN BIJAK MENGAWAL TRANSFORMASI ORGANISASI

Ikhtiar Jarwoko melakukan transformasi organisasi dari LPMP menjadi BPMP, diiringi dengan sikap bijak dan tidak kaku.

(I)

WAKTU sudah menunjukkan pukul 22.00 WITA. Jarwoko, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara (BPMP Kaltara) menyanggupi sebuah wawancara tentang transformasi dan advokasi organisasinya, di kantornya yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji, No. 76, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara.

Senin malam tanggal 22 Mei itu, di ruangannya yang berukuran 4x5 meter persegi, Jarwoko mengatakan bahwa BPMP Kaltara tak seperti BPMP di provinsi-provinsi lain karena merupakan lembaga baru.

Sebelum bernama BPMP, lembaganya bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan secara kelembagaan baru berjalan sekitar tahun 2017. Beberapa tahun kemudian, LPMP berubah menjadi BPMP. Mengingat perjalanan LPMP Kaltara tak selama LPMP lainnya, Jarwoko menilai para stafnya belum terinternalisasi tugas dan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan pegawai LPMP lainnya. Itu sebabnya, ketika berubah menjadi BPMP, tidak terlalu sulit baginya dan para pegawainya untuk melakukan adaptasi.

"Itu yang membedakan," katanya.

Kondisi itu membuat Jarwoko cukup diuntungkan. Ia mengaku mudah membiasakan pegawai BPMP Kaltara dengan tugas dan fungsi baru, yaitu melaksanakan advokasi KMB kepada Pemda.

"Karena tidak terkontaminasi dengan paradigma lama, gitu," imbuhnya.

Jarwoko menyadari bahwa perubahan itu memang bukan perkara mudah bagi koleganya yang berada di provinsi yang telah lama menjalankan tugas dan fungsi LPMP.

"Dari biasanya menyelenggarakan diklat, lalu kemudian harus melakukan advokasi pada Pemda. Itu memang tak mudah. Tapi kebetulan itu tidak terjadi di Kaltara. Karena apa? Kaltara ini adalah lembaga baru yang tidak memiliki tradisi LPMP. Kita tidak punya WI," terang Jarwoko.

Tahun pertama
Jarwoko bertugas di LPMP Kalimantan Utara.

Meski demikian, Jarwoko menegaskan bahwa organisasinya tetap melakukan proses transformasi. Di awal transisi itu, ia kerap menyampaikan amanah kepada para stafnya bahwa fokus tugas dan fungsi BPMP adalah Pemda. Meski ia juga menekankan agar staf-stafnya tidak membatasi diri, melainkan juga memberi nilai tambah dan tetap menyebar kebaikan kepada siapa pun.

"Jangan mengabaikan kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu di sekolah atau dengan guru. Meski tidak ada program di kita, tapi bukan berarti, 'oh ini bukan tugas kita.' Jangan gitu. Ini kesempatan kebaikan, boleh kita lakukan," tegas Jarwoko.

Ia mengaku bahwa dalam proses transformasi organisasi itu, dirinya tidak kaku. Ia mengilustrasikan sikap luwesnya dengan sebuah tubuh yang terdiri atas tangan, kaki, mata, mulut, dan lainnya.

"Mana yang harus didahulukan? kadang orang berpikir mata karena mata dianggap paling penting. Begitu matanya *nggak* bisa dibuka, *kan* terus berhenti. Karena dia berpikir hanya matanya. Ya, jawaban saya, mana yang bisa dibuka *aja*," ujar Jarwoko menganalogikan.

"Jadi kita pas di sekolah, ya sudah lakukan di sekolah. *Pas* dengan Pemda, ya lakukan dengan Pemda. Tapi yang kita programkan itu memang untuk advokasi Pemda. Jadi nggak kaku," imbuhnya menjelaskan.

Dalam proses transformasi itu, Jarwoko juga melakukan perubahan struktur organisasi. Ia juga membentuk tim PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (PDM). Baginya, konsep itu lebih fleksibel.

"PDM itu bisa kita ubah-ubah tergantung tugas pokok dan fungsinya. Seandainya nanti ada kebijakan baru, kita bisa ubah. Ada program baru, ya kita bentuk lagi *aja*, tinggal buat SK saja. SK-nya *kan* dari kepalanya, *nggak* perlu yang lain-lain. Itu lebih fleksibel memang," terang Jarwoko.

Kedua dari kiri, Jarwoko foto bersama di depan kantor baru BPMP Kalimantan Utara.

Selain fleksibel, menurut Jarwoko, pola PDM itu membuat kerja-kerja organisasinya lebih cepat. Sebab, PDM berbasis projek penyelesaian masalah.

Sementara tentang 40 - 50 item objektif PDM yang mesti digarap oleh BPMP, bagi Jarwoko, tidak berat asal tidak bergerak sendiri. "Berat itu kan kalau kita kerjakan sendiri. Makanya saya buat distribusi sampai habis, *nggak* ada pegawai yang tidak terlibat di dalam PDM itu," tegas Jarwoko.

Seperti telah dijelaskan dalam tulisan berjudul **Jalan Mendaki Transformasi,** disebutkan bahwa dari puluhan item objektif PDM itu, seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen, harus merampungkan semuanya hingga November 2023. Melihat amanah ini, Jarwoko justru mengaku bahwa dirinya telah melaksanakannya sejak tahun 2018, sebelum intruksi datang. Ia telah meminta pegawainya untuk menyusun jadwal kerja yang harus rampung pada November 2023.

"Itu kita merencanakan *tuh* sampai November, kalau pun ada melesetnya, masih ada Desember. Tapi setiap bulan *kan* dipantau terus. November Ini harus selesai," pungkas Jarwoko.

"Berat itu kan kalau kita kerjakan sendiri. Makanya saya buat distribusi sampai habis, nggak ada pegawai yang tidak terlibat di dalam PDM itu,"

(II)

TARGET pekerjaan yang selesai di Bulan November itu diiringi Jarwoko dengan sikap bijak dan luwes. Ia tak pernah memaksakan target. Karena, ia menilai target ibarat cita-cita. Bila tidak berhasil, ia bersikap legowo.

"Saya tidak menyalahkan anak-anak, *nggak* berhasil *nggak* apa-apa *kok*. Kalau semuanya nuntut orang berhasil, itu *nggak* realistis! Apalagi kalau saya memaksa orang berhasil, tanpa saya mengetahui dan/atau mengabaikan apapun alasannya, maka siap-siap saya dibohongin," terang Jarwoko.

Memang, ketidakberhasilan target itu tidak bisa ia terima begitu saja. Ia pasti akan menanyakan alasan-alasannya kepada stafnya. Evaluasi tetap menjadi rutinitas yang ia lakukan pada fase berikutnya. Jarwoko dan seluruh jajaran pegawai BPMP akan mencari tahu sebab musabab target yang meleset.

Sikap luwes itu ia praktikkan karena ingin melihat keadaan yang sesungguhnya. Jarwoko khawatir, jika memaksakan pegawainya, ia akan mendengar pernyataan-pernyataan yang bernada ABS atau asal bapak senang.

"Kalau begitu, saya *nggak* akan pernah bisa melihat keadaan yang sesungguhnya," imbuhnya.

Selain itu, Jarwoko berusaha membiasakan diri membangun kultur yang nyaman bagi seluruh pegawainya. Saban ia hendak menginginkan sesuatu, ia pasti menanyakan kepada pegawainya.

"Saya mau *gini*, bisa *nggak*?"

"Dicoba, Pak."

"Kalau kamu nyoba begini, targetnya apa? Di dalam target, *kan* ada tahapannya. Ini kamu mau melakukan apa? Gagal tidak apa-apa," ujar Jarwoko mencontohkan percakapan dengan pegawainya.

(III)

JARUM jam dinding telah bergerak menuju pukul 23.11 WITA. Malam kian larut. Jarwoko masih terus bercerita dan sesekali menguap.

Ia menuturkan bahwa kultur kerja yang fokus menjalankan tugas dan fungsi mengadvokasi Pemda itu mulai berjalan dengan baik.

Niat Jarwoko hanya tentang memajukan pendidikan. Oleh karena itu, Jarwoko tak lelah terus mewanti-wanti seluruh pegawainya untuk fokus dan tidak melihat lembaga lain.

Kanan, Jarwoko memimpin rapat di salah satu kantor milik Pemda Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Waktu itu, lemabaga yang dipimpin masih bernama LPMP dan belum memiliki kantor.

"Fokus saja ke daerah," begitu Jarwoko menegaskan.

"Karena itu area kita. Itu ladang kita! Aku *nggak* pernah ngintip-ngintip teman lain sudah *nyampe* berapa? *nggak*. *Nggak* penting. Coba kita sudah sampai di mana, kita sudah sampai di mana?" Jarwoko melanjutkan.

Bahkan, ia tak peduli jika dianggap tak berhasil. Sedari awal tak pernah terbesit dalam benaknya untuk berkompetisi.

"Saya mau katakan saya tidak ingin berkompetisi. Mau juara 1 atau juara rendah di tingkat nasional, *enggak* penting. Kalau Kaltara ini puas dan angkanya mencapai puncak angka maksimal, bagi saya itu sudah luar biasa," tegas Jarwoko.

Tak dinyana, sikap itu membuahkan hasil. BPMP Kalimantan Utara yang waktu itu masih bernama LPMP menempati peringkat terbaik I atas nilai Kinerja Keuangan pada kategori UPT dengan raihan skor 99,67 pada tahun 2020.

"Itu bukan tujuan saya. Tujuan Jarwoko hanya satu, yakni 100 persen untuk Pemda," tambahnya.*

"Saya mau katakan saya tidak ingin berkompetisi. Mau juara 1 atau juara rendah di tingkat nasional enggak penting. Kalau Kaltara ini puas dan angkanya mencapai puncak angka maksimal, bagi saya itu sudah luar biasa."

SARABA DAN KISAH ADVOKASI DI NEGERI BERSEMBOYAN BENUANTA

Ada banyak strategi advokasi KMB yang diluncurkan Jarwoko. Mulai dari menjadi pribadi yang diterima (self trust), pendekatan informal di kedai kopi, saraba dan karaoke keluarga, hingga pendekatan formal seperti penghargaan dan menjadikan kepala dinas pendidikan sebagai narasumber.

(I)

RABU 24 Mei 2023, sekira pukul 21.26 Waktu Indonesia Tengah (WITA), nampak lima orang tengah menanti segelas saraba di Sahabat Warung 77, yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Tarakan, Kalimantan Utara. Malam itu terdengar obrolan hangat antarmereka, sehangat minuman khas Makassar berbahan rempah-rempah, gula merah, dan susu yang sedang mereka teguk.

"Kami biasa ngopi-ngopi atau minum saraba seperti ini," kata Jarwoko, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara.

Pendapat Jarwoko itu ditimpali Akhmad, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang duduk di hadapan Jarwoko. Ia mengaku pendekatan informal yang dilakukan Jarwoko memang lebih nyaman. Bahkan, tak jarang komunikasi dan koordinasi mereka lakukan via *WhatsApp*.

Minum saraba, salah satu pendekatan informal yang dilakukan Jarwoko saat advokasi KMB.

"Jadi enak sekali. Lebih luwes, lebih efektif. Tidak harus dengan surat resmi," ucap Akhmad sembari tertawa tipis.

"Karena terus terang, kalau formal kaku sekali. Bagaimanapun, pendidikan itu *kan* harus fleksibel dan nyaman," tambah Akhmad.

Meski demikian, Akhmad menegaskan, bahwa pendekatan informal itu tetap mengedepankan etika dan tidak boleh meninggalkan pendekatan formal.

(II)

DUA hari sebelumnya, yaitu Senin malam pukul 22.00 WITA, di kantor BPMP Kalimantan Utara, Jarwoko bercerita bahwa ia memang sering menggunakan strategi informal dalam mengadvokasi KMB kepada Pemda-pemda di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Provinsi ke-34 Negara Republik Indonesia yang memiliki semboyan Benuanta yang berarti Wilayah Kita/Daerah Kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat.

Strategi informal itu telah dilakukan Jarwoko sejak pertama kali menginjakkan kaki di wilayah yang dulunya merupakan bekas Kesultanan Bulungan. "Pertama kali bertemu dengan Pejabat Gubernur Irianto Lambrie, tahun 2017 di acara tasmiyahan warga, bersama kepala dinas pendidikan provinsi," kenang Jarwoko.

Tasmiyah atau tasmiyahan merupakan tradisi orang Banjar yang dilakukan dalam rangka memberi nama kepada anak yang baru lahir. Pemberian nama anak dapat dilakukan di hari pertama bayi lahir atau di hari ketujuh. Orang-orang Banjar melaksanakan tasmiyahan diiringi dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an dan ceramah agama.

Pendekatan informal tersebut ia lanjutkan hingga kelahiran KMB, yang saat ini telah melahirkan 26 Episode Merdeka Belajar.

Jarwoko, saat diwawancari di kantornya yang masih menyewa sebuah ruko di Kabupaten Bulungan.

Saban perjumpaan informal Jarwoko jarang membicarakan kebijakan. Menurutnya, strategi informal itu tak lain adalah cara untuk membangun kedekatan emosional-personal, agar dirinya terlebih dulu diterima oleh pejabat-pejabat di sekitar Kalimantan Utara. Membangun hubungan persaudaraan dan kekerabatan menjadi prinsip yang Jarwoko kedepankan.

"Prinsip yang saya yakini, kalau kita menjadi pribadi yang dapat diterima, nanti mereka juga akan menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kalau pribadi kita sudah ditolak (orang *kok* sombong, orang *kok* mempersulit), *gitu* ya susah mas. *Ngga* bisa!" jelas Jarwoko.

Saat hubungan telah terjalin dengan nyaman, komunikasi dan koordinasi selanjutnya akan menjadi lebih lentur.

"Formal itu hanya untuk dokumen," tegas Jarwoko.

Di samping itu, Jarwoko mengaku sering membantu rekan-rekan Pemda di sekitar Kalimantan Utara. Misalkan, mobil dinasnya kerap dipinjam oleh rekan pejabat Pemda bila mereka sedang ada tamu dari Jakarta.

"Pak, mau pinjam mobil," ujar Jarwoko menirukan rekan Pemdanya.

"Monggo, monggo, pakai saja."

Ikhtiar itu, Jarwoko sebut sebagai deposito emosi atau menanam kebaikan. Karena ia menyadari bahwa kehadirannya di Kalimantan Utara tak lain untuk membantu dan meringankan.

"Jadi tidak selalu formal. Tapi kalau pada kegiatan yang formal, tentu kita bicara formal karena memang medianya formal," ujarnya. "Kita *kan* memang menggunakan berbagai saluran. Kalau informal saja itu *kan* terlalu sempit juga."

Pendekatan informal yang dilakukan Jarwoko, diamini oleh Suparmin Seto, Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Bulungan.

"Beliau sering *ngajak* karaoke di rumah makan untuk pejabat-pejabat. Beliau selalu *welcome*," ujar Suparmin, di kantornya yang terletak di Jl. Skip II, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Suparmin mengakui bahwa pendekatan informal tersebut cukup manjur. Bahkan, hubungan personal Suparmin dengan Jarwoko semakin dekat. Di titik itu, Suparmin meyakinkan Jarwoko untuk terus mengawal program BPMP sepenuhnya.

Hal senada juga diakui Hari Purwanto, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Kalimantan Utara, bahwa pendekatan informal yang dilakukan Jarwoko cukup efektif dan efisien.

"Dan, dengan karaoke bisa ketemu," ungkap Hari, yang sering menggunakan cara yang sama dalam pendekatan kepada para pejabat di Kalimantan Utara.

(III)

MEMBANTU dan meringankan. Dua kata itu adalah mantra yang Jarwoko pegang dari awal hingga kini dalam mengadvokasi KMB. Kehadiran lembaganya bukan sebagai kompetitor bagi Pemda, tapi partner.

Pada awal tahun menginjakkan kaki di tanah Borneo, Jarwoko rutin beranjangsana kepada pejabat Pemda. Saban bertemu pimpinan Pemda, dua kata itu senantiasa Jarwoko sampaikan.

"Ya, kami akan jadi partner dinas pendidikan. Kami membantu, bukan mengambil alih tanggung jawab. Pendidikan tetap menjadi kewenangan Pemda," kata Jarwoko.

Pendekatan itu juga merupakan bagian upaya Jarwoko agar mudah memengaruhi. "Kalau kita bisa memengaruhi berarti tujuan kita bisa terwujud," jelas Jarwoko.

Karena itu, Jarwoko tak bosan-bosan mewanti-wanti pegawainya untuk menjadikan lembaganya sebagai sumber bantuan, bukan beban. Atas pendekatan tersebut, apresiasi pun berdatangan dari pejabat Pemda setempat.

"Saya berterima kasih kepada BPMP, khususnya yang di Kalimantan Utara," ungkap Suparmin. Ia menyebutkan bahwa keberadaan BPMP tak sekadar mengadvokasi KMB kepada Pemda, tetapi juga memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dinas pendidikan hingga sekolah.

Bahkan tak jarang, kantor BPMP yang saat ini masih menyewa salah satu ruko di Kabupaten Bulungan itu kerap menjadi tempat kegiatan dinas pendidikan. Suparmin mengaku Jarwoko sempat mengatakan, "Pak Kadis di BPMP ada ruangan nganggur. Kalau *sampean* penuh kegiatan dan *nggak* ada tempat, silakan dipakai. Kami siapkan."

"Ini yang saya sambut. Ini luar biasa. Senang banget gitu. Jadi, dengan adanya UPT kementerian di kabupaten ini, kami merasa dekat dengan kementerian," tambah Suparmin.

Testimoni serupa juga diungkapkan Akhmad. Menurutnya, Jarwoko merupakan sosok yang pro aktif dan sikap *welcome*-nya tak cuma kepada dinas. Siapa pun, termasuk para guru-guru yang mengalami kesulitan, Jarwoko datang mengulurkan tangan.

Akhmad juga melihat, setiap bersua, Jarwoko jarang memosisikan dirinya sebagai pemimpin. Tak ada sekat, sehingga hubungannya dengan Jarwoko tidak canggung dan ia mudah bertanya saban dilanda kebingungan.

"Tidak membatasi diri," kata Akhmad.

Di samping itu, Jarwoko selalu men-*support* Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Akhmad mencontohkan saat ia melaksanakan Pembekalan Perencanaan Berbasis Data (PBD) bagi seluruh guru-guru dan bendahara sekolah di Nunukan.

"Kami minta bantuan beliau, 'Pak kami ada pelatihan ini, tapi tidak ada anggarannya.' Lalu beliau menugaskan stafnya untuk menjadi narasumber," kenang Akhmad.

"Jadi beliau *welcome* dan tak segan membantu kalau memang ada kesulitan-kesulitan. Makanya, ya kami bersyukur ada BPMP Kalimantan Utara ini, kami dekat dalam arti *nggak* ada kesulitan," lanjutnya.

(IV)

DARI sisi pndekatan formal, Jarwoko memiliki tiga strategi andalan dalam advokasi KMB kepada Pemda, yakni; memberikan penghargaan, memfasilitasi kegiatan, dan yang terakhir menjadikan kepala dinas pendidikan sebagai narasumber di kegiatan BPMP Kaltara. Penghargaan yang Jarwoko maksud tak seperti penghargaan pada umumnya. Apresiasi itu bukan dikompetisikan. Bagi Jarwoko, setiap Pemda memiliki keunggulan masing-masing.

"Model diversifikasi," begitu kata Jarwoko.

Ia mencontohkan seperti Kabupaten Tanah Tidung (KTT). Penghargaan yang ia berikan sesuai dengan program yang paling bagus dan berangkat dari ukuran-ukuran yang objektif.

"KTT apa yang unggul di sana? KTT itu sudah menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan modul yang dikirimkan ke masing-masing siswa. Oke, kalau begitu, kita ambil itu KTT yang paling bagus di dalam pelaksanaan PJJ. *Kasih* penghargaannya," cerita Jarwoko.

Upaya itu merupakan apresiasi dan *support* yang dilakukan oleh BPMP Kaltara. Jarwoko menyebut bahwa itu mampu memantik rasa bangga Pemda. Tak jarang kepala dinas pendidikan melaporkannya ke bupati.

"Ini yang saya sambut. Ini luar biasa. Senang banget gitu. Jadi dengan adanya UPT kementerian di kabupaten ini, kami ini merasa dekat dengan kementerian."

”Ketika dia lapor bupati, dia *enggak* mungkin mengecilkan keberadaan BPMP. Bahkan, beberapa kepala dinas juga meminta BPMP untuk memberikan penghargaan kepada bupati dan kita buatkan,” kata Jarwoko.

”Kalau untuk memotivasi, kenapa tidak?” tambahnya.

Di samping itu, Jarwoko juga memberikan fasilitasi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan Pemda. Ia menjelaskan kegiatan itu ada syaratnya, yakni, Pemda yang menyelenggarakan dan menyiapkan peserta. Seluruh akomodasi dan konsumsi peserta juga disediakan oleh Pemda.

”Saya cuma menyediakan narasumber dan nggak perlu dibayar. Hotel atau transport juga *nggak* usah,” jelas Jarwoko.

Bentuk dan konsep kegiatannya pun bebas ditentukan oleh masing-masing Pemda. Jarwoko menilai skema itu dibuat karena tidak semua program yang masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) bisa mengakomodir kebutuhan Pemda.

“Itu yang kami lakukan. Itu yang saya sebut membantu dan meringankan, tidak membebani,” katanya.

Strategi ketiga yang digunakan Jarwoko adalah menjadikan kepala dinas pendidikan sebagai narasumber kegiatan. Ia mencontohkan dalam kegiatan PBD Kepala dinas menyiapkan dan mempresentasikan materi.

”Kalau yang *ngomong* dia sendiri, dia *nggak* mungkin *ngomong* jelek. Kalau dia *ngomong* jelek dia akan berusaha memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan yang *diomongkan*. Nanti *kan* kalau dia *nggak* kerjakan, itu kan rasanya *nggak* enak. Jadi itu yang juga kami lakukan dan pastinya mereka senang jadi narasumber,” ucap Jarwoko.

(V)

WAKTU sudah bergerak menuju pukul 01.15 WITA. Di kantornya yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji, Nomor 76, Tanjung Selor, Bulungan, Jarwoko masih semangat berbagi kisah advokasi.

Jarwoko mengatakan, proses advokasi yang ia jalani tidak lancar sepenuhnya. Ada juga rintangan yang menghadang, mulai dari kondisi kantor yang masih menyewa pada sebuah ruko, jarak antara kantor BPMP dan Pemda, hingga sikap beberapa pemangku kepentingan yang terkesan inferior dan/atau mengambinghitamkan keadaan bila sedang terpojok.

Dari sisi jarak, kantor BPMP cukup dekat dengan kantor Pemda Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, akan tetapi dengan Pemda lainnya

Advokasi Formal: Jarwoko melalakukan advokasi dan bimtek kepada Pemda dan Satpen dalam mengakses rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data.

seperti Kota Tarakan, Kabubaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung jaraknya sangat jauh.

“Rintangan sudah pasti ada, tapi saya memandang rintangan adalah petunjuk jalan keluar. Kadang dengan rintangan kita akan berpikir kreatif untuk menemukan jalan keluar,” ujar Jarwoko.

Jarwoko bercerita, saat BPMP masih bernama LPMP dan berdiri tahun 2017, lembaganya tidak memiliki anggaran dan tidak ada staf yang mendampinginya. “Kami juga tidak memiliki aset, apalagi kantor,” katanya.

Dengan segala keterbatasan tersebut, Jarwoko tidak mengeluh. Ia memilih terus bertugas.

Pada tahun pertama itu, ia sering bersilaturahim ke sekolah dan dinas pendidikan sekitar Kalimantan Utara.

“Banyak mendengar apa yang menjadi kebutuhan dinas dan sekolah. Kami ingin menunjukkan bahwa berbuat dalam keterbatasan itu lebih baik daripada diam menunggu kesempurnaan,” tegasnya.

Rintangan berikutnya adalah kebiasaan para pendidik dan para pengambil kebijakan yang acapkali berlindung dari situasi dan kondisi Kalimantan Utara yang dinilai kurang menguntungkan. Menurutnya, mereka selalu menonjolkan Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan dan pedalaman yang serba sulit. Naifnya, kesulitan itu dijadikan alasan untuk meminta belas kasih dan sekaligus pembenar bila ada kegagalan.

"Ini rintangan yang paling penting untuk kami ubah! Kami memulai dengan memberikan contoh bahwa yang paling penting adalah berbuat apa yang dapat kita lakukan dalan keadaan seperti ini. Sekali lagi, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan! Bukan menunggu apa yang orang lain lakukan pada kita supaya kita berubah," tegas Jarwoko.

"Yang bisa mengubah diri kita, ya kita sendiri, bukan orang lain! Kami ajak guru dan Pemda untuk berbuat dari apa yang ada, dari apa yang kita punya, dan dari apa yang kita bisa! Kami tunjukkan bahwa kita juga bisa berprestasi, dan ternyata BPMP Kaltara, meskipun lahir belakangan, juga bisa melaju terdepan. Buktinya kami bisa memperoleh penghargaan dari menteri pendidikan sebagai Satker terbaik nasional dalam pengelolaan kinerja anggaran," pungkasnya bersemangat.

(VI)

SARABA milik Akhmad baru berkurang sedikit. Ia keasyikan bercerita. RABU 24 Mei 2023, pukul 22.45 WITA, di ujung obrolan, Akhmad menyebutkan bahwa harapan-harapannya masih ia gantungkan kepada BPMP. Sebab, ia melihat UPT itu merupakan perwakilan dari kementerian dan sangat membantu terhadap kondisi pendidikan yang ada di daerah, apa pun bentuknya.

"Baik itu pembelajaran maupun gurunya. Kalau guru kan BGP, ya. Tapi kalau untuk peningkatan mutunya *kan* di BPMP, itu sangat kami harapkan," ujar Akhmad.

Akhmad berharap program-program yang sudah dilaksanakan oleh BPMP saat ini terus berkesinambungan. Bukan hanya untuk sekolah penggerak saja, tapi juga untuk sekolah di luar sekolah penggerak. Sebab, ia ingin pendidikan di Kabupaten Nunukan mendapatkan program dan manfaat yang setara.

"Eksistensi daripada masing-masing sekolah mempunyai semangat yang sama untuk memajukan pendidikan di bawah binaan BPMP," tutupnya.*

DEDIKASI
MENGGUGAH HATI

Dedikasi Jarwoko tak hanya melakukan pendampingan dan pelayanan kepada Pemda. Selain itu ia kerap memotivasi para guru untuk menjadi guru yang digugu dan ditiru. Kepedulian dan keberpihakan Jarwoko ini mengetuk pintu hati para guru.

(I)

PEREMPUAN berseragam cokelat itu mulai bercerita. Sesekali ia memperbaiki letak kacamata yang menggantung di hidungnya. Lambat laun, suara kerasnya mulai menurun dan terpotong-potong. Sepasang mata perempuan itu pun redup berair. Hatinya bergejolak. Ia menghela napas. Air mata mulai membasahi pipinya.

Perempuan itu adalah Neni Martini, Wakil Kepala Sekolah (Waka) Kurikulum SMPN 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ia mberes mili saat mengisahkan kepedulian Jarwoko, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara.

"Ayo jadi guru yang betul-betul jadi guru. *Nggak* usah mikir materi. Jadi guru sejati. Jadi guru yang ikhlas dekat dengan siswa, mengajar dengan sepenuh hati," kata Neni menirukan perkataan Jarwoko.

Kalimat-kalimat serupa, kata Neni, tak hanya sekali diutarakan Jarwoko. Saban bersua dengan Jarwoko, energi Neni seakan bertambah. Neni sadar Jarwoko tidak sekadar menyemangati. Perkataan Jarwoko itu seolah menuntun Neni untuk menjadi guru yang digugu dan ditiru.

"Saya sangat tergugah," kata Neni tersenyum sembari mengusap air matanya. Neni melanjutkan kisahnya. Pernyataan Jarwoko itu mengingatkan ia dengan keikhlasan guru matematikanya saat Sekolah Dasar (SD). Kala itu, Neni dan beberapa kawannya les di tempat sang guru tersebut.

"Kita itu, tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu luar biasa," kenang Neni.

Kepedulian guru Neni tak berhenti di situ. Neni memiliki kisah lain yang masih kental dalam ingatannya. Ceritanya, ia hendak melanjutkan ke Sekolah

Suasana belajar mengajar di salah satu kelas SMPN 1 Tanjung Selor.

Menengah Pertama (SMP) favorit di daerahnya. Namun, Neni gagal. Ia tak lolos di sekolah tersebut. Mendengar kabar itu, guru Neni seakan tak percaya karena Neni merupakan siswi yang lumayan pintar. Dengan inisiatif sendiri sang guru menghadap ke sekolah itu. Saat mengisahkan itu, mata Neni kembali berkaca-kaca.

"Dengan keinginannya sendiri menghadap ke sekolah itu. (gurunya bertanya ke sekolah, red) kenapa saya tidak diterima," ucap Neni.

"Luar biasa, *kan*? Makanya terkadang kalau kita melihat guru yang dulu itu memang luar biasa, betul-betul, apa ya, dekat sama siswanya, betul-betul ingin memperjuangkan," lanjut Neni dengan air mata di pipi.

(II)

KISAH menggugah juga dialami Siti Alawiyah, salah seorang guru SMPN 1 Tanjung Selor. Ia kerap kali mendapat suntikan semangat dari pernyataan Jarwoko. Satu kalimat yang berkesan bagi Siti adalah, "Guru itu harus bahagia," ujarnya.

Mendengar perkataan itu, Siti sadar. Perlahan ia mulai belajar untuk membuang masalah apa pun yang membuat emosinya tak stabil sebelum masuk kelas. Sebab, ia menilai kebahagiaan guru membuat suasana pembelajaran menyenangkan.

"Kalau bahagia itu *kan* biasanya menular Pak, menular," kata Siti.

"Ketika guru bahagia, pembelajaran akan mudah ditangkap oleh siswa," imbuhnya.

Selain memotivasi untuk selalu bahagia, hampir di setiap perjumpaan, Jarwoko tak lelah mewanti-wanti para guru untuk tak lelah *tholabul 'ilmi*. Pernyataan Kepala BPMP Kaltara itu, kata Siti, masuk akal.

"Karena *kan* belajar itu kan sampai ke liang lahat, seperti itu, nggak ada berhentinya," jelasnya.

Siti menilai, masukan, saran, dan motivasi Jarwoko itu tak lain bertujuan untuk menyadarkan para guru untuk menjadi teladan bagi siswa. Pernyataan itu tampak dalam petikan kalimat lain yang acapkali Siti dengar, "Guruku inspirasiku," tegas Siti.

(III)

PERHATIAN dan kepedulian Jarwoko terhadap dunia pendidian tak lepas dari kisah hidupnya. Keberhasilan Jarwoko saat ini juga karena inspirasi dari guru-gurunya.

"Sampai sekarang yang menyebabkan saya bisa berjuang dalam kesulitan itu karena inspirasi guru saya," ucap Jarwoko di kantornya.

Paidi dan Solekhan adalah guru yang menginspirasi Jarwoko. Mereka adalah guru Jarwoko di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Ngawi. Dua guru itu yang menanamkan nilai-nilai luhur yang masih terus Jarwoko pegang.

Jarwoko lahir dan besar di sebuah desa di Kabupaten Ngawi. Ia dibesarkan dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Namun, di suatu apel pagi sekolah, pernyataan Paidi membuat Jarwoko tak patah arang.

"Nak, jangan kau gunakan kemiskinan itu sebagai alasan (baca; malas) untuk meraih sukses. Jangan kamu gunakan sebagai alasan untuk menghambat kalian untuk sukses."

Jarwoko mencontohkan.

"Kenapa kamu gak kuliah?"

"Aku nggak punya uang."

"Jangan kau gunakan alasan kemiskinan itu menghambat kesuksesan kalian. Justru (baca; karena) kalian itu miskin, maka kemiskinan itu harus menjadi pemacu, penempa kamu untuk sukses," kata Jarwoko menirukan pernyataan Paidi.

"Justru kamu miskin kamu harus sukses. Supaya nggak miskin lagi," imbuh Jarwoko dengan tegas dan setengah berteriak. Pernyataan Paidi tak sekadar motivasi belaka. Paidi pun memberi solusi.

"Lalu bagaimana caranya? Lipatgandakan usahamu. Kamu sama orang kaya itu jaraknya udah 5 kilo di depan kamu. Kalau kamu melakukan hal yang

Satu kalimat yang berkesan bagi Siti adalah, "Guru itu harus bahagia."

sama seperti yang dia lakukan, selamanya kamu nggak akan pernah bisa melewatinya," kata Jarwoko.

"Melipatgandakan usaha itu maksudnya apa? Dia tidur, kamu belajar. Dia bermain, kamu kerja. Kurangi kesenangan. Kurangi kesenangan itu namanya prihatin. Prihatin itulah cara orang miskin untuk bisa melewati kesuksesan itu," cerita Jarwoko.

"Itu *tak* ingat-ingat terus," tegas Jarwoko.

Sementara Solekhan adalah sosok guru yang juga menginspirasi Jarwoko. Ia ingat sang guru itu menyatakan nilai-nilai luhur tentang kebahagiaan dan penderitaan.

"Nak, jatah hidupmu itu sudah ditentukan bahagia dan derita. Kalau kamu ambil bahagianya dulu, kamu tinggal deritanya. Tapi kalau sekarang kamu ambil deritanya, kamu akan menikmati bahagia. Jadi, jangan hura-hura, prihatin, ambil kesusahannya. Itu ambil sekarang," kenang Jarwoko terhadap nasehat gurunya.

Tak hanya satu, Jarwoko mengantongi dua pesan dari Solekhan. Pesan yang kedua adalah tentang memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya.

"Kalau kamu dapat kesempatan melakukan sesuatu, lakukan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan. Siapa tahu kelebihan dari kebaikanmu itu nanti akan menjadi kebaikan yang sangat berarti dalam hidup kamu."

Dua pesan itu menyadarkan Jarwoko tentang makna kesempatan. Pesan itu terus terngiang di benak Jarwoko.

(IV)

PAHIT-MANIS kehidupan Jarwoko di masa silam menjadi pegangan hingga kini. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, guru, dan murid menjadi salah satu bentuknya. Bahkan, ia menyediakan diri sebagai narasumber gratis untuk sekolah.

"Saya lupa itu sudah berapa kali. Kadang untuk kepala sekolah, kadang juga untuk guru-guru," ungkap Eko Purdianto, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Selor, Bulungan. Eko mengamini intensitas Jarwoko turun ke elemen paling dasar dalam kebijakan merdeka belajar, yakni Sekolah. Kata Eko, di setiap lembaga pendidikan itu, Jarwoko menjelaskan tentang perubahan kurikulum.

Ada dua inspirator yang membentuk Jarwoko, yaitu Guru Solekhan dan Guru Paidi.

"Penyampaiannya tak kaku," kata Eko yang diamini guru-guru seperti Neni dan Siti, yang waktu itu berkumpul di ruangan guru SMPN 1 Tanjung Selor.

Di setiap momentum, Jarwoko tak pernah luput untuk berbagi pengalaman dan memberi motivasi kepada guru. Jarwoko seakan meniru sikap dari dua guru yang menginspirasinya, yaitu Paidi dan Solekhan.

"Jujur saja kalau Pak Jarwoko yang menyampaikan ya senang semua. Karena memang beliau itu bisa mendudukkan kita sebagai seorang guru yang sebenarnya," imbuh Eko.

Eko menyadari bahwa sebagai kepala sekolah, ia kerap melihat guru-guru tak sabar dan kadang terjebak dengan pola lama. Namun, Jarwoko berhasil mengenengahkan persoalan dengan melihat realita murid-murid. Pendekatan yang dikemudian hari disebut *emphetize* itu cukup manjur.

Suatu waktu SMPN 1 Tanjung Selor pernah mengundang Jarwoko untuk menyampaikan IKM kepada wali murid. Pernyataan Jarwoko yang Eko ingat adaah tentang tugas orang tua. Kegiatan itu bertema *parenting*.

Forum yang dihadiri sekitar 100 wali murid itu bertujuan untuk memberi pemahaman bahwa tanggung jawab pendidikan anak bukan sekadar tugas guru. "Bahkan, itu tugas utama orang tua," tegas Eko mengulang pernyataan Jarwoko.

Eko melihat perubahan dari para orang tua. Mereka mulai membangun keakraban dengan para guru yang mendidik anak-anaknya. Para orang tua itu juga terlihat kian dekat dengan sang anak.

"Ada perubahan signifikan," kata Eko.

Kepedulian Jarwoko itu juga diamini oleh Suparmin Seto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Ia menilai Jarwoko memantik kesadaran para guru dengan memberikan pemahaman. Suparmin melihat cara Jarwoko menyampaikan materi di hadapan *audience* tak melulu motivasi.

"Bagusnya Pak Jarwoko lebih fokus kepada konten-konten prinsip, model proses-proses pembelajaran," ungkap Suparmin saat ditemui di kantornya.

Suparmin menuturkan, Jarwoko kerap menganjurkan untuk memahami kondisi siswa, kondisi orang tua, kondisi sosial masyarakat. Salah satunya melalui

pembelajaran berdiferensiasi dan cara menyikapi anak pada pagi hari mengingat anak-anak yang datang ke sekolah memliki kondisi mental yang berbeda.

"Guru harus bisa menyeterilkan kondisi anak sebelum menerima pembelajaran. Pak Jarwoko bisa menjelaskan itu. Dan itu kan bekal yang harus dimiliki oleh guru. Mungkin kalau orang yang tidak punya ilmu seperti itu, *nggak* akan mungkin bisa masuk pada substansi. Jadi linier sekali lah," jelas Suparmin, lagi.

Testimoni yang disampaikan Eko dan Suparmin itu ditanggapi Jarwoko dengan seulas senyuman. Ia sadar sedari awal bahwa empati adalah modal pertama kala berhubungan dengan orang lain. Ia berusaha mengubah mindset para guru dan wali murid untuk mulai memahami murid dan anak terlebih dahulu. Sebab, murid yang pintar, kata Jarwoko, adalah murid yang mengerti cara mengajar gurunya. Guru yang pintar adalah guru yang mengerti cara belajar muridnya. Kepala sekolah yang pintar adalah kepala sekolah yang mengerti cara kerja anak buahnya. Anak buah yang pintar adalah anak buah yang mengerti gaya kepemimpinan kepalanya.

"Kesimpulan itu saya sampaikan ke teman-teman guru," jelas Jarwoko.

Upaya Jarwoko mengawal kebijakan merdeka belajar hingga elemen paling dasar bukan tanpa sebab. Ia ingin memastikan bahwa murid-murid merasakan dampak nyata. Sebab, Jarwoko menilai bahwa tujuan anak-anak belajar itu memecahkan masalah.

"Kalau anak-anak terbiasa memecahkan masalah, dia *nggak* perlu hafalan," ucapnya.

(V)

"BERDOSA kita selama ini tidak memanusiakan anak." Pernyataan itu disampaikan Eko. Komunikasi dari hati ke hati yang digunakan Jarwoko itu mendapatkan tempat di hati para guru. Nuansa adem kerap mereka alami.

Siti mengakui hal yang sama. Ucapan Jarwoko tentang guru itu harus bahagia menjadi pegangannya. Tiga orang itu memiliki kesimpulan yang sama. Semua motivasi Jarwoko bermuara kepada keikhlasan.

"Guru itu harus ikhlas, ya. Anak-anak ini kalau *toh* dia membuat kesal ke kita, itu bukan karena kesalahan dia, tapi kesalahan-kesalahan orang dewasa. Barangkali kita sebagai guru juga ikut andil hingga dia menjadi begitu," kata Eko menirukan perkataan Jarwoko.

Itu sebabnya, Eko menyadari bahwa memanusiakan murid adalah kunci. Ia meyakini jika ikhlas menjadi energi, maka kebaikan-kebaikan akan datang.

Eko Purdianto,
Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Selor, Bulungan.

"Dia (Jarwoko, red) banyak menyampaikan tentang makna hidup, ikhlas, dan sabar, serta menjadi sejatinya guru termasuk juga menjadi pembahagia kepada siapa saja. Tidak hanya bahagia untuk diri kita, melainkan juga mampu membahagiakan orang lain," terang Eko.

Saat dimintai tanggapan tentang rasa tergerak dan tergugah para guru, Jarwoko lagi-lagi tersenyum.

"Alhamdulillah kalau begitu," kata Jarwoko.

Padahal Jarwoko mengaku tak ada niatan apa-apa. Motivasi yang ia sampaikan berangkat dari harapannya agar guru-guru cinta pada anak-anak. Ia juga memastikan bahwa motivasi itu mendorong para guru untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan.

"Ya dengan sumber keikhlasan dan belas kasih *gitu*. Guru harus mencintai. Kalau *ngga* bisa mencintai, ya *mesakke*, belas kasih *gitu* aja sumbernya. Itu aja, jangan materi."

Sebab kata Jarwoko, pendidikan itu mestinya bukan hanya otak, melainkan juga hati. *

KURIKULUM MERDEKA JADIKAN BELAJAR TAMBAH MENYENANGKAN

Dua siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, merasakan manfaat Kurikulum Merdeka Belajar (KMB). Padahal, sekolah mereka belum mengimplementasikannya secara total.

DI RUANG kelas bercat hijau itu siswa-siswi Kelas VII A SMP Negeri 1 Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, tampak mendengarkan penjelasan guru. Hari itu mereka sedang belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dengan seragam putih dongker dan rompi kotak-kotak biru muda, sesekali mereka mengacungkan jari melempar tanya.

Farel Maulana Thoriq, salah seorang siswa, menuturkan bahwa saat ini situasi pembelajaran lebih asyik. Berbeda saat ia masih di bangku SD, ketika itu suasana kelas cenderung monoton dan kaku. Kini kesannya berubah sejak menginjak bangku SMP.

Farel menikmati metode pembelajaran yang interaktif. Ia menuturkan metode belajarnya pun tak melulu di kelas. Tak jarang, guru mengajak siswa-siswi untuk praktik ke luar kelas mempelajari lingkungan sekitar.

"Kalau sekarang bisa belajar lewat lingkungan, belajar secara langsung. Realitas," ungkap Farel.

Teman sekelas Farel, Benedicta Kenes Kirana Putri, mengangguk setuju. Ia menambahkan bahwa dengan Kurikulum Merdeka, belajar lebih menyenangkan. Siswa yang akrab disapa Kenes ini menyontohkan.

"Misalnya, kalau pelajaran IPA, kita bisa jalan-jalan di sekitar sekolah ini untuk mencari sesuatu, seperti ikan atau yang lain-lain," ujarnya.

Kenes menuturkan bahwa ia tidak begitu suka dengan metode pembelajaran ceramah.

"Kurang masuk di otak," kata dia sembari tertawa.

"Kalau jalan-jalan, praktik, itu oke."

Suasana belajar mengajar di salah satu kelas SMPN 1 Tanjung Selor.

Kenes menilai bahwa keseruan-keseruan lain di kelas adalah membuat proyek. Proyek yang dimaksud adalah tugas kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas yang sama dengan materi yang berbeda. Misalnya mata pelajaran IPA dengan materi pencemaran. Para siswa akan dibentuk kelompok dengan 6 - 7 siswa.

"Yang dibuat adalah *power point*. Nanti presentasi. Untuk presentasinya ganti-gantian. Itu belajar berkelompok. Belajar bareng-bareng. Buat PPT-nya juga bareng-bareng," kata dia.

Saat proyek tersebut, kelompok Kenes mendapat materi tentang pencemaran udara. Sedangkan Farel kebagian materi tentang pencemaran air. Mereka membuat *slide-slide power point*.

Di samping itu, proyek setiap kelompok tak melulu membuat power point dan presentasi, mereka juga membuat miniatur. Farel menyontohkan, miniatur sel. Dengan menggunakan bahan gabus, mereka membuat miniatur tersebut.

"Untuk mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan secara real," ujar Farel.

Kenes pun menambahkan proyek lainnya adalah lab *book*. Ia menjelaskan, para siswa diminta untuk membaca literatur tentang mata pelajaran, misalnya IPA dengan materi ekosistem dan rantai makanan.

Dari literasi itu, mereka menjelaskan dan membuat infografis. Farel dan Kenes menyebutkan bahwa metode pembelajaran itu sangat menyenangkan. "Bahagia dengan metode belajar seperti itu," kata Kenes.

Bahkan, Kenes mengungkapkan, mereka tak hanya sekadar belajar mata pelajaran. "Jadi di kelompok itu juga belajar soal gotong royong, kerjasama, dan belajar bersama," kata Kenes.

Farel menyebutkan bahwa konsep belajar bersama itu memang menyenangkan. Bila ada teman satu kelompok tidak paham, ada yang bantu menjelaskan. Namun teman-teman satu kelompok itu memiliki sifat bermacam-macam. "Tapi kadang ada teman yang melawan ketika dikasih tahu. Nggak suka kalau kita menjelaskan," tuturnya.

Farel berharap, metode pembelajaran dengan praktik dan eksplorasi lingkungan sekolah itu semakin dipertahankan dan dikembangkan karena menyenangkan dan membuatnya semangat belajar. Kenes menyontohkan, misal berkeliling di lingkungan sekolah untuk memperhatikan secara langsung ekosistem tumbuhan.

"Jadi betul-betul melihat komponen-komponen ekosistem. Kami melihat langsung dengan panduan dari guru," terang Kenes.

Eko Purdianto, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Selor mengakui bahwa Kurikulum Merdeka membuat peserta didik lebih aktif dan lebih dinamis. Di samping itu, Eko menyampaikan bahwa metode pembelajaran per kelompok itu membuat siswa-siswi mendapatkan banyak ilmu.

Eko menyontohkan saat materi tentang penjelasan wilayah Kalimantan Utara. Masing-masing kelompok diminta untuk menjelaskan profil dan potensi-potensi kabupaten di provinsi bersemboyan Banuanta itu.

"Misal, kelompok satu menceritakan profil Tarakan hasil dari kerja sama kelompoknya. Kelompok dua menceritakan profil Nunukan. Kelompok tiga bercerita tentang Tanah Tidung. Ini pengetahuan luar biasa buat anak-anak. Ini semua ter*eksplor*," kata Eko menerangkan.

"Kalau mengajar dengan sumber pengetahuan dari guru saja bisa berbulan-bulan hanya materi itu. Tapi dengan anak-anak, gotong royong, itu mereka bisa, dalam satu kali tatap muka itu anak-anak bisa memperoleh pengetahuan yang luas sekali," imbuh Eko.

Dengan strategi itu, Eko menilai siswa-siswi memiliki peran masing-masing. Misal dalam membuat *project*, bahkan ada peserta didik yang perannya tukang tempel. Melihat kondisi pembelajaran itu, ia menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka sangat menyentuh langsung kepada anak-anak dan menggali potensi anak-anak agar berani mengeluarkan kemampuan dan potensinya.

Hanya saja Eko mengaku bahwa SMPN 1 Tanjung Selor memang belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara total. Ia menegaskan akan menerapkan di tahun ajaran baru.

"Ya kurikulumnya masih 2013, tetapi pola-polanya, nuansa-nuansanya kami adopsi dari IKM, begitu," ungkap Eko.

Testimoni di atas menjadi angin segar bagi Jarwoko, Kepala BPMP Kalimantan Utara. Ia ingin sekolah menjadi tempat yang damai, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Jarwoko juga kerap mewanti-wanti guru bahwa pembelajaran di kelas mesti menyenangkan.

"Itu yang saya harapkan dan rindukan betul. Di sekolah anaknya bahagia, terus dia punya keberanian presentasi, dia bisa bercerita panjang. Bahkan, dia bisa mengaitkan satu masalah dengan masalah lain, saling menghubungkan. Wah itu menurut saya luar biasa," tegas Jarwoko.

Pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur itu melihat harapannya itu merupakan tujuan akhir dari tujuan pendidikan. Sebab, bagi Jarwoko peningkatan literasi dan data-data lain hanyalah sebatas angka.

"Anaknya *nggak* berani *ngomong*, itu gagal menurut saya. Anaknya *nggak* bisa menyelesaikan soal cerita yang ada di masyarakat *gitu*," terang Jarwoko.

Itu sebabnya, Jarwoko acapkali mengajarkan kepada para guru cara mengajar yang baik. Bagi Jarwoko mengajar itu menyesuaikan dengan ujian yang hendak dihadapi para siswa.

"Mau menguji kemampuan anak soal apa? Berarti itulah yang harus diajarkan. Tapi sebelum mengajar harus menyampaikan dulu apa yang mau diujikan. Jadi *nggak* bertele-tele, *nggak* repot, tetapi gurunya harus sabar, ya," ujar Jarwoko.

Di sisi lain, Jarwoko cukup sering memotivasi para guru di Kalimantan Utara untuk lebih banyak mencintai anak-anak. Guru-guru lebih membuat pembelajaran itu penuh kasih sayang dan cinta kasih gitu.

"Dengan sumber keikhlasan dan belas kasih, guru harus mencintai. Kalau *nggak* bisa mencintai, ya *mesakke*. Belas kasihan sumbernya. Itu *aja*. Jangan materi," tutup Jarwoko*

"Dengan sumber keikhlasan dan belas kasih,
guru harus mencinta. Kalau ngga bisa mencintai,
ya mesakke. Belas kasihan sumbernya.
Itu aja. Jangan materi."

MENGAWAL TRANSFORMASI DENGAN EMPATI

Kesediaan Muslihuddin berempati, seperti menjadi pendengar yang baik terhadap curahan hati pegawainya, mempermudah dirinya melakukan transformasi organisasi di BPMP Aceh.

(I)

STRES adalah satu kata yang keluar dari bibir Muslihuddin tatkala ditanya tentang kesannya pertama kali menjadi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh tahun 2019. Pasalnya, ketika memasuki kantor yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan Km 12,5, Kabupaten Aceh Besar, ia dihadapkan dengan situasi yang kurang nyaman.

“Pegawainya belum solid, sebagian masih memetingkan pribadi dan kelompok sehingga terkotak-kotak. Ya, begitulah. Belum satu kesatuan,” ujarnya, 24 Februari 2023 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta.

Keadaan itu semakin tak nyaman tatkala Muslihuddin menjumpai kondisi kantor yang cenderung sepi. Setelah diselidiki, ternyata para pegawainya lebih betah berada di kedai kopi. Melihat kondisi itu, ia sedih. Akan tetapi ia mencoba untuk tidak menghakimi. Ia memilih melakukan *emphatize*, yaitu mengenal lebih dalam para pegawainya dan memahami keinginan, kebutuhan, dan tujuan mereka.

“Saya sedih ketika itu. Saya meraih *emphatize*. Ada apa ini? Walaupun saya belum mengikuti LDP waktu itu. Ya, natural. Saya sedih ketika itu. Kemudian, saya berpikir bagaimana merasakan ini? Akhirnya betul, kita merasakan kesedihan itu ketika masuk ke suasana batinnya. Apa yang sebetulnya dibutuhkan dan diinginkan?” kenang Muslihuddin.

Selanjunya, Muslihuddin mencoba mendekati para pegawainya. Bergabung ke tempat mereka biasa berkumpul, berbincang dan lebih banyak mendengar suara hati pegawainya. Ia berusaha mencari tahu kebutuhan para pegawainya.

Apel pagi pertama
Muslihuddin di BPMP Provinsi Aceh.

Setelah dirasa cukup, Muslihuddin meminta Kasi dan Kasubag di BPMP Aceh untuk mengumpulkan seluruh pegawai.

"Saya mohon kita berkumpul. Karena saya baru, saya ingin tahu. Saya ingin masukan-masukan," kata Muslihuddin.

Dalam forum itu, satu persatu masukan dan saran dari pegawainya bermunculan. Ia pun mulai menganalisis kebutuhan dan alasan para pegawainya yang lebih betah di kedai kopi dibandingkan di kantor. Bahkan, ada yang berkata tak punya kursi dan meja untuk bekerja.

"Saya tidak punya kursi dan meja sehingga tidak masuk kantor," kata Muslihuddin menirukan ungkapan pegawainya.

Setelah diselidiki, ternyata pegawai yang tidak memiliki kursi dan meja itu ada ketidakharmonisan dengan bawahan Muslihuddin lainnya. Melihat kondisi itu, Muslihuddin segera menengahi dan memediasi hubungan antarpegawai serta menyediakan kursi dan meja yang dibutuhkan.

Tahap berikutnya, Muslihuddn mencoba menggeser kebiasaan ngopi para pegawainya dari luar kontor ke dalam kantor. Ia menyulap kantin yang ada di kantor menjadi nyaman untuk menikmati secangkir kopi agar pegawainya lebih betah di dalam kantor.

"Kita berusaha mengadakan kopi melalui koperasi di kantor. Saya tarik itu. Agak lumayan. Ngopi di kantor aja," kata Muslihuddin.

Upaya tersebut berhasil mengubah kondisi lembaga yang dinahkodai Muslihuddin menjadi lebih hidup dan dinamis. Namun demikian, ternyata masih ada pegawai yang hubungannya belum harmonis dengan pegawai lainya.

"Masih ada yang belum harmonis dan enggan masuk kantor," ujarnya.

Pegawai itu, menurut beberapa pegawai lainnya, juga kurang harmonis dengan kepala sebelumnya. Mendengar hal ini, Muslihuddin tak langsung percaya. Ia berinisiatif mengunjungi rumah pegawainya tersebut. Bahkan, ia berinisiatif salat berjamaah di masjid dekat rumahnya.

"Nah di situ saya salat bareng. Setelah itu, saya ajak *ngopi* ke kedai kopi terdekat," kata Muslihuddin.

Dari pertemuan tersebut, Muslihuddin memperoleh gambaran bahwa meski pegawainya itu berperawakan kecil, tapi memiliki karakter yang keras. Melihat hal itu, Muslihuddin berinisiatif untuk berbicara dari hati ke hati.

"Saya ajak ngobrol karena orang Aceh keras. Diajak keras patah. Ke orang Aceh hadapi dengan kelembutan, itu Insya Allah," ujar Muslihuddin.

"Bang, apa sebetulnya yang diharapkan abang?" tanya Muslihuddin dengan nada pelan kepada pegawainya tersebut.

"Hanya satu, pak, sebetulnya. Pengakuan dari kepala, (selama ini, red) saya tidak diakui," kata Muslihuddin menirukan jawaban pegawai tersebut. "Kemudian, saya belum pernah tugas ke daerah-daerah, saya di*pending* selama 2 tahun. Saya punya anak," tambahnya.

Selama perbincangan, Muslihuddin mencoba menjadi pendengar yang baik. Ia makin prihatin tatkala mengetahui bahwa istri pegawainya tersebut sedang sakit.

"Pengakuan, pengakuan dari kepala sebelumnya. Itu yang ia butuhkan," kata Muslihuddin menyimpulkan.

Setelah mengetahui akar permasalahan yang mendera pegawainya itu, Muslihuddin mengajaknya untuk masuk kantor lagi. Ia jamin, pegawainya dapat pengakuan sebagaimana pengakuannya kepada para pegawai lainnya.

Singkat cerita, pegawainya tersebut mulai berubah sikap. Ia memperaiki komunikasi dan hubungannya dengan para pegawai lainnya. Ia mulai rajin masuk kantor. Bahkan, ia aktif menjadi peserta Upacara Bendera Merah Putih yang digelar saban Senin pagi.

"Bahkan mau baca Pancasila. Padahal dulu, ia *nggak* pernah," kata Muslihuddin lega.

(II)

SELAIN aktif melakukan transformasi organisasi, terutama yang berkaitan dengan SDM, Muslihuddin juga memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Hal ini terlihat saat pelaksanaan tradisi keagamaan bernama "*meugang*".

Meugang adalah ungkapan syukur masyakarat Aceh kepada Dzat Yang Maha Welas Asih saban menyambut Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang diiringi dengan penyembelihan hewan kerbau, sapi, kambing, dan lainnya dalam jumlah yang banyak. Kemudian, daging-dagingnya dimasak dan dinikmati bersama keluarga, kerabat, yatim piatu, dan seluruh masyarakat Aceh.

Di Aceh, tradisi *meugang* sudah dilaksanakn sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sejak masa Kerajaan Aceh. Kala itu (1607 - 1636 M), Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya.

"Jadi di sana itu, *meugang* itu wajib," kata Muslihuddin.

Ketika mengetahui status hukum tradisi *meugang*, dan menyadari fakta sosial masayarakat Aceh bahwa bila ada orang yang tidak dapat menyelenggarakan *meugang* berarti orang miskin, Muslihuddin segera menengok kondisi pegawainya. Ia kuatir ada pegawainya yang tak mampu menyelenggarakan *meugang*.

"Makanya saya kan mikir, ya Allah gimana cara bantu? *Bikin* program yang bisa membantu mereka, tapi tidak menyalahi aturan," ujar Muslihuddin.

Setelah membaca aneka program yang ada beserta peraturannya, akhirnya Muslihuddin menemukan sebuah cara yang dapat mendukung perekonomian pegawainya.

"Salah satunya kegiatan *monev*, ini tidak menyalahi aturan, *kan gitu*. Kita ada kegiatan *monev* ke daerah, dan mereka dilibatkan, tetap dengan proporsi dan sesuai dengan aturan yang ada. Dia mendapat rezeki dari situ dan pulangnya bisa beli daging, *gitu*. Itu strategi saya," katanya sambil tersenyum.

Atas kebijakan Muslihuddin tersebut, para pegawainya merasa senang dan bahagia. Karena saban tahun, mereka dapat menyelenggarakan *meugang*.

Bahkan, atas rizki yang didapat, para pegawai juga dapat menyelenggarakan tradisi maulid, yaitu perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Aceh, perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW diselenggarakan selama 3 bulan berturut-turut, yaitu Bulan Rabiul Awal (disebut *Meulod Awal*), Rabiul Akhir (*Meulod Teungoh*) dan Jumadil Awal (*Maulod Akhe*).

Saban memasuki bulan Rabiul Awal, kehidupan sosial keagamaan masyarakat Aceh terlihat sangat meriah. Biasanya mereka menggelar kenduri besar dengan mengundang anak yatim dan kerabatnya.

"Maulid itu berlangsung tiga bulan. Lama di sana dan makanannya…. Wuuihhh," ujar Muslihuddin tertawa, terkenang kelezatan masakan orang Aceh.

(III)

TAHUN 2022, LPMP bertransformasi menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP).

Selain perubahan nama, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat ini juga berubah. Dulu penjaminan mutu dilaksanakan kepada satuan pendidikan. Sekarang kepada Pemda. Selain perubahan nama, tugas dan fungsi, struktur organisasinya juga berubah.

"Yes. Kita di Aceh sudah ada transformasi dan sudah ada semua di semua lini Pokja," kata Muslihuddin.

Capacity building yang dilakukan Muslihuddin berhasil mempererat keakraban antar pegawai dan pimpinan di BPMP Provinsi Aceh.

Menurut Muslihuddin, saat ini BPMP Aceh sudah memiliki 4 kelompok kerja. Pokja 01 berhubungan dengan PSP, transisi PAUD ke SD, dan PMO. Pokja 02 Kemitraan Daerah dan IKM. Pokja 03 PBD dan AN, dan Pokja 04 Tata Kelola. Selain itu, Muslihuddin juga sering membagikan materi-materi pelatihan yang diselenggarakan Unit Utama Kemendikbudristek tentang Leadership Development Program (LDP), kepada para pegawainya.

Namun, penjelasan tentang materi LDP kepada pegawainya ia rasa kurang optimal. Akhirnya Muslihuddin berinisiatif mengundang pemateri utama LDP, yaitu *Coach* Pramudianto ke BPMP Aceh.

"Semua Pokja sudah kami latih dengan mendatangkan *Coach* Pram, kemudian melatih bagaimana *emphatize*. Jadi program yang kemarin kita rombak," ujar Muslihuddin.

Muslihuddin menjelaskan, ia sengaja menghadirkan *Coach* Pram untuk melatih para pegawainya dalam kepemimpinan. Ada wawasan baru seputar *Desain Thingking* dan motivasi untuk para pegawainya agar lebih bersemangat menjalankan tugas dan fungsi BPMP mengadvokasi KMB kepada Pemda.

Selain pegawai BPMP Aceh, peserta pelatihan juga berasal dari BGP, pengawas, dan kepala sekolah.

Selang beberapa waktu pasca pelatihan, Muslihuddin menilai ada perubahan signifikan pada SDM di lembaganya. Mereka mendapat pusparagam wawasan, di antaranya adalah *emphatize* dan *define*. Dalam *emphatize* para pegawainya belajar memahami dan merasakan kesedihan serta kebutuhan di lapangan, mulai dari Pemda (Pemda) hingga *end user,* yakni murid, sedangkan *define* adalah *problem statement*.

"Luar biasa. Sangat-sangat ada perubahan," ujar Muslihuddin bangga.

"Oh, program ini harus sesuai dengan kebutuhan dan kita merasa prihatin gitu," ujar Muslihuddin menirukan respon pegawai BPMP.

"Oh iya, ya. Saya prihatin dengan itu, saya harus bantu," imbuhnya menirukan testimoni yang lain.

Staf dan pegawai BPMP Aceh pun lambat laun mulai seirama dengan Muslihuddin. Bahkan, kini iklim bekerja di BPMP Aceh telah berubah, para pegawainya tidak pernah menunda pekerjaan.

"Jadi dia saya kirimi tugas hari ini, langsung dia bekerja. Penyusunan tim yang hebat di LDP itu adalah bagaimana seorang Kepala Satker bukan pintar sendiri, tapi bagaimana menggerakkan dan memberdayakan tim. Kita *udah* punya tim," jelas Muslihuddin.

(IV)

EMPATI dan keuletan Muslihuddin dalam melakukan transformasi organisasi membuahkan hasil yang menggembirakan. Aneka masalah yang sebelumnya terkesan seperti benang kusut kini mulai terurai.

Menurut Muslihuddin, SDM dan sistem organisasi di BPMP Aceh sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Para pegawainya makin aktif dan kreatif. Acapkali ide program dan kegiatan lahir dari staf-stafnya.

"(Transformasi, red) Sudah jalan, InsyaAllah," kata Muslihuddin. "Siapa pun yang masuk (pengganti, red), InsyaAllah. Saya sudah siapkan sistem dan tim-timnya," imbuhnya.

Selain itu, saat ini, BPMP Aceh sering memperoleh surat permohonan menjadi narasumber.

"Sekarang BPMP Aceh kehabisan narasumber," kata Muslihuddin.

"Serius, Mas. Cek silahkan. Widyaprada kita laku. Jadi, ketika ada kegiatan kepala sekolah, apa pun, BPMP Aceh itu kebanjiran, serius sampai tahun ini," tambahnya.

Melihat transformasi tersebut, Muslihuddin mengaku senang. Karena para pegawainya nampak bersemangat dalam menjalankan tugas. Ia tak lagi

Foto bersama
Muslihuddin bersama para pegawai BPMP Provinsi Aceh.

menemukan pegawai yang aktivitasnya hanya di kedai ngopi mulai pagi hingga menjelang pulang kantor. Ia juga tak pernah lagi menemukan perselisihan antarpegawai. Semua pegawainya bekerja secara harmonis penuh semangat gotong royong sesuai nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Kini, tranformasi dalam tubuh BPMP telah tercipta. Muslihuddin telah menelurkan kader-kader penggerak perubahan. Kesadaran mereka akan signifikansi program sesuai kebutuhan tak hanya sebatas konsep. Materi-materi yang disampaikan *Coach* Pramudianto pun mampu membuat Muslihuddin dan pegawai BPMP Aceh lebih percaya diri dalam mengeksekusi program-program advokasi KMB.

Suatu ketika, ia pernah bercanda ingin pindah tugas ke provinsi lainnya. Mendengar hal itu, spontan para pegawainya kebingungan.

"Duh, pak, penggantinya siapa?" Ujar Muslihuddin, menirukan ucapan pegawainya.

Muslihuddin sendiri telah bertugas selama 5 tahun di BPMP Aceh. Sementara istri dan putera-puterinya ada di Jawa Barat.

"Iya. Saya kan udah 5 tahun, Mas. Udah ada… mulai ya, ada titik jenuh, *burnout*. Harus ada tantangan-tantangan baru. Itu mungkin," sambungnya, setengah berharap.*

KOPI DAN MASJID DALAM ADVOKASI DI SERAMBI MAKKAH

Perjuangan Muslihuddin mengadvokasi KMB kepada Pemda di daerah yang dikenal sebagai Serambi Makkah berjalan lancar seiring pemahamannya terhadap tradisi orang Aceh yang gemar berdiskusi di kedai sambil menikmati secangkir kopi dan beribadah salat lima waktu secara berjamaah di Masjid.

(I)

JUM'AT malam 3 Maret 2023, sekira pukul 20.59 WIB, Muslihuddin, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh (BPMP Aceh), bercerita tentang kisah transformasi lembaga yang ia nakhodai dan tugas advokasi Kebijakan Merdeka Belajar yang diembannya.

Berkaos hitam dengan tulisan Merdeka Belajar warna merah putih, dan bertempat di Hotel Mercure Batavia Jakarta, Muslihuddin bercerita bahwa pada tahun 2019, saat pertama kali ia menginjakkan kaki di Provinsi Aceh, ia dihadapkan kenyataan yang kurang nyaman.

Pertama, lembaga yang ia pimpin, waktu itu masih bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), sedang kurang stabil. Hubungan antarpegawai kurang harmonis. Kedua, sebagian pegawainya betah berkumpul di kedai-kedai kopi sehingga kantor tidak ramai. Sebagian juga ada yang enggan masuk kantor. Ketiga, Pemda kurang responsif terhadap LPMP. "Waktu itu, LPMP kurang direspon oleh Pemda," ujar Muslihuddin.

Kondisi itu membuat Muslihuddin bermuhasabah. Di tengah proses koreksi diri itu, ia ingat kenalannya, yaitu dua kepala dinas pendidikan. Pertama, Silahuddin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, dan kedua, Syaiful Rasyid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya. Kepada mereka, Muslihuddin mencoba untuk lebih memahami hubungan antara LPMP dan seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi di Aceh. Ia ingin memperoleh informasi seutuhnya.

Muslihuddin saat mempresentasikan paparannya pada LDP I.

"Ya awal-awal, di tahun pertama itu, saya selalu aktif mendengar, *active listen*. Saya mendengar apa kebutuhan kabupaten/kota?" ujar Muslihuddin.

Dari silaturahim itu, Muslihuddin memperoleh sambutan positif.

"Pak Mus beda ini gayanya," ujar Muslihuddin menirukan ucapan dua kepala dinas pendidikan tersebut. "Orang Aceh itu tidak mau dengan bahasa tinggi. Orang Aceh itu tidak mau didahului karena dia *nggak* pernah dijajah."

Informasi dari dua kepala dinas pendidikan tersebut, menggugah kesadaran Muslihuddin. Akhirnya, ia tergerak untuk bersilaturahmi ke seluruh Pemda di daerah yang dikenal dengan sebutan Serambi Makkah tersebut.

"Saya akhirnya berpikir, 'oh kalau begitu saya sowan.' Akhirnya saya *door to door*. Saya *roadshow*," tegas Muslihuddin.

(II)

JADWAL silaturahim ke seluruh Pemda telah disusun. Namun, Muslihuddin masih merasa ada yang kurang. Ia merasa ada bekal yang harus dia peroleh dan ia bawa sepanjang perjalanan silaturahim ke dinas pendidikan dan kepala daerah seluruh kabupaten/kota di Aceh. Singkat cerita, ia berkunjung ke salah satu tokoh agama di Aceh. Namanya Teungku Zulkarnaen yang merupakan salah satu murid dari Teungku Daud Beureu'eh.

"Jadi guru saya sekarang, seorang teungku," ujar Muslihuddin.

Dari tokoh agama yang kemudian akrab disapa Chik Zul itu, Muslihuddin memperoleh informasi bahwa di Aceh, permasalahan akan tuntas dengan dua cara, yaitu kedai kopi dan masjid.

"Jadi betul, yang namanya *Emphatize*—salah satu strategi Idea—itu adalah bagaimana pendekatan asimetris dilakukan dengan tokoh, keluarlah (saran dan nasihat, *red*). Oh ini, orang Aceh itu ke masjid. Dia tidak takut dengan pedang, takutnya hanya dengan asma Allah," tambah Muslihuddin. "Dan betah ngobrol di kedai kopi."

Dua nasihat dari sang guru itu ia genggam erat-erat, dan secara terukur ia praktikkan saat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di Aceh. Termasuk kepada para pegawainya. (baca artikel berjudul Mengawal Transformasi dengan Empati).

Oh ini, orang Aceh itu ke masjid. Dia tidak takut dengan pedang, takutnya hanya dengan asma Allah."

(III)

BERBEKAL informasi dari dua kepala dinas pendidikan dan nasihat dari sang guru, Muslihuddin memulai perjalanan silaturahimnya ke seluruh Pemda di Serambi Makkah. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, sebagian besar telah ia kunjungi. "Dari awal kepemimpinan, saya sudah mendatangi 21 kabupaten/kota," kata Muslihuddin.

Salah satu advokasi KMB yang pernah dilakukan Muslihuddin dengan menggunakan media kedai kopi adalah saat ia menemukan miskomunikasi antarbidang di dinas pendidikan dan/atau antardinas di Pemda.

Muslihuddin mendedahkan, saat itu awal-awal Program Sekolah Penggerak (PSP), dan ia menemukan perbedaan sudut pandang antara dinas pendidikan dan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda). Mau tak mau, ia berusaha menengahi mereka dan melakukan mediasi antardua instansi tersebut.

Mediasi yang dilakukan Muslihuddin tidak di kantor, tapi di kedai kopi. Di situ ia menerapkan pendekatan konsultatif asimetris sesuai tradisi lokatif Aceh.

Tak butuh waktu lama, akhirnya Muslihuddin berhasil menemukan titik temu yang membuat kedua instansi itu bersepakat mendukung PSP.

Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Aceh Utara, Azwardi, menyukai pendekatan yang dilakukan Muslihuddin. Menurutnya strategi advokasi yang dilakukan Muslihuddin tidak kaku dan kerap menggunakan strategi yang dinamis, yakni mengkombinasikan pendekatan formal dan informal.

Azwardi bercerita bahwa obrolan-obrolan serius dapat terbangun secara lebih rileks sambil menghirup aroma kopi Aceh yang terkenal nikmat dan menyesapnya secara perlahan dari cangkir berbahan keramik. "Kalau kami *nggak* ke tempat beliau, beliau ke tempat kami. Kita *ngobrol-ngobrol* informal," kata Azwardi.

Sementara untuk masjid, tambah Azwardi, itu memang tradisi orang Aceh, yang saban tiba waktu salat wajib atau fardhu, bersama-sama pergi ke masjid untuk salat berjamaah. "Nah, usai salat berjamaah dan sebagainya, *nggak* langsung keluar dari masjid. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Itu kan informal," tambahnya.

Meski kerap melakukan pendekatan informal bersama Muslihuddin, Azwardi menegaskan, substansi perbincangan tak pernah dinomorduakan. Kata dia, yang disampaikan dalam persamuhan/pertemuan informal itu tersampaikan secara utuh.

Sementara untuk pendekatan formal, Azwardi menuturkan, Pemda Aceh Utara kerap menjadikan Muslihuddin sebagai pemateri dalam sebuah acara. Demikian juga sebaliknya, BPMP Aceh mengundang Pemda Aceh dalam acara-acara formal seperti sosialisasi hingga pelatihan.

"Itu kan formal, itu tersampaikan utuh. Artinya, itu dua-duanya didapat. metode-metode beliau itu sangat efektif. Itu kan seni menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan hubungan kekerabatan antara beliau dan jajarannya dengan Pemkab Aceh Utara," tegas Azwardi, yang waktu itu didampingi Jamaluddin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara.

Selain kedai kopi dan masjid, Muslihuddin juga melakukan advokasi KMB melalui pendekatan berbasiskan kearifan lokal bernama *Duek Pakat*, yaitu tradisi kebersamaan khas *ureueng* Aceh, yang tidak jauh berbeda dengan model musyawarah masyarakat nusantara lainnya. Hanya saja ada kekhasan tersendiri dari *Duek Pakat*. Sebab saban pelaksanaannya, ada berbagai pantun ala *ureueng* Aceh yang terkadang menjadi jawaban atas masalah yang sedang dibahas.

Ide nama dan konsep kegiatan *Duek Pakat* itu didapat Muslihuddin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, Yusmadie.

"Gimana, Bang, bahasa gotong royong Aceh apa, ya?" tanya Muslihuddin suatu ketika di kedai kopi.

"Duek pakat, Pak Mus," jawab Yusmadie.

(IV)

ATAS jerih payah membangun hubungan baik dengan Pemda itu, secara perlahan, Muslihuddin mulai memperoleh pengakuan dan sambutan baik dari Pemda Aceh untuk berker jasama di bidang pendidikan.

"Alhamdulillah pengakuan, sertifikat, kerja sama, dan narasumber pun ambil dari kita semua. Artinya apa? karena (mereka, *red*) melihat bahwa kita serius," ujar Muslihuddin, dengan mimik serius.

Bahkan suatu ketika, ada salah satu bupati yang merasa penasaran dengan sosok Muslihuddin. Pengalaman ini, nampaknya terpatri dengan kuat dalam ingatannya.

Mulanya ada pesan dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya bahwa bupatinya ingin berdiskusi dengan Muslihuddin. Sang bupati menitipkan pesan untuk Muslihuddin, "coba kepala BPMP yang katanya bukan orang Aceh itu berani ke sini nggak?"

Mendapat tantangan itu, Muslihuddin langsung menyanggupinya. Meski ia sadar bahwa Bupati Aceh Barat Daya merupakan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sementara akses menuju rumah bupati pun bukan perkara mudah. Jaraknya dari kantor BPMP Aceh sekitar 250 km. Ia mesti melewati hutan, yang konon dihuni aneka hewan buas seperti ular dan harimau. Namun, ia berusaha mengedepankan *positive thinking*.

"Pak Mus, siap *nggak* ke gunung?"

"Siap. Saya siap datang," jawab Muslihuddin seketika.

"Saya berani, karena ada Allah. Saya berangkat. Perjalanan ke Aceh Barat Daya itu 9 jam dari Kota Banda Aceh," jelas Muslihuddin.

Selain itu, keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang ia nakhodai, menjadi semangat Muslihuddin menyanggupi tantangan tersebut. Ia berangkat ditemani sopir dan satpam.

Setiba di rumah Bupati, Muslihuddin sempat kaget. Sang Bupati hanya mengenakan kaos oblong, celana pendek, dan menenteng cangkul. Sangat berbeda dari pakaian bupati lainnya.

"Mana Kepala BPMP?"

"Saya," jawab Muslihuddin.

"Bisa nyangkul?"

"Bisa."

"Saya pun ambil cangkul dan nyangkul bareng dia di situ," kenang Muslihuddin. Melihat sikap Muslihuddin, Bupati Aceh Barat Daya itu tersenyum. Seusai mencangkul bersama, mereka menyantap sajian yang disediakan, sekaligus menikmati secangkir kopi hitam.

Advokasi informal di warung kopi bersama pemangku kepentingan di Provinsi Aceh.

Di sela-sela menikmati aroma kopi, bupati memanggil kepala dinas pendidikan, dan mengatakan, "Ini yang bagus," kata Muslihuddin menirukan ucapan bupati.

Sebulan usai *persamuhan* itu, Muslihuddin kembali diminta untuk mengunjungi rumah Bupati Aceh Barat Daya. Di pendopo bupati, mereka kembali menikmati secangkir kopi hitam dan berbincang banyak hal, salah satunya pendidikan.

Obrolan di pendopo Bupati Aceh Barat Daya itu mematahkan ekspektasi Muslihuddin. Ia berkesimpulan bahwa orang-orang GAM itu memiliki mimpi yang sama dengannya, yakni ingin meningkatkan mutu pendidikan.

"Asalkan kita bisa menjelaskan," ungkap Muslihuddin.

Keberanian Muslihuddin masuk ke wilayah yang dulunya sempat dilanda konflik itu tidak ujug-ujug. Ia telah memikirkan strategi.

Muslihuddin mengaku bahwa strategi mendekati para pemangku kepentingan di Aceh lebih banyak dilakukan melalui pendekatan individu. Ia rela turun ke akar rumput, minum kopi, salat berjamaah di masjid, tanpa tedeng aling-aling. Bahkan, ia tak sungkan untuk melepas jabatannya dan datang sebagai Muslihuddin. Bukan kepala BPMP. Ia datang sebagai orang Bandung.

"Jadi *nggak* dianggap sombong. Kadang-kadang saya tidak *ngomong* bahwa saya kepala BPMP, *enggak*. Nama saya Muslih aja, saya orang Bandung. Saya datang silaturahmi. Saya ingin memajukan pendidikan Aceh. Bagaimana nih kakak? Bagaimana nih Bang? Mohon masukan," ujar Muslihuddin.

Gayung bersambut. Respon mereka luar biasa. Mereka menerima Muslihuddin dengan lapang dada.

"Yang pertama, kita silaturahim. Kedua, bahasa. Jadi, bahasa kita merendah aja," terang Muslihuddin.

Di sisi lain, irisan-irisan historis antara Aceh dan Jawa Barat, tempat Muslihuddin lahir dan dibesarkan, kian menjadi pelengkap langkah

Kiri: Advokasi formal bersama pemangku kepentingan di Provinsi Aceh.

Kiri: Advokasi informal bersama pemangku kepentingan di Provinsi Aceh.

Muslihuddin mendekati para pemangku kepentingan di Aceh. Ia menegaskan bahwa pertautan sejarah itu menjadi salah satu alasan penerimaan mereka.

Di samping itu, Muslihuddin mengisahkan bahwa orang-orang mantan GAM itu dapat menerima kehadirannya karena makam Cut Nyak Dien berada di Sumedang.

"Saya angkat. Itu kunci," ujar Muslihuddin.

"Wah Pak Mus ini pahlawan," kenangnya menirukan ucapan Bupati Aceh Barat Daya.

"Di situlah saya coba masuk. Dari *history* itu saya cerita kepada para bupati/walikota," imbuh Muslihuddin.

Tak hanya itu, Muslihuddin bahkan memanggil pemimpin daerah bukan dengan panggilan formal, seperti pak, tetapi abang. Bagi Muslihuddin, cara itu manjur. Bahkan, beberapa bupati dan walikota kaget karena panggilan itu tak biasa. "Maaf pak bupati saya izin panggil abang," kata Muslihuddin.

"Wih, belum pernah nih langsung *ngomong* abang. Senang saya," ujar Muslihuddin menirukan respon bupati.

"Itulah sentuhan," imbuh Muslihuddin menegaskan.

Muslihuddin menambahkan, kalau orang Aceh sudah mengenal kita dan memahami kita, maka komunikasi dan koordinasi akan lebih mudah.

"Lebih hebat bila mereka sampai mau kerja sama. Itu yang bikin saya senang itu, Pemdanya sebagian besar itu *support*," kata Muslihuddin.

Komunikasi dan koordinasi itu makin mudah saat ia berhasil membangun kedekatan dengan mantan orang GAM, yang ternyata memiliki mimpi yang serupa terhadap kemajuan pendidikan.

"Bahkan dia mengeluarkan duit. Kan (dana, red) Aceh banyak. Ada yang namanya Otsus. Dananya gede," ungkapnya.

(V)

JUMAT pagi 31 Maret 2023, bertempat di gedung Komplek Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Muslihuddin dilantik menjadi Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, ia tak lagi menjadi Kepala BPMP Aceh. Ia harus pindah ke sisi timur Aceh, yaitu Sumatera Barat.

Kepergian Muslihuddin dari Aceh meninggalkan jejak-jejak pengabdian yang mengesankan. Azwardi dan Jamaluddin adalah dua orang di antaranya. Mereka merasa kehilangan. Kedekatan dan ketelatenan Muslihuddin dengan Pemda di Provinsi Aceh menjadi alasan Jamaluddin cukup bersedih hati.

"Merasa kehilangan ketika beliau dipindah ke Padang," kata Jamaluddin.

"Kami bilang ke Pak Mus, 'jangan tinggalkan kami. Boleh pindah orangnya, tapi ide dan gagasannya tetap tinggal di sini. Tetap bimbing dan dampingi kami. Kita bisa *by phone*," timpal Azwardi mengulang pernyataannya ke Muslihuddin.

Jamaluddin menambahkan, *sense of belonging* dan kepedulian Muslihuddin terhadap pendidikan di Aceh tak bisa dianggap sepele.

"Bahkan beliau meminta kami berkunjung ke Sumatera Barat. Beliau menunggu kita," ungkap Jamaluddin.*

Muslihuddin dilantik sebagai Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat.

GOTONG ROYONG
MAJUKAN PENDIDIKAN ACEH

Pelbagai manfaat Kebijakan Merdeka Belajar telah dirasakan banyak pihak. Namun, itu bukan keringat satu orang. Muslihuddin mengerjakannya secara gotong royong.

(I)

PAGI itu, lima perempuan dengan pakaian adat Aceh menampilkan sebuah pertunjukan. Alunan sarunai kian membuat syahdu pementasan. Kostum kuning emas yang mereka kenakan menjadi kombinasi yang nyaman dipandang. Gerakan koreografi dengan kompak mereka pamerkan.

Perpaduan musik dan tarian yang mereka tampikan menghadirkan sebuah keindahan khas khazanah nusantara. Keindahan gerak para penampil menunjukkan keselarasan yang indah tak tepermanai.

Penampilan itu bukan di sebuah acara adat. Pada 25 Oktober 2022 lalu, kelompok tari khas Aceh itu membuka agenda, Duek Pakat 1 Rapat Kerja Daerah dan Sinkronisasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Forum tersebut diinisiasi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh. Kegiatan yang bertempat di salah satu hotel di Banda Aceh itu menghadirkan perwakilan Pemda 20 kabupaten/kota.

Bupati/Walikota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, turut menghadiri kegiatan Duek Pakat 1 tersebut. Forum tersebut merupakan kegiatan kolaborasi yang pertama kali digelar bersama seluruh *stake holder* pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Aceh.

Duek Pakat adalah tradisi kebersamaan khas *ureueng* Aceh. Sebuah tradisi yang tidak jauh berbeda dengan model musyawarah yang dilakukan masyarakat nusantara lainnya.

Hanya saja ada kekhasan tersendiri dari duek pakat. Sebab saban pelaksanaan duek pakat ada berbagai pantun ala *ureueng* Aceh yang terkadang menjadi jawaban atas masalah yang sedang dibahas.

Muslihuddin senantiasa mengedepankan pendekatan budaya saat melakukan advokasi kebijakan Merdeka Belajar.

Muslihuddin, Kepala BPMP Aceh menilai kegiatan tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan pembangunan pendidikan serta transformasi pendidikan dan Implementasi Program Merdeka Belajar.

Di samping itu, Muslihuddin menuturkan, dalam Duek Pakat 1 itu juga ada penandatangan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan instansi terkait tentang program-program skala prioritas, seperti Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Rapor Pendidikan, dan Perencanaan Berbasis Data.

"Dan jangan aneh, kabupaten/kota sudah keluar Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota," tegas Muslihuddin.

(II)

DUKUNGAN dan keberpihakan Pemda di Provinsi Aceh bukan sekadar pepesan kosong. Segendang sepenabuhan dengan Muslihuddin, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Aceh Utara, Azwardi, menyampaikan bahwa penandatanganan itu merupakan sebuah bentuk dukungan Pemda terkait Kurikulum Merdeka. Di samping itu, Azwardi menegaskan bahwa komitmen itu bukan hanya di atas kertas.

"Alhamdulillah untuk Kabupaten Aceh Utara kami sangat mendukung terkait dengan program Implementasi Kurikulum Merdeka, Guru Penggerak melalui anggaran APBD," tegas Azwardi.

Kata Azwardi, anggaran di Kabupaten Aceh Utara untuk Program Sekolah Penggerak separuh dari anggaran yang digelontorkan dari pemerintah pusat.

Jika ditotal, Azwardi menegaskan, "Bisa sampai 200 juta lebih untuk satu sekolah."

Di samping dari APBD, gelontoran dana untuk mendukung Kurikulum Merdeka, Pemda Aceh Utara juga memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dana Otsus ini semua implementasinya ke kurikulum merdeka tadi, ke sekolah penggerak, ke guru penggerak. Semua orientasinya ke situ. Baik dana dari APBD murni atau dana otsus itu," ungkap Azwardi. Ia menyebut jalinan komitmen itu juga terajut dengan jajaran pendidikan wabil khusus kepala sekolah.

Azwardi dengan tegas menyebutkan bahwa ia tidak akan melakukan mutasi dan rotasi dalam kurun waktu empat tahun. "Sehingga mereka lebih fokus untuk implementasi kurikulum merdeka," ungkap Azwardi.

Hanya saja, Muslihuddin tak menampik ada beberapa kabupaten/kota yang belum memanfaatkan APBD sebagai upaya dukungan terhadap KMB. Namun, ia menekankan bahwa penggunaan anggaran daerah tidak menjadi prioritas.

"Yang penting dia mengadopsi bagaimana program-program PSP itu dilanjutkan oleh Pemda, tetapi bukan duit," terang Muslihuddin.

"Bukan berarti dia harus *ngeluarin* duit. Bisa jadi tidak berduit. Tetapi ada kebijakan *kan* gitu, Mas," imbuhnya menegaskan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Jamaluddin mengungkapkan, sebanyak 31 sekolah bergabung di Program Sekolah Penggerak Angkatan ke-3 dan terbanyak di Provinsi Aceh. Di samping itu, untuk tahun ajaran 2023/2024, sebanyak 969 sekolah di Aceh Utara akan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

"Itu sebagai upaya nyata dari Pemda untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Utara," kata Jamaluddin.

Di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 219 orang guru telah menyelesaikan pendidikan guru penggerak yang akan disusul kembali dengan 263 orang guru yang masih dalam program pendidikan Guru Penggerak. Seluruh sekolah dari jenjang PAUD, SD, dan SMP di Aceh Utara juga sudah mendapatkan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar.

"...dan Program Indonesia Pintar merupakan upaya strategis dari Pemda Aceh Utara membangkitkan pendidikan di Nanggroe Pasee tercinta ini."

"Maka dengan akumulasi Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Guru Penggerak di Aceh Utara dan Program Indonesia Pintar merupakan upaya strategis dari Pemda Aceh Utara membangkitkan pendidikan di Nanggroe Pasee tercinta ini," ujarnya. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Aceh Utara mendapatkan penghargaan sebagai Pemda Transformatif Tingkat Kabupaten/Kota Non 3T dalam Anugerah Merdeka Belajar 2023.

Keberhasilan itu menjadi buah manis perjuangan Muslihuddin. Jamaluddin mendedahkan, pendampingan yang dilakukan Muslihuddin itu tak hanya dilakukan kepada dinas, melainkan juga kepada sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru. Bahkan, Jamaluddin menyebutkan bahwa Muslihuddin telah menganggap insan-insan pendidikan itu sebagai keluarga.

"Itu sangat luar biasa. Kita didampingi terus melalui luring, daring. Dengan guru-guru beliau itu terus mendampingi, memotivasi, bahkan juga mengundang ke BPMP Aceh dalam bentuk bimtek," kata Jamaluddin.

(III)

PENDAMPINGAN dan ketelatenan Muslihuddin membawa angin segar bagi pendidikan di Aceh. Keberadaan KMB, menjadi oase di tanah Bumi Serambi Mekkah. Jamaluddin menuturkan penyempurnaan kurikulum itu merupakan konsepsi dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Utara.

"Jadi dengan ada Program Guru Penggerak, program IKM, dan program PSP ini kami seakan-akan merasa tergerak. Itu dirasakan saat ini oleh ekosistem pendidikan di Aceh Utara itu. Kita merasa juga bukan hanya di Aceh Utara, di Aceh juga terasa. Artinya Aceh, ini *kan* baru bangun dari tidur panjang, konflik berkepanjangan tambah pandemi lagi," terang Jamaluddin.

Kondisi itu membuat Pemda Aceh Utara tidak membuang kesempatan itu. Seluruh jajaran *stakeholder* di Aceh utara sangat mendukung. Bahkan sebelumnya, guru-guru di Aceh Utara, kata Jamaluddin, enggan untuk ikut Program Guru Penggerak. Namun, berkat dorongan yang dilakukan Pemda, mereka merasa malu bila tak lulus Program Guru Penggerak.

"Karena bukan hanya untuk tindak lanjut Permendikbud Nomor 40 bahwa ini bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kepala sekolah. Tidak seperti itu. Tapi bagian dari meningkatkan kompetensi diri dan daya saing. Karena intinya pengembangan mutu pendidikan itu berada di gurunya," tegas Jamaluddin.

Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Aceh Utara, Azwardi menambahkan bahwa bukti positif Kurikulum Merdeka itu pola pikir guru yang berubah. Kata dia, guru

mulai sadar bahwa dirinya merupakan motor penggerak dan agen perubahan di sekolah.

Sikap guru itu juga berdampak baik pada wali murid. Para guru belajar untuk membangun komunikasi yang baik dengan wali murid demi perkembangan dan kebaikan murid.

"Ini sangat dirasakan. Oleh sebab itu, kita sangat bersyukur dengan banyaknya guru penggerak di Aceh Utara. Mereka itu menjadi agen-agen perubahan di pendidikan tentang mengedukasi bagaimana memberitahukan kepada orang tua, bagaimana mendidik anak, membentuk karakter anak. Itu menjadi model dari pendidikan kita yang melalui guru penggerak yang ada di Aceh Utara," jelas Azwardi.

Para murid pun menikmati buah manis Kurikulum Merdeka. Secara data, perubahan itu terlihat di rapor pendidikan. Ada kenaikan numerasi, literasi, dan pembinaan karakter ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Lebih-lebih dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Jamaluddin menuturkan bahwa di Aceh Utara P5 tidak hanya diarahkan ke produk, tetapi juga ke pembinaan karakter.

"Nah jadi pada saat ada project P5, itu lebih kita arahkan kepada pembinaan karakter. Lebih-lebih kan di tingkat SD di tingkat TK pembinaan karakter sejak dini. Itu yang dirasakan sekali oleh masyarakat," jelas Jamaluddin.

Jamaluddin mengisahkan salah satu P5 yang digagas di Aceh Utara tentang kesadaran lingkungan. Para siswa mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan guru pendamping menerangkan dan mengajari siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari sampah-sampah itu, mereka akan membuat produk.

"Jadi yang kita tonjolkan bukan juga sebagai produknya saja, tapi tadi buang sampah lah pada tempatnya. Karakternya. Itu kan bagian dari pembinaan karakter," ujarnya.

Bahkan, Jamaluddin menambahkan, para orang tua turut menjadi guru di rumah masing-masing. Para siswa itu, belum boleh mandi dan bersiap ke sekolah sebelum membantu orang tua bebersih lingkungan sekitar dan membuang sampah.

"Serasa belum sah dia mau berangkat sekolah kalau belum bantu orang tua," kata Jamaluddin. "Itu testimoni dari orang tua. Itu dirasakan oleh orang tua, wali murid. Kalau kita tanya itu dari mana? Dari guru penggerak. Seperti itu. Jadi semua ini sebuah mata rantai yang saling punya pengaruh," imbuhnya.

Bagi Jamaluddin, P5 memiliki ketersinambungan dengan *education sustanaible development* (ESD). Dari pembinaan karakter yang menjadi fokus

Azwardi,
Penjabat (Pj)
Bupati Kabupaten
Aceh Utara.

utama, kemudian lahir produk. Ia menilai konsep yang dijalani hari ini tak lain untuk membekali generasi penerus untuk berkompeten di dunia nyata. Dari itulah, ia berharap anak-anak itu mampu bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

"Artinya untuk apa memang kalau memang dulu kan indikatornya selesai. Punya ijazah. Nanti kerja di mana itu kan tergantung ijazahnya. Makanya di kurikulum merdeka ini jangan sampai ada pengangguran. Nah inilah yang namanya profil pelajar Pancasila," jelas Jamaluddin.

"Dengan profil pelajar pancasila ini. Dia bisa mandiri, dia bisa merubah lingkungannya," imbuhnya menegaskan.

(IV)

PELBAGAI keberhasilan itu bukan keringat Muslihuddin seorang. Ia percaya bahwa perubahan tak bisa digarap sendirian. Ia berkolaborasi dengan Pemda-Pemda di Provinsi Aceh. Selain Duek Pakat, Muslihuddin juga berkolaborasi dengan Pemda Aceh Utara dalam Festival Edukasi Aceh Utara.

Kegiatan tersebut berlangsung tiga hari, sejak Sabtu hingga Senin, pada Desember 2022 lalu. Ribuan pengunjung *tumplek blek*. Puluhan hingga ratusan *stan* berdiri menjajakan produk keunggulannya masing-masing. *Stan* itu merupakan wadah setiap sekolah memamerkan produk-produknya.

Jamaluddin,
Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Aceh Utara.

Azwardi menyebutkan bahwa Festival Edukasi itu adalah ide gagasan kolaboratif. Ia menyadari bahwa Pemda Aceh Utara tak mungkin sanggup menggarap kegiatan itu sendiri. Ia menggandeng pelbagai instansi pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Dukungan dari pihak-pihak di luar Pemda tentu tak bisa dianggap remeh.

"Dari Kementerian mendukung, dari BPMP mendukung, dari provinsi mendukung, plus dari Kabupaten semua kepala sekolah, guru penggerak hadir. Di situ semua memamerkan seluruh produk-produk hasil karya-karyanya," kata Azwardi.

"Itu kesan yang menurut saya sangat kami ingat. Kegiatan itu pertanda bahwa semua yang kita kerjakan beberapa bulan yang lalu ataupun tahun lalu itu bisa kita lihat hasilnya. Itu kesan yang sangat mendalam bagi kami," ungkapnya mengisahkan kesan bersinggungan dengan Muslihuddin.

Ide bermula dari obrolan-obrolan santai yang kemudian diseriusi. Lintas lembaga bahu-membahu menyiapkan. Muslihuddin dan BPMP Provinsi Aceh tak ketinggalan untuk mendampingi. Sebab, Azwardi menilai bahwa setiap sekolah di Aceh Utara memiliki potensi masing-masing yang *eman* jika tidak dikenalkan ke publik.

"Begitu besar potensi di setiap sekolah, anak-anak kita, para guru ya, ketika kita lihat waduh ini mungkin yang selama ini tidak di*explore*, hasil-hasil karya anak bangsa yang seperti itu. Akan tetapi ketika dilakukan pameran, orang pada *ngelihat* luar biasa ya banyak sekali produk-produk," ujar Azwardi.

Kegiatan pameran itu, kata Azwardi melanjutkan, membuat masyarakat tahu tentang potensi dan kondisi guru serta murid di Aceh Utara.

"Masyarakat jadi tahu, bahwa anak-anak kita itu cerdas. Guru-guru kita juga cerdas. Jadi, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten," imbuhnya. Ia menambahkan bahwa produk-produk itu nanti akan didaftarkan di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Aceh Utara. Inisiatif itu bukan tanpa alasan. Azwardi melihat bahwa karya-karya anak-anak Aceh Utara itu juga bisa bersaing.

"Mereka juga berkesempatan untuk memasarkan hasil produknya sendiri," ujarnya. Festival Edukasi itu menyimpan kesan mendalam bagi Azwardi dan Jamaluddin. Keseriusan Muslihuddin menggawangi BPMP Aceh menuai banyak hasil. Bahkan, Kurikulum Merdeka membuat Aceh Utara memiliki *tagline* anyar dalam pengembangan pendidikan, yakni Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan, Aceh Utara Jaya.

"Seandainya tiga program ini *nggak* ada, *nggak* mungkin ada *tagline* itu," terang Azwardi.

Keberadaan BPMP Aceh bagi Azwardi sangat membantu. Ia berharap kolaborasi terus terjalin dengan baik. Sebab, ia menilai bahwa mimpi memajukan pendidikan harus gotong-royong.

"Peran BPMP itu sangat besar sekali. Itu *kan* sebagai UPTnya Kemendikbud yang ada di daerah. Mereka itu sangat antusias dalam pergerakan ini," kata Jamaluddin.

"Ketika kita berkolaborasi membangun pendidikan khususnya pendidikan di Aceh Utara, saya pikir yang kami sampaikan tadi pasti pendidikan Aceh Utara akan berkualitas dan berkarakter," Azwardi menimpali penuh harap.*

"Peran BPMP itu sangat besar sekali. Itu kan sebagai UPTnya Kemendikbud yang ada di daerah. Mereka itu sangat antusias dalam pergerakan ini,"

“TRANSFORMASI YANG DILAKUKAN OLEH BBPMP/BPMP SEKARANG INI ADALAH PROSES MENJADI SALAH SATU AKTOR PENGGERAK MERDEKA BELAJAR!”

DR. MUHAMMAD HASBI DIREKTUR SEKOLAH DASAR

LIKA LIKU ADVOKASI DI BUMI LAMBUNG MANGKURAT

Perjalanan Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) yang dilaksanakan Yuli Haryanto di provinsi yang akrab disebut Bumi Lambung Mangkurat berjalan penuh tantangan. Ada saatnya ia melewati jalan yang terjal dan penuh kelokan dan ada pula yang lempeng mirip jalan tol.

(I)

BERKAOS hitam dengan tulisan belajar.id di bagian dada, Yuli Haryanto, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, bercerita dengan lugas kisah advokasi KMB yang selama ini ia jalani di Provinsi Kalimantan Selatan.

Saat itu, Kamis pagi, 2 Maret 2023, dan bertempat di Royal Padjajaran Suites, Bogor, ia menyatakan bahwa advokasi KMB yang dijalankannya tak semudah yang ia bayangkan. Apalagi dari sisi geografis, lokasi beberapa daerah di Kalimantan Selatan susah dijangkau.

Seperti diketahui, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 2 kota, yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru, serta 11 kabupaten, yaitu Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Balangan. Menurut Yuli, jarak antardaerah tidak seperti di Jawa. Lebih jauh dengan medan jalan yang beragam dan moda kendaraannya tidak hanya mobil dan motor, tetapi juga perahu.

“Pulau Sembilan, itu kami datang sendiri ke Pulau Sembilan,” ujar Yuli menunjuk nama salah satu pulau yang masuk wilayah Kabupaten Kotabaru.

“Kotabaru itu daerah terjauh di Kalsel. Perjalanan darat itu 10 jam. Lalu naik kapal 3 jam ke Kabupaten Kotabaru, di kotanya. Sementara untuk ke Pulau Sembilan, kami naik kapal lagi 6 jam, Mas,” lanjutnya.

Kala itu, Yuli datang ke Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan tandatangan Bupati terkait MoU Program Sekolah Penggerak (PSP). Mereka mengatur janji di malam hari saat pembukaan kejuaraan badminton. Namun, suasana di gedung

olah raga tidak memungkinkan untuk membahas agendanya. Yuli pun diajak ngobrol di angkringan sembari menikmati secangkir kopi.

"Kebetulan bupatinya suka suasana nonformal dan santai. Akhirnya malah kita ngobrol di tempat angkringan," kata Yuli.

Dalam perbincangan di angkringan itu, Yuli berhasil menyisipkan agenda advokasi KMB kepada Bupati Kotabaru.

"Tentunya didukung oleh kepala dinas yang sangat *support*," tambahnya.

Sementara itu, cerita menarik lainnya, Yuli jumpai saat mengadvokasi KMB kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Biasanya, kami pendekatan dengan kepala dinas. Kalau kepala dinasnya oke, minta ketemu Bupati, oke juga. Jalannya gitu, relatif lancar, tapi kalau gubernur, cukup berliku," ujar Yuli.

Yuli mengatakan, waktu itu, ia melaksanakan advokasi episode ketujuh KMB, yaitu Program Sekolah Penggerak (PSP), dan ditugaskan untuk memperoleh dukungan dan komitmen kepala daerah mulai dari gubernur sampai dengan bupati. Namun, mendekati orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata tak semudah melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

Ia telah mencoba pendekatan formal dan nonformal, namun, belum berhasil. Padahal, batas waktu untuk memperoleh tandatangan gubernur terkait PSP mendekati *deadline*. Ia hanya diberi waktu satu bulan.

Bagi Yuli itu merupakan *effort* yang cukup berat. Ia bingung. Pendekatan apalagi yang hendak ia pakai? Bahkan, ia pernah ikut rombongan gubernur menghadiri peresmian salah satu jembatan, namun juga belum berhasil.

Akhirnya Yuli bertemu temannya saat kuliah S2, yang memberi saran untuk menggandeng anggota DPRD yang memiliki kedekatan dengan gubernur. Singkat cerita, lahir ide untuk menggagas kegiatan webinar dengan tema Praktik Baik Pembelajaran pada Masa Adaptasi Baru.

"Pak, kita mau ada zoom, ada webinar. Apakah bapak berkenan (memberikan dukungan, red)," tanya Yuli pada anggota DPRD tersebut.

"Ya siap."

Kesediaan anggota DPRD tersebut merupakan angin segar bagi Yuli. Ia segera bergegas menyiapkan berbagai hal agar pelaksanaan webinar tersebut sukses. Bahkan, untuk menambah daya tarik webinar, ia mengundang Khairul Anwar, KBRI di Papua Nugini. Ia ingin mengetahui kondisi pendidikan antara di Indonesia dan di Papua Nugini pada masa Pandemi COVID-19.

"Kebetulan kenal. Jadi, yang di Papua Nugini seperti apa? Dan itu heboh! Artinya pihak DPRD senang dan puas dengan audiens yang hadir," ujar Yuli senang.

Kegiatan Webinar tersebut terselenggara pada tanggal 8 Oktober 2020 dan dihadiri nyaris 1.000 orang peserta.

"Zoom kami hanya berkapasitas seribu orang, itu *full*. Ditambah Youtube kita ada 700-an orang yang hadir waktu itu. Nah itu momentum yang luar biasa," ujar Yuli bangga

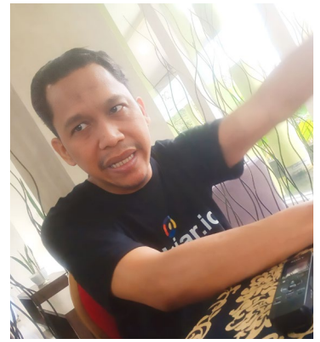

Yuli haryanto, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesuksesan tersebut, ia tindaklanjuti dengan agenda utama, yaitu advokasi KMB kepada Gubernur.

"Akhirnya, dari situlah kami *lobby*, kami datang, dan *nggak* sampai satu minggu, sudah keluar tandatangannya," pungkas Yuli, senang.

(II)

PERJALANAN advokasi KMB yang dilaksanakan Yuli tak semuanya berjalan terjal. Ada juga yang lempeng bagaikan jalan tol. Ini ia alami saat mengadvokasi KMB kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HST).

Di Kabupaten HST, Yuli menemukan kecocokan dengan para pemangku kepentingan, yang rerata masih muda-muda.

"Bupatinya *welcome* sekali," kata Yuli.

"Kepala dinasnya juga welcome. Bahkan, tahun ini mereka menggandeng kita memberikan apresiasi bagi sekolah, guru, dan sebagainya atas kinerja mereka," tambahnya.

Yuli melihat Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan HST menyukai diskusi dengan pendekatan data *analitycal*. Kebutuhan mereka ini segera dipenuhi dan ia sediakan.

"Kebetulan tipenya itu analytical. Mereka main data. Itu saya *bikinkan*. Kami punya buku kajian mutu pendidikan. Isinya itu SPM sama rapor pendidikan, kami gabung di situ. Targetnya apa, indikatornya apa, pekerjaan harus apa, targetnya apa, mereka saya *bikinkan* dalam satu buku. Kita paparkan," jelasnya.

Bertemu para pemangku kepentingan di Pemda HST, Yuli merasa beruntung. Karena Pemda HST memiliki kepedulian yang tinggi pada dunia pendidikan. Menurutnya, alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dunia pendidikan di HST mencapai 20 persen lebih. Bupatinya pun menyambut baik KMB.

"Mereka itu, pendampingan ke sekolah-sekolah, pendaftar IKM itu *all out*, dilatih, didampingi sama dinas. Perencanaan berbasis data, semua sekolah dilatih semuanya," dedah Yuli.

Pendapat Yuli tentang Pemda HST ditimpali Bupati Kabupaten HST, Aulia Octafiandi. Bagi Aulia, sambutan baiknya terhadap KMB itu karena kebijakan yang ditelurkan Mendikbudristek Nadiem Makarim sejalan dengan visi-misinya, yaitu fokus pada pembelajaran yang menyenangkan.

"Karena belajar itu menyenangkan, maka dia (siswa, red) akan belajar terus menerus. Nah, Itu sesuai dengan hakikat seorang manusia kalau kita belajar," jelas Aulia, yang waktu itu sedang makan siang di Abhayagiri - Venue and Dining, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia ditemani kepala dinas pendidikan HST.

"Biar kita *udah* tua gini, kalau belajar senang, *tetep* aja belajar. Istilahnya itu, seumur hidup belajar," imbuh Aulia.

Bupati muda yang baru berusia 38 tahun ini menerangkan bahwa konsep pembelajaran yang selama ini dianut masih berbasis pada konsep feodalisme, yaitu belajar untuk cari duit. Padahal, hakikat manusia belajar itu tak lain adalah agar bisa bermanfaat untuk manusia lainnya.

"Misal, saya belajar tentang IPA, itu tujuannya bukan bagaimana dapat nilai IPA tinggi, tapi saya belajar IPA itu bagaimana nanti saya melihat alam ini? Alasan mengapa alam ini bisa berjalan seperti ini? Nah, itu yang betul-betul selaras bagi saya," jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Anhar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST yang usianya belum mencapai 40 tahun mengaku bahwa ia banyak belajar kepada Yuli beserta jajarannya di BPMP Kalimantan Selatan. Ia menganggap kehadiran BPMP ibarat oase di Bumi Lambung Mangkurat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, **Muhammad Anhar**

Anhar mengaku, ia bukanlah orang dengan latar belakang pendidikan. Ia bukan lulusan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP). Ia juga bukan seorang guru. Sebelum menjabat sebagai kepala dinas, ia seorang camat.

"Di awal-awal saya bertugas itu saya sering berkunjung ke Pak Yuli. Diskusi dengan para pegawai di BPMP. Saya pribadi sangat terbuka. Jadi, apa pun yang kita diskusikan saya upayakan itu menjadi program dan kegiatan di tempat kami," cerita Anhar.

Anhar mengaku bahwa saban berdiskusi dengan Yuli, ia tak pernah merasa digurui. Bahkan tak ragu ia mengatakan, keberadaaan BPMP sangat membantunya dalam mengurus pendidikan di HST. Selain itu, BPMP seolah menyajikan cermin

Yuli Haryanto bersama Bupati HST, yaitu Aulia Oktaviandi.

untuk berefleksi karena data dan fakta yang ia dapatkan dari BPMP tak sekadar tentang angka, tapi juga analisa.

"Membantu kami juga untuk berefleksi. Apa yang harus kami lakukan dengan data yang tersedia ini," ujar Anhar. Keseriusan Anhar dalam dunia pendidikan di HST bukan tanpa alasan. Sebab, ia menyadari bahwa indikator makro dan mikro HST tidak terlalu bagus. Di tahun 2021, Anhar melihat rapor pendidikan untuk kategori pendidikan dan pelatihan (Diklat) itu berwarna merah.

Data itu ia verifikasi ke lapangan dan menemukan fakta bahwa masih banyak guru-guru yang sejak awal diangkat sampai menjelang pensiun itu tidak pernah mengikuti Diklat. Sementara itu, kata Anhar, KMB sudah meniadakan Diklat. Semua guru diminta untuk belajar secara mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM).

"Nah atas dasar rapor merah ini, *kan* gak mungkin kami kemudian cuma suruh-suruh saja untuk belajar di PMM itu, tanpa *mindset* mereka terbuka dulu terhadap transformasi pembelajaran ini," terang Anhar.

Di satu tahun pertama menjabat, Anhar mengungkapkan kepada para guru tentang situasi krisis. Ia menekankan kepada para guru bahwa keadaan yang tidak baik-baik saja itu memaksanya untuk melakukan perubahan.

"Perubahan cara berpikir yang kami tekankan," tegas Anhar.

Di tahun 2022 Kabupaten HST berinvestasi besar-besaran untuk mendiklatkan sekira 80 persen guru yang tidak pernah mengikuti diklat. Terlebih lagi dari 1.900 guru PNS di Kabupaten HST, yang berusia 50-60 tahun, berjumlah 70 persen.

Anhar menduga guru-guru itu tidak mengetahui berbagai perubahan yang terjadi, mulai dari IKM, PBD hingga digitalisasi sekolah. Itu sebabnya tujuan diklat itu bukan hanya pengetahuan, melainkan esensinya adalah mengubah mindset. Diklat adalah salah satu instrumen untuk mengubah cara pandang dan cara berpikir yang paling mendasar agar bisa segera beradaptasi.

Saat mengeksekusi kegiatan Diklat itu, Anhar meminta BPMP dan BGP Kalimantan Selatan untuk terlibat. Anhar juga mengaktifkan komunitas-komunitas belajar di setiap sekolah. Ia menilai bahwa wadah-wadah *sharing* pengetahuan dan saling belajar antarguru itu mampu menjadi cermin untuk refleksi dan terus belajar.

(III)

WAKTU telah menunjukkan pukul 07.45 WIB. Di Royal Padjajaran Suites, Bogor itu, tak terasa Yuli telah bercerita selama 53 menit lebih tentang suka duka menjalankan advokasi KMB di Provinsi Kalimantan Selatan. Pukul 08.00 WIB, ia harus segera bergegas masuk ruang kegiatan *Workshop* Penyusunan Model Peningkatan Kolaborasi Antar-UPT dan Pemda, yang diselenggarakan Direktorat PMPK. Di ujung wawancara itu, ia mengatakan bahwa perjalanan advokasi KMB yang tengah ia jalani masih kerap menghadapi tantangan berupa pergantian kepala dinas pendidikan.

"Kuncinya itu di kepala dinas. Sebagus apa pun kinerja bawahannya, tapi kalau kepala dinasnya *enggak* mendukung, itu agak susah," ucap Yuli.

Di sisi lain, pendekatan informal seperti di kedai kopi dan/atau lainnya ternyata menyisakan tantangan yang tak sepele karena jarang melibatkan para staf dinas pendidikan. Ketika kepala dinasnya diganti, Yuli harus memulai lagi dari awal untuk meyakinkan manfaat KMB kepada kepala dinas pendidikan yang baru.

Meski demikian, Yuli tak khawatir. Berbekal pelatihan LDP I, II, dan III yang telah ia jalani bersama para kepala BPMP dari 34 provinsi, ia yakin dapat mengatasi persoalan tersebut. Di sisi lain, Yuli selalu mengedepankan kebutuhan dinas pendidikan di daerah. Sebisa mungkin dan secara terukur, ia akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dinas pendidikan. Itu semua ia lakukan untuk memantik empati dan membangun kedekatan dengan kepala dinas yang baru.

"Dukungan dari kepala dinas ini yang penting. Jadi kami selalu mengawali advokasi KMB kepada pimpinannya dulu sebelum ke yang lain-lainnya. Kalau pimpinannya sudah ok, biasanya yang bawahnya, nanti teman-teman kami tinggal terjun," tutup Yuli.*

KESELARASAN VISI PERMUDAH ADVOKASI

Salah satu faktor yang mempermudah proses advokasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) adalah keselarasan visi Pemda dengan visi Kemendikbudristek.

(I)

SEULAS senyum mengembang di wajah Yuli Haryanto tatkala ia menyebut nama Hulu Sungai Tengah (HST), salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Menurutnya, kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.472 km^2 dan berpenduduk sebanyak 261.042 jiwa ini, termasuk Pemda yang mudah diajak berkolaborasi mengimplementasikan KMB.

"Bupatinya masih muda, juga kepala dinasnya. Mereka sangat *wellcome* terhadap KMB," tegas pria kelahiran Boyolali 1976 ini.

Siang itu, di Abhayagiri Venue and Dining, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuli sedang mendampingi Bupati HST beserta jajarannya, yang datang dari HST untuk menerima penghargaan dari Mendikbudristek di bidang pendidikan.

Yuli menambahkan, HST merupakan salah satu Pemda yang pertama kali menerbitkan peraturan bupati yang mendukung Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

"Alhamdulillah, sangat mudah proses advokasinya," tambah pria yang hampir 3 tahun mengabdikan dirinya di BPMP Kalimantan Selatan ini.

Pernyataann Yuli tersebut diamini Muhammad Anhar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST. Menurut pria yang belum genap 40 tahun ini, peraturan bupati tersebut merupakan dukungan riil Kabupaten HST terhadap Kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong peningkatan mutu pendidikan di HST.

"Kemudian, ada kerjasama dengan BGP tentang peningkatan potensi guru. Itu tahun 2021," jelas Anhar di tempat yang sama.

Foto bersama
Yuli Haryanto dengan para pemangku kepentingan Kabupaten HST.

Kesediaan menerima KMB dan semangat Pemda HST untuk memajukan pendidikan tergambar dari postur anggaran pendidikannya. Dalam tulisan berjudul Lika Liku Advokasi di Bumi Lambung Mangkurat, Yuli menyatakan bahwa alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dunia pendidikan di HST mencapai 20 persen lebih.

Postur anggaran pendidikan HST itu, akhirnya berbuah manis. Kabupaten yang terkenal dengan motto Murakata (akronim dari Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata) ini beberapa kali memperoleh penghargaan. Salah satunya datang dari BPMP Kalimantan Selatan untuk kategori Pemda yang memiliki Persentase Tertinggi Sekolah Pelaksana IKM Jalur Mandiri, Pemanfaatan Aplikasi PMM, dan Pemda yang Mengunduh Rekomendasi Rapor Pendidikan Terbanyak.

"Itu tahun 2022," kata Yuli.

Pada tahun 2023 ini, Kemendikbudristek memberikan Anugerah Merdeka Belajar kepada HST sebagai Pemda yang sukses dalam melakukan transformasi anggaran dan regulasi. HST dinilai sebagai Pemda yang berhasil meningkatkan SPM seiring alokasi APBD mereka di bidang pendidikan yang tinggi, dan telah menetapkan peraturan daerah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Menurut Yuli, penghargaan tersebut dapat diperoleh Pemda HST karena beberapa alasan. Salah satunya adalah keselarasan visi-misi Bupati HST dengan KMB.

(II)

SENIN siang, 29 Mei 2023, di Abhayagiri Venue and Dining, Aulia Octaviandi, Bupati HST, nampak sedang asyik bercengkerama dengan para pejabatnya, sambil menikmati makan siang. Baju hijau tua yang ia kenakan tak mampu mengubah parasnya yang masih muda. Maklum usianya masih 38 tahun.

Setelah cukup menikmati hidangan makan siang, ia bergeser ke salah satu meja yang agak lengang. Sambil membenarkan letak kacamatanya, ia bercerita tentang visi Pemda HST.

"Visi pertama kita itu adalah membangun Kabupaten HST yang lebih makmur, unggul, dan dinamis. Untuk mencapai kondisi tersebut, ada program kerja atau misi-misinya. Misi ketiga, mengembangkan sumber daya manusia dengan konsep memanusiakan manusia," ujar Aulia dengan mimik serius.

Menurut Aulia, filosofi memanusiakan manusia adalah bagaimana mengembalikan hakikat kemanusiaan manusia.

"Konsep Merdeka Belajar itu sejalan. Karena kami melihat, *output* Merdeka Belajar itu membuat pembelajaran lebih menyenangkan, (baca; sehingga) membuat para pelajar itu bisa belajar terus menerus. Karena belajar itu menyenangkan, dia akan belajar terus menerus," tegasnya.

Aulia tidak menginginkan konsep belajar yang berorientasi pekerjaan saja. Karena menurutnya, hal itu berakar dari feodalisme.

"Kita itu disuruh orang Belanda untuk belajar, supaya apa? Supaya jadi tukang suruhnya, supaya bisa menghitung, dan nanti yang kerja adalah orang Indonesia. Jadi tukang administrasinya. Konsep itu yang tertanam sampai sekarang. Intinya orang belajar untuk cari duit, untuk kerja," jelasnya sambil membenarkan letak kacamatanya.

"Padahal hakikat manusia belajar itu bagaimana agar dia dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Saya belajar tentang IPA, misalkan. Itu tujuannya bukan dapat nilai tinggi, tapi bagaimana saya nanti bisa membaca alam ini; mengapa alam ini bisa berjalan seperti ini? Itulah. Nah itu yang betul-betul selaras bagi saya, sesuai pendefinisian Mas Menteri tentang Kurikulum Merdeka," tambahnya.

Melalui Merdeka Belajar, Aulia ingin generasi di HST dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. "Kalau belajar itu senang dari awal, biar kita udah tua gini, *tetep aja* belajar. Sesuai hakikat kita, belajar itu bukan untuk dapat nilai, tapi belajar untuk kemanusiaan kita," katanya.

Melalui misi memanusiakan manusia itu, Aulia ingin agar masyarakat HST menjadi masyarakat yang makmur, unggul, dan dinamis. "Objeknya itu

masyarakat. Makanya poin misi ketiga itu membangun SDM-nya. Lewat mana? Lewat dinas pendidikan. Karena itu, kita bilang bagaimana agar bisa dikelola generasi-generasi penerus ini sehingga mereka berpotensi menjadi penerus kita yang lebih baik," tegasnya.

"Konsep Merdeka Belajar itu sejalan. Karena kami melihat, output Merdeka Belajar itu membuat pembelajaran lebih menyenangkan."

(III)

AULIA meletakkan kacamatanya. Lalu melanjutkan perbincangan tentang kunci penggerak pendidikan di satuan pendidikan.

Ia mengatakan bahwa pasca Pandemi COVID-19, wajah pendidikan di Indonesia sangat muram. *Learning loss* terjadi di mana-mana. Bahkan ada siswa yang lupa materi pelajaran yang pernah diiukutinya. Melihat kondisi ini, Aulia tegas menyatakan bahwa *prerequisite* utama untuk mengubah wajah pendidikan di Indonesia adalah guru. Karena itu, ia sepakat dengan episode ketujuh KMB tentang Program Sekolah Penggerak yang fokus meningkatkan hasil belajar siswa dengan diawali peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru.

Ia juga sependapat dengan episode kelima KMB tentang guru penggerak yang diprioritaskan dapat menjadi kepala sekolah. "Nah itu benar karena dia yang akan menjadi ujung tombaknya," tegasnya.

Ketertarikan Aulia yang lain pada kebijakan anyar ini adalah tentang *thought process* atau proses berfikir. Bagi Aulia, proses atau cara berfikir generasi bangsa sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Ia melihat cara berfikir ini pada Kebijakan Merdeka Belajar, yang melatih siswa untuk berpikir logis dan kritis. Pembelajarannya tidak seperti metode pembelajaran yang pernah ia jalani, yaitu hapalan.

Selain itu, ia juga takjub dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mendidik siswa untuk saling berempati, berbagi dan berkolaborasi sehingga tercipta gotong royong antarsiswa.

"Di daerah kami, muridnya cenderung menghafal, bukan belajar dan berpikir logis. Nah Merdeka Belajar ini jawaban dan solusi karena selaras dengan visi kami," tegas Aulia.

Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, **Aulia Octaviandi**

Setelah merasa cocok dengan Kebijakan Merdeka Belajar, Aulia segera menandatangani Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Dukungan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Mewujudkan Merdeka Belajar

Meski telah menerbitkan peraturan bupati, Aulia sadar bahwa manfaatnya tak bisa dipanen secara instan. Sebab membangun manusia tidak seperti membangun Candi Prambanan. Apalagi membentuk karakter manusia yang memliki cara berpikir logis, kritis, dan *problem solving*. Butuh waktu yang tidak sebentar.

"Ya mungkin saat saya udah nggak jadi bupati lagi, baru saya melihatnya," kata Aulia sembari tersenyum.

Mendengar visi misi sang bupati, Muhammad Anhar, Kepala Dinas HST segera bergerak cepat. Ia langsung melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen pendidikan, terutama BPMP Kalimantan Selatan yang dikomandani oleh Yuli Haryanto. Apalagi, saat ia mengetahui rapor pendidikan HST kurang menggembirakan, ia langsung mengunjungi Kantor BPMP Kalimantan Selatan untuk berkonsultasi dan sekaligus menggandeng tangan Yuli untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di HST.

"Pak Bupati melihat seluruh episode yang sudah diterbitkan, dan beliau memerintahkan kami untuk beradaptasi," terang Anhar.

(IV)

SALAH satu ikhtiar meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan Pemda HST secara besar-besaran adalah mendiklatkan sekira 80 persen guru-gurunya. Itu terjadi pada tahun 2022 dan di pertengahan tahun 2023 ini berbuah manis. Di antara indikatornya adalah jumlah sekolah pendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dari HST meroket tajam. Prosentasenya mencapai 96 persen. Angka ini membuat Kabupaten HST menduduki peringkat ketiga pendaftar IKM terbanyak se-Indonesia.

Kondisi serupa juga terjadi pada jumlah pendaftar guru penggerak. Mulanya, yang daftar hanya ada sembilan orang. Kemudian pada tahun tahun 2022, jumlahnya melonjak drastik menjadi 400 guru yang mendaftar sebagai guru penggerak. Antusiasme guru ini, Anhar tandai setelah upaya dinas pendidikan HST mendiklatkan guru-gurunya secara massal.

"Tujuan diklat kami bukan hanya pengetahuan sebenarnya, tapi esensinya itu mengubah *mindset* mereka," tegasnya.

Sementara itu, ketika ditanya tentang pendapat para guru tentang manfaat IKM, Anhar mengatakan bahwa para guru di HST memiliki kebiasaan baru yang sangat positif, yaitu kebiasaan para guru untuk melakukan refleksi.

Selain itu, perubahan *mindset* para guru juga berpengaruh pada capaian HST dalam PMM. Di awal ia menjabat sebagai kepala dinas pendidikan, HST menempati peringkat 11. "Lalu setelah kita adakan diklat itu, kita naik jadi dari peringkat 3 dan sampai sekarang kita di peringkat 1 untuk 4 kategori, yaitu login, nonton video, lulus *post test*, dan unggah aksi nyata," jelasnya.

Dampak positif juga Anhar lihat dari peserta didik yang tampak menikmati pembelajaran yang menyenangkan. Lebih-lebih kehadiran P5 berhasil menggelorakan semangat belajar para siswa, sekaligus mendidik mereka untuk bergotong royong menyelesaikan sebuah projek yang diberikan para gurunya.

"Karena memang aplikatif. Saya melihat bagi siswa ini sangat menarik dan menyenangkan bagi mereka. Kami mendorong agar setiap sekolah sudah mulai melaksanakan ini," kata Anhar, bangga.

(V)

MATAHARI mulai melingsir ke barat. Sekira pukul 14.30 WIB, terlihat ajudan Aulia berbisik mengingatkan sang bupati untuk bergegas menuju Candi Prambanan, lokasi pelaksanaan Anugerah Merdeka Belajar Tahun 2023. Pada acara yang diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) berkerja sama dengan lintas unit utama dan PDM 05 tentang Kemitraan Daerah itu, Kabupaten HST akan menjadi salah satu Pemda yang menerima penghargaan.

"Tiga puluh menit lagi akan dimulai, Pak," begitu kata pria bertubuh tegap kepada Aulia.

Obrolan singkat namun padat sore itu pun berakhir. Aulia, Anhar, dan rombongannya pamit undur diri. Yuli berjalan di barisan terakhir.

Kesepakatan Bersama antara BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Kotabaru tentang penerapan Kebijakan Merdeka Belajar.

Di sela perjalanan menuju parkiran mobil, Yuli menuturkan bahwa penghargaan yang diperoleh Pemda HST merupakan buah kerja keras mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Yuli, masih banyak Pemda di Kalimantan Selatan yang serius mengawal KMB. Di antaranya Kabupaten Kota Baru. Meski lokasinya terpencil, Kota Baru justru memiliki peringkat teratas akun belajar.id. Mereka juga menargetkan *Google Master Trainer* yang bekerja sama dengan Refo.

Ada juga Kabupaten Balangan, yang memiliki keberpihakan kepada pendidikan. Menurut Yuli, Pemda Balangan akan memberangkatkan guru-guru yang hebat ke Amerika Serikat, berkerjasama dengan Inadata melalui APBD. Bahkan sebelumnya, mereka memberi bantuan *chromebook* untuk 600 siswa.

Keseriusan dan kepedulian Pemda terhadap pendidikan tersebut, membuat hati Yuli merasa bahagia. Advokasi KMB yang selama ini ia perjuangkan bersama para pegawai di BPMP Kalimantan Selatan, mulai membuahkan hasil yang membanggakan.

Salah satu pesan yang acapkali ia sampaikan saat melakukan advokasi KMB kepada gubernur, bupati, walikota dan para kepala dinas, adalah Pemda merupakan pemilik sekolah. BPMP hanya mendampingi dan membantu mencari jalan keluar bagi permasalahan pendidikan di daerah.

"Ini yang selalu saya tekankan kepada teman-teman provinsi, kabupaten/kota. Pemilik satuan pendidikan itu adalah provinsi, kabupaten/kota," tutup Yuli.*

SIKAP INKLUSIF
PERLANCAR TRANSFORMASI

Bersikap egaliter dan inklusif adalah kunci keberhasilan Yuli melakukan transformasi kelembagaan di tubuh BPMP Kalimantan Selatan.

(I)

"**KRITIK** saya yuk," adalah salah satu kalimat yang pernah diucapkan Yuli Haryanto kepada para pegawainya di BPMP Kalimantan Selatan. Kalimat itu ia ungkapkan sebagai bagian dari usahanya menjadi pribadi yang dapat diterima oleh para pegawainya.

Kamis pagi, 2 Maret 2023, bertempat di Royal Padjajaran Suites, Bogor, Yuli bercerita bahwa kalimat kritik itu kerap ia sampaikan. Terutama saat memulai budaya kritik di kantornya dengan menggelar karpet, duduk lesehan, sambil bersama-sama menikmati secangkir kopi atau teh hangat. Di atas karpet itulah ia memberikan kesempatan kepada para pegawainya untuk menyampaikan pendapat, harapan-harapan, hingga kritik padanya melalui selembar kertas tanpa nama.

"Pedes, memang," kata Yuli sembari tertawa.

Meski demikinan, Yuli tak pernah menyesali sikap inklusifnya. Karena baginya, sikap inklusif adalah syarat utama agar dirinya dapat diterima. Lebih-lebih ia merupakan orang baru di BPMP Kalimantan Selatan. Sebelumnya ia merupakan pegawai di BPMP Jawa Tengah, dan telah mengabdikan dirinya selama 20 tahun. Harapan-harapan para pegawai dan kritik padanya tak hanya sekedar *gimmick*. Setelah dikritik, ia berkewajiban membenahi, sekaligus berupaya memenuhi harapan-harapan yang ia terima dari pegawainya.

"Kantor terlalu gelap, Pak. Ruangan ini perlu meja, Pak."

"Oke, bulan depan yang bisa saya penuhi, saya penuhi. Saya *bikinkan list*-nya. Nih masukan mereka itu. Masukan-masukan ini, dipenuhi tahun ini, yang enggak bisa dipenuhi, tahun depan akan saya penuhi. Jadi saya enggak ngomong *doang*. Apa yang mereka mau kalau itu bisa saya realisasikan, ya saya realisasikan," terang Yuli.

Lebih lanjut, harapan-harapan para pegawai tersebut ia sampaikan saban apel pagi. Ikhtiar itu, bagi Yuli, bertujuan untuk menimbulkan iklim keberanian para pegawai menyampaikan aspirasi dan keinginannya.

Yuli Haryanto pertama kali datang di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

Selain mengedepankan sikap inklusif, Yuli juga lebih banyak mendengar, dan mengamati kebutuhan para pegawainya. Salah satu hasil pengamatannya adalah kebutuhan ruang kerja. Suatu ketika, Yuli datang ke kantor dan ia melihat tiga seksi/bagian berkumpul dalam satu ruangan besar. Para pegawai itu pun meminta ruang kerja yang lebih privasi. Yuli pun memenuhinya.

Pada tahun-tahun pertama itu, Yuli juga aktif mendekati aktor-aktor kunci dalam tubuh BPMP Kalimantan Selatan melalui pendekatan-pendekatan informal.

"Saya harus mempelajari karakteristik. Saya harus menyesuaikan. Saya harus berasimilasi dengan budaya para pegawai. Saya juga menyusun *power map* dan sosial *stylenya*," kata Yuli.

Strategi itu ia terapkan untuk melihat seberapa besar kedatangannya dapat diterima oleh para pegawainya. Lambat laut, ia pun mulai melihat para pegawai BPMP Kalimantan Selatan menerima kehadirannya.

Selain itu, kepedulian dan perhatian Yuli kepada para pegawai BPMP Kalimantan Selatan tak hanya urusan duniawi. Petuah dan nasihat yang berhubungan dengan ibadah juga kerap ia sampaikan. Salah satunya adalah tentang kerja sebagai salah satu bentuk ibadah.

Yuli mencontohkan bahwa perkara korupsi bukan melulu tentang WBK. Sebab korupsi, kata Yuli, tak melulu soal uang. Menurutnya, kedisiplinan pun memiliki kaitan dengan korupsi, yaitu korupsi waktu.

Seiring sikap inklusif, egaliter, perhatian serta nasehatnya kepada para pegawai, pribadi Yuli makin diterima di lingkungan BPMP Kalimantan Selatan.

Namun demikian, Yuli sadar dirinya bukan orang hebat. Bukan pula manusia sempurna yang dapat mengubah *mindset* dan perilaku para pegawai dalam kurun waktu yang sebentar. Apalagi mengubah tradisi bekerja para pegawai yang terlanjur akrab dengan tugas dan fungsi LPMP menuju tugas dan fungsi

Suasana
Koordinasi Terkait Capaian MS Project di kantor BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

BPMP yang condong melakukan advokasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) ke Pemda (Pemda).

Bagi Yuli, perubahan-perubahan yang tercipta saat ini tak lain berangkat dari kesadaran para pegawainya. "Kesadaran mereka sendiri yang mau berubah. Itu luar biasa," kata Yuli.

Tentu, Yuli melihat perubahan itu juga merupakan hidayah dari Tuhan. Ia mengaku selalu melangitkan doa-doa untuk para pegawainya. "Kalau saya *nggak* bisa mengubah teman-teman, mengubah hati teman-teman, Tuhan bisa menunjukkan jalan yang lebih baik. Atau saya minta tolong agar Tuhan bisa melembutkan hati teman-teman saya yang kurang lunak, misalkan," kata Yuli.

(II)

"HARMONISASI," tegas Yuli saat menjawab alasan pendekatan yang ia lakukan kepada para pegawainya di BPMP Kalimantan Selatan. Bagi Yuli, upaya itu tak lain agar program, kegiatan, dan inovasi yang ia cetuskan juga mendapat dukungan dari pegawai-pegawai lainnya.

"Ini harmonisasi yang saya *bikin* seperti itu. Jadi bukan saya datang-datang langsung perintah A, B, C, D, *enggak*, tapi saya pelan-pelan gitu ya, mereka maunya apa," imbuhnya.

Pelbagai inovasi dan inisiatif yang Yuli gagas tak ujug-ujug. Sebelumnya ia sudah melakukan pembacaan dan pemetaan situasi dan kondisi. Inovasi untuk mempermudah sistem kerja adalah cara lain yang Yuli lakukan.

Transformasi
internal yang dilakukan Yuli Haryanto pada akhirnyameringankan bebannya dalam melaksanakan advokasi KMB kepada Pemda.

Ia mencontohkan, saat ada pegawai hendak meminta cuti, itu masih harus menunggu kehadirannya. Di samping itu, undangan-undangan masih menggunakan surat fisik. Kerumitan itu, Yuli atasi dengan aplikasi bernama SI PEDAK. "Saya mencoba menawarkan kemudahan-kemudahan itu, melalui program-program yang saya kembangkan. Jadi itu yang saya tawarkan, saya bikin program kerja salah satunya aplikasi itu," jelas Yuli.

Yuli tak bergerak seorang diri. Ia juga mengajak pegawai-pegawai lain untuk turut terlibat menyumbang pikiran dan gagasan, termasuk membangun Zona Integritas Wilayab Bebas Korupsi (ZI WPK). Inisiasi itu pun didukung oleh pegawai BPMP lainnya.

Yuli juga membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI), yang saat ini berjumlah sekitar 31 satuan tugas. Satgas-satgas ini menjadi salah satu cara Yuli untuk menyibukkan pegawai-pegawainya agar meminimalisir gosip. Bahkan, satgasnya juga menyentuh sisi keagamaan. Salah satunya adalah Satgas Jumat Berkah. Satgas ini merupakan hasil pengamatan Yuli saat melihat sisi religius para pegawainya yang kuat. Di samping itu, program itu menjadi instrumen Yuli untuk berbicara dari hati ke hati. Saban Jumat, kotak celengan berbentuk Ka'bah di setiap Kelompok Kerja (Pokja) dibongkar.

"Mereka sukarela mengumpulkan dan setiap Jumat kita bagi-bagikan. Entah itu bentuknya makanan atau lainnya untuk orang-orang. Setiap hari Jumat, kita ambil," ungkap Yuli.

Pelbagai ikhtiar itu tak lain adalah upaya Yuli untuk menegaskan bahwa dirinya bekerja dan bergerak bukan berangkat dari ego pribadi. "Jadi saya mencoba mengharmonisasi antara saya dan mereka agar mereka mau menerima," tutur Yuli.

Bahkan, Yuli tak menafikan bila pegawainya ada yang tidak suka. Namun, ia tak marah. Ia hanya minta untuk didoakan agar dimutasi lagi ke Jawa Tengah.

"Dengan senang hati," kata Yuli. Pernyataan dan permohonan doa itu ia tegaskan saban apel pagi.

"Jadi saya ke sini karena bertugas seperti janji saya sebagai PNS bahwa saya harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi kalau Bapak Ibu *nggak* suka sama saya, *nggak papa*, itu wajar, tapi cukup doakan saya agar cepat kembali," tambah Yuli.

(III)

SEDARI awal Yuli telah menyampaikan tentang keinginannya untuk membuat *reward* dan *punishment* kepada pegawai-pegawainya.

"Pegawai terdisiplin, pegawai terbaik, pegawai yang tidak pernah bolos," kata Yuli. Bahkan ada juga kategori pegawai yang sering bolos dan sering lupa absen. "Kami punya datanya, dan saya paparkan."

Mereka yang berhasil mendapatkan kategori-ketegori itu akan dibuatkan *flyer* dan ditampilkan di televisi kantor. Upaya itu bukan bermaksud untuk mempermalukan, tapi untuk memantik semangat para pegawai.

Di samping itu, Yuli juga membentuk *Quality Assurance Class*, sebuah wadah penjaminan mutu bagi para pegawai BPMP. Di ruang itu, pelbagai diskusi dan refleksi dilakukan. Yuli mencontohkan, salah satu agenda dalam wadah tersebut adalah belajar bersama tentang Implementasi Kurikulum Merdeka.

"Itu sebelum kami mengadvokasi ke pemerintah," kata Yuli.

Kelas penjaminan mutu itu juga menjadi tempat untuk Yuli berbagi pengetahuan-pengetahuan yang ia dapat saat mengikuti pelbagai *In House Training* (IHT) di beberapa tempat. Mulai dari materi *power mapp, social style, desain thinking, coaching, publik speaking*, hingga negoisasi.

Yuli Haryanto menyampaikan materi design thinking

Materi-materi yang dibahas dalam *Quality Assurance Class* tidak harus berangkat dari pengalamannya, tapi sesuai dengan kebutuhan pegawai-pegawainya.

"Sebelum orang lain tahu, kita harus tahu terlebih dahulu," pungkas Yuli.*

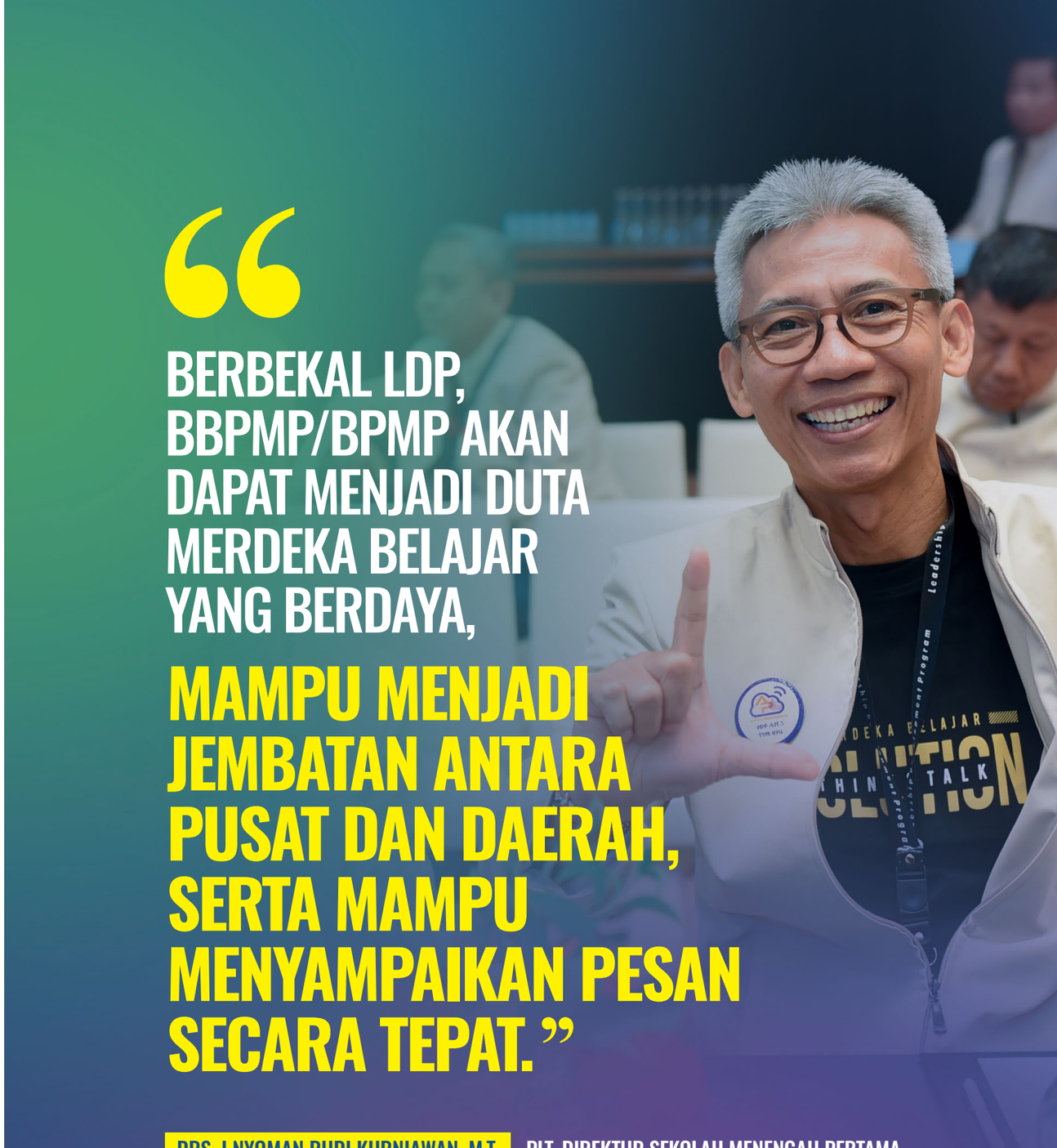

INTEGRASI
PERKUAT TUGAS ADVOKASI

Transformasi internal dari dua Lembaga tak berjalan mulus. Perbedaan tugas dan fungsi serta budaya kerja menjadi musababnya. Namun secara perlahan, integrasi itu membuahkan hasil yang menggembirakan.

(I)

KEBINGUNGAN adalah kata yang meluncur dari bibir Nugraheni Triastuti saat disodori pertanyaan tetang sikapnya terhadap integrasi dua lembaga, yaitu PP-PAUD Dikmas dan LPMP menjadi BBPMP Jawa Tengah. "Semua pada awalnya mengalami proses itu, kebingungan. Karena perubahan itu pasti tidak nyaman," jawab wanita yang akrab disapa Heni ini.

Waktu itu Heni baru selesai mengikuti kegiatan Refleksi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, yang diselenggarakan Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia masih mengenakan kaos yang sama dengan peserta lainnya, yaitu berkaos putih lengan panjang dengan tulisan merdeka belajar di bagian kanan dan th78 tahun Indonesia Merdeka di bagian kiri. Kerudung yang ia kenakan berwarna hitam, sehitam *background* wawancara yang tengah ia jalani.

Terkait dengan perubahan organisasi, Heni meneruskan jawabannya bahwa perubahan itu tidak ia diamkan. Kebingungan yang ia alami menuntutnya untuk lebih banyak belajar agar lebih mudah beradaptasi dan meminimalisir resistensi. Lebih-lebih, perubahan yang terjadi bukan perkara remeh-temeh. Heni mesti menjalankan tugas untuk menyatukan dua lembaga besar, yakni PP-PAUD Dikmas dan LPMP.

"Ketika tidak belajar akan cenderung resisten. Karena tidak berusaha mencari tahu mengapa perubahan dilakukan, tujuannya untuk apa, dan bagaimana cara mengelola perubahan itu? Hal ini pula yang terjadi pada organisasi tempat saya mengabdi," ujar wanita berkacamata ini.

Nugraheni Triastuti,
Kepala BBPMP
Provinsi Jawa Tengah.

Heni bercerita bahwa organisasi PP-PAUD Dikmas dan LPMP Jawa Tengah mulanya sudah tertata dan teratur memberikan layanan kepada satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Akan tetapi tiba-tiba berubah cepat dan bertubi-tubi.

"Salah satunya peleburan PP-PAUD Dikmas Jawa Tengah dengan LPMP Jawa Tengah menjadi BBPMP Jawa Tengah. Semula dua kantor dengan fungsi dan sasaran yang berbeda, tiba-tiba kantornya harus jadi satu dan menjalankan tugas dan fungsi dengan sasaran yang lebih luas," jelas Heni.

Seiring kebijakan itu, BBPMP Jawa Tengah sempat memiliki dua kantor. Pertama, bangunan eks PP-PAUD Dikmas yang ada di Ungaran. Kedua, bangunan eks LPMP di Srondol, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Jarak kedua kantor itu sekitar 10 kilometer. Memimpin pasukan di dua kantor yang berbeda memaksa Heni harus pandai-pandai mengatur strategi agar tetap berada di antara keduanya.

"Jadi setiap hari Senin saya berpindah-pindah. Senin minggu pertama saya mengisi apel di Srondol, Senin minggu depan saya ngisi apel di Ungaran. Kadang-kadang kami gabung lewat zoom, yang Srondol zoom meeting, daring, atau sebaliknya. Pernah juga kami gabung, yang di Srondol datang semuanya ke Ungaran dan sebaliknya, kemudian saya variasikan (apelnya, red) supaya *nggak* bosen," kenang Heni.

Memimpin pegawai di dua lokasi yang berbeda itu tak bertahan lama. Kantor bekas PP-PAUD Dikmas di Ungaran akhirnya ditempati oleh Balai Bahasa. Mendapat kebijakan ini, Heni mencari cara agar pegawai eks pegawai PP-PAUD Dikmas tetap berkantor di Ungaran mengingat pegawai-pegawainya telah memiliki rumah di sekitar Ungaran.

"Tentu saja saya berupaya agar teman-teman saya yang berkantor di Ungaran tetap berkantor di sana. Saya komunikasikan dengan kepala Balai Bahasa sampai ke sekretaris Badan Bahasa. Namun, karena dari sisi teknis, administratif, dan regulasi tidak memungkinkan untuk menempati sebagian ruangan di kantor eks PP-PAUD Dikmas, akhirnya kami semua berkantor di Srondol," jelas Heni.

Heni sadar ada perbedaan kultur kerja di dua lembaga tersebut. Bila di PP-PAUD Dikmas memiliki fleksibilitas kerja karena melayani sekolah semi-formal dan informal. Sementara itu, di LPMP budaya kerjanya cenderung prosedural sebab melayani sekolah-sekolah formal.

Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, **Nugraheni Triastuti**

"Nah, ketika ini digabung tentu menjadi tantangan tersendiri. Agar akulturasi ini terjadi lebih cepat, maka pegawai dari dua kantor tersebut harus berada pada ruang yang sama, tidak ada pemisahan," tegas Heni dengan mimik serius.

Bagi Heni, ia tak ingin merawat perbedaan dengan iklim yang tak menyenangkan. Heni melihat perbedaan tersebut akan lebur seiring penyesuaian dan pembiasaan.

"Ruangan teman-teman bekerja harus campur, tidak boleh ada yang memisahkan diri," lanjutnya.

Keputusan Heni itu kemudian dilengkapi dengan kegiatan penyambutan pegawai yang pindah pada upacara 1 Oktober 2022 lalu. Pegawai di dua kantor itu berdiri di satu halaman yang sama, yakni di Kantor BBPMP Jawa Tengah.

"Upacaranya *bareng*, setelah itu makan bersama sebagai simbol bersatunya dua keluarga," kata Heni lega.

(II)

HENI membenarkan letak kacamatanya. Lalu, melanjutkan ceritanya bahwa tantangan transformasi yang ia hadapi tak hanya soal integrasi PP-PAUD Dikmas dengan LPMP Jawa Tengah, tapi juga soal pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, seiring kebijakan penyederhanaan struktur organisasi kementerian yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

"Semula LPMP Jawa Tengah terdapat 11 pejabat struktural, lalu dipangkas menjadi 2 pejabat struktural. Begitu pula dengan PP-PAUD Dikmas Jawa Tengah," katanya.

Kala itu, ia masih menjabat Kabag Umum dan Plt. Kepala LPMP Jawa Tengah. Perubahan sikap para pegawainya cukup kental Heni rasakan. Eks Kepala bidang dan kepala seksi merasa tidak punya kewenangan terkait pembinaan dan penilaian pegawai yang dulu menjadi stafnya.

Di samping itu, pemangkasan jabatan juga berimbas pada kebiasaan evaluasi kinerja. Meskipun ada kebijakan Kapokja dan Kasupokja, Heni melihat para pelaksana dan para fungsional mempunyai kedudukan yang setara.

"Jadi ketika setara, fungsi Kepokja adalah mengkoordinasikan kegiatan, tidak ada kewajiban pembinaan dan penilaian pegawai," jelas Heni.

Menghadapi tantangan itu, Heni mulai mencari pelbagai solusi dan jalan keluar. Kala itu ia sedang membuat karya tulis di bidang administrasi publik. Akhirnya Heni menjadikan permasalahan tersebut sebagai judul disertasinya. Ia mulai menelisik pelbagai literatur dan referensi, untuk mendapatkan banyak alternatif mengelola perubahan, terutama dalam organisasi pemerintahan.

"Bahwasannya perubahan adalah sebuah kepastian, jadi tak perlu takut terhadap perubahan. Semakin kita mengenali perubahan tersebut, semakin kita tahu ke mana arah dari perubahan. Bahwasannya dalam setiap perubahan pasti ada kelompok yang mendukung dan ada kelompok yang resisten," kata Heni.

Di titik itulah Heni mulai mencari *support system* di kantornya. Lambat laun, ia pun mulai menemukan teman-teman pegawai yang bisa diajak bergerak. Heni pun mulai membentuk satu tim kecil, yang bertugas membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya.

(III)

MENDADAK Heni berdiri. Menghampiri pria bertubuh jangkung, yang ternyata adalah Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen. Dari pimpinannya tersebut, terdengar Heni memperoleh beberapa saran terkait advokasi KMB di Provinsi Jawa Tengah.

Setelah memperoleh saran dan Iwan Syahril meninggalkan lokasi, Heni kembali duduk di tempat semula, dan melanjutkan ceritanya.

Menurutnya, seiring perjalanan waktu, tim kecil yang ia bentuk ternyata kewalahan menyelesaikan tugas yang semakin banyak dalam waktu yang cepat. Sementara di sisi lain, masih banyak pegawai yang kurang terlibat dalam kegiatan advokasi KMB ke Pemda.

Heni terus belajar. Lambat laun, pelbagai literatur yang ia baca mulai membawa secercah harapan. Ia menggunakan strategi wali wilayah.

"Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, saya baru *ngeh*, kenapa nggak saya bagi tim-tim kecil di 35 kabupaten/kota ya? Meskipun kegiatannya berbeda-beda, beberapa kabupaten/kota telah melaksanakan program sekolah penggerak, sementara yang lain belum," terangnya.

Di titik itu, Heni kembali sadar bahwa bergabungnya PP-PAUD Dikmas *kian* meringankan beban tugas Heni, karena saat ini BBPMP Jawa Tengah memiliki

54 widyaprada. Ia dapat membagi rata tugas yang menggunung ke seluruh widyaprada di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

"Ke-18 widyaiswara yang sebelumnya pun telah beralih fungsi menjadi widyaprada. Akhirnya *kan* kedudukannya sama, sama-sama WP. Terus kami sebar WP-nya itu, yang WP eks WI harus satu-satu, yang WP eks pamong itu kita ratakan di semua kab/kota, intinya bercampur. Kemudian, ditambah pelaksana eks LPMP dan eks PP PAUD Dikmas. Sehingga dalam satu wali wilayah, terdiri atas 2 orang WP dan 3 - 4 pelaksana," jelas Heni.

Heni kembali menukil sebuah teori bahwa alur proses perubahan akan bertemu dengan zona baru. Ia menilai saat ini zona baru itu sudah mulai berangsur-angsur terbentuk. Pegawai sudah mulai meninggalkan cara-cara lama seperti bekerja dalam satu bidang dan seksi.

"Dulu, saat masih ada bidang dan seksi, pegawai di seksi pemetaan akan menjadi mahir di kegiatan pemetaan, pegawai di seksi fasilitasi akan menjadi spesialis di fasilitasi. Ketika memberikan layanan kepada masyarakat cenderung kurang menyeluruh. Sekarang, ada tuntutan untuk menguasai bidang secara utuh dan menyeluruh," lanjutnya.

Kini, perkembangan organisasi yang dinakhodai Heni, kian menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena kompetensi para pegawai menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Semua tugas organisasi mulai dikuasai oleh semua pegawai. Bahkan, ada tradisi baru yaitu saling belajar bersama antarpegawai.

"Saban apel pagi di hari Senin, saya meminta wali wilayah menyampaikan praktik baik di wilayah masing-masing dengan harapan semua pegawai semakin menguasai konten kebijakan Kemendikbudristek dan implementasinya terkait program merdeka belajar," cerita Heni.

Heni menambahkan bahwa seiring tugas yang meluas, ia terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawainya. Mulai kompetensi terkait konten kreatif, teknik presentasi, advokasi, hingga dokumentasi dan publikasi. Ia beharap, semua wali wilayah menjadi *trusted advisor* bagi wilayahnya masing-masing.

"Apel Segar (Apel dan Senin Pagi Belajar) menjadi wahana untuk belajar bersama. Sehingga kita menjadi organisasi yang terus belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses belajar masih terus berjalan, begitu pula perubahan pasti akan selalu terjadi, tapi saya yakin, perubahan tersebut akan membawa keadaan yang lebih baik," tegas Heni dengan seulas senyum manis.*

Proses belajar masih terus berjalan, begitu pula perubahan pasti akan selalu terjadi."

TRANSFORMASI
INTERNAL DAN ASA MERAIH ZI WBK

Pertama menginjakkan kaki di BPMP Papua, Junus dihadapkan sikap dan kondisi SDM yang membuatnya frustasi.

(I)

JUNUS Simangungsong terlihat gelisah. Sesekali ia memperbaiki letak kacamatanya. Kamis siang, 21 September 2023 itu, di ruang rapat lantai 2 Kantor BPMP Papua, ia sedang menerima kunjungan petugas Pengukuran Level Transformasi UPT (*Endline*) dari PDM-05.

Miniatur bangunan BPMP Papua yang pecah.

"SDM di sini tidak baik-baik saja. Pertama masalah karakter. Saya terus terang saja kalau ditanya," ujar Junus dengan raut muka serius. "Di sini ada sifat yang tidak pantas seperti pemecahan kaca miniatur kantor dan jendela kantor!"

Bagi Junus, karakter SDM di BPMP Papua tersebut sangat mengejutkan karena tidak mencerminkan karakter pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan, apalagi yang memiliki tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan. Sebagai orang baru yang diberi amanah menjadi Kepala BPMP Papua, Junus tak menduga terhadap karakter beberapa pegawainya tersebut.

Kejadian itu bermula dari kebiasaan nyaman yang mendadak sirna setelah Junus tiba di BPMP Papua. Dulu, saban hari raya, setiap pegawai memperoleh uang tambahan yang sangat besar. Namun setelah kehadirian Junus, kebiasaan nyaman itu mendadak hilang. Sontak sebagian pegawainya meradang.

"SDM di sini tidak baik-baik saja. Pertama masalah karakter. Saya terus terang saja kalau ditanya."

Sebelum kehadiran Junus, kegiatan di BMP Papua jarang dilaksanakan, namun daya serap selalu besar. Hal itu kemudian melahirkan kecurigaan berbagai pihak dan berakhir dengan temuan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat sebelumnya.

"Di sini tidak baik-baik saja," kata Junus kembali mengulang pernyataannya.

Selain itu, Junus juga dihadapkan dengan masalah kompetensi SDM BPMP Papua yang sempat membuatnya frustasi. Ceritanya, suatu ketika ia memimpin rapat di kantor BPMP Papua. Ia minta dihadirkan pegawai yang jago *microsoft excel*. Namun ia kaget saat pegawainya itu kesulitan membesar-kecilkan kolom *excel*.

"Mati aku," kata Junus mengulang perkataannya kala itu.

Padahal, kata Junus, pegawai itu merupakan yang terbaik. Akhirnya Junus mengambil alih tugas. Ia memimpin rapat sekaligus menjadi operator. Namun, ia tak melupakan pegawainya itu. Junus memintanya untuk duduk di sampingnya.

Berangkat dari kejadian itu, Junus sempat berpikir mendatangkan staf dari Jakarta yang mahir di bidang IT untuk membantunya dan mengajari staf BPMP Papua tentang skill-skill dasar *Excel* dan *Power Point*. Akan tetapi upayanya itu bertepuk sebelah tangan.

Di titik itu, Junus tak ingin terus-terusan berharap pada Jakarta. Mau tak mau, ia turun langsung mendampingi staf BPMP Papua.

Kisah lain yang masih membekas di ingatan Junus adalah kedisiplinan pengelola kegiatan dalam membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan. Pasalnya pengelola keuangan mengaku asing dengan dua jenis laporan itu dan beberapa istilah dalam sistem keuangan.

"Saya *nggak* pernah, Pak," kata Junus menirukan pengakuan pegawainya.

"Makanya sekarang belajar. Dulu kok bisa dapat sertifikat pengadaan barang/jasa atau sertifikat perbendaharaan?" ucap Junus dengan nada bercanda.

"Saya dulu nggak diajari soal itu."

Berangkat dari kondisi itu, Junus mulai memperbaiki kondisi internal BPMP Papua. Tak lelah ia mewanti-wanti para pegawainya untuk terus belajar. Lebih-lebih pegawai bagian keuangan. Sebab, BPMP Papua memiliki PR yang cukup rumit di keuangan.

Junus Simangungsong, Kepala BPMP Provinsi Papua.

"Memang tidak mudah, tapi pelan-pelan," kata Junus.

Arahan Junus tersebut diamini Ita Sari Rafiun, pengelola data mutu dan supervisi yang diminta Junus untuk membantu bagian keuangan. Menurutnya, Junus merupakan sosok yang disiplin.

"Sekarang lebih banyak perubahannya dari sebelum-sebelumnya," ujar Ita.

(II)

JARUM jam menunjuk pada pukul 13.15 WIT. Junus yang waktu itu berkaos hitam bertuliskan merdeka belajar di dada, berpindah tempat untuk kenyamanan wawancara. Ia memilih ruang kerja Kasubag Umum karena AC ruangannya sedang bermasalah.

Selama beberapa bulan di BPMP Papua, Junus sudah menggagas strategi advokasi KMB kepada Pemda di Bumi Cenderawasih. Namanya Rasa Papeda, yang merupakan akronim dari Rapat Santai Pendampingan dan Advokasi Pemerintah Daerah. Bahkan, Junus sudah menjalankan Rasa Papeda ke beberapa Pemda di Provinsi Papua seperti di Kabupaten Paniai dan Boven Digoel.

Namun, kondisi SDM BPMP Papua menjadi perhatian utama bagi Junus. Ia berinisiatif untuk memperbaiki kondisi internal BPMP Papua terlebih dahulu, sebelum gencar melaksanakan advokasi KMB kepada semua Pemda.

Langkah pertama yang dia lakukan adalah menciptakan keakraban dengan meminimalisir sekat antara pimpinan dan bawahan, melalui kegiatan *capacity building* di Resimen Induk Kodam (Rindam).

Pada kegiatan itu, Junus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dan game yang diadakan panitia. Ia bahkan tidak ragu-ragu untuk mencoba *flying fox*,

yaitu permainan luncur gantung yang terdiri dari katrol yang digantung pada kabel berbahan baja tahan karat, dan dipasang di tempat miring. Ia juga tak sungkan-sungkan untuk tidur bersama para stafnya di barak.

Atas sikap itu, tak sedikit para stafnya yang terheran-heran.

"Dulu, kalau pejabat itu kayaknya nggak pernah ikut kegiatan begini-begini. Apalagi tidur bersama juga di barak," tutur Junus menirukan ucapan pegawainya.

Mendengarnya, Junus segera menetralisir. Ia tak ingin dibanding-bandingkan.

"Sudahlah. Itu lupakan saja," kata Junus.

Melihat Junus bersikap demikian, para pegawainya senang. Sebab, di Papua, kebiasaan itu bukan hal yang lazim. Saat kegiatan berlangsung, para pejabatnya hanya menonton, tidak terlibat langsung.

"Saya memang tunjukkan kepada mereka bahwa pejabat itu *nggak* begitu. Harus berpartisipasi dan harus bisa mendorong," ungkapnya.

Selain itu, Junus juga sering mengadakan pertemuan luring dengan para pegawainya di Aula Kantor BPMP Papua.

"Kadang kita bikin *game-game* yang membuat mereka senang. Saya berikan hadiah juga walaupun *nggak* banyak," ujar Junus.

Pada pertemuan itu, Junus juga mengingatkan para pegawainya tentang tugas dan etika bekerja. Ia juga singgung tentang perilaku premanisme. Karena bagi Junus, insiden pemecahan kaca yang ia ceritakan, sebenarnya sempat membuat emosi Junus memuncak. Ia miris saat kondisi internalnya justru akrab dengan kekerasan.

"Bagaimana saya bisa berkata kepada satuan pendidikan atau dinas agar melarang kekerasan bila ternyata kita sendiri membuat kekerasan? Terus kita namanya besar *banget*, yaitu BPMP, Penjaminan mutu. Tapi *kok* orangnya *nggak* mencerminkan sikap dan perilaku yang bermutu?" ujar Junus mengulang perkataannya kepada para pegawainya

"Kalau masih ada sekali lagi, sudah, kita pecat langsung. Tolonglah, kita ini digaji negara. Belum kerja saja, sudah digaji. Tolonglah kita melayani masyarakat," imbuhnya tegas *nan* bijak.

Tak lupa, Junus juga menggugah hati pegawainya. Pernyataan yang cukup sering Junus sampaikan adalah tentang pajak. Ia berkata bahwa gaji mereka berasal dari pajak, sedangkan para pembayar pajak adalah keluarga mereka.

"Terus, kita mau makan *duit* orang tua, saudara-saudara kita. Siapa yang rugi kalau kita tidak melayani dengan baik? *Kan* masyarakat. Jadi perilaku kita sekarang, itu cerminan kita besok," ungkap Junus kepada para pegawainya.

Ikhtiar Junus tersebut, lambat laun membuahkan hasil. Kebiasaan-kebiasaan tak elok para pegawainya mulai berkurang. Sedari awal, Junus memang tak menyelesaikan masalah dengan pemecatan. Sebab, Junus masih memikirkan keluarga para pegawainya.

"Kalau mereka dipecat, dari mana bisa sekolah anak-anak mereka. Di Papua angka partisipasi sekolah sudah rendah. Kalau mereka dipecat, berarti menambah angka partisipasi sekolah menjadi bertambah rendah lagi," ucap Junus.

(III)

SUATU hari, Junus kedatangan tamu dari Polda Papua. Ia menerima rombongan itu di ruangannya. Beberapa pegawai BPMP Papua juga turut hadir. Saat baru duduk di sofa ruangan Junus, rombongan Korps Bhayangkara itu melontarkan pernyataan yang membuat Junus mengerutkan dahi.

"Kayaknya ada yang berubah di sini," kata salah satu perwakilan dari mereka.

"Apa? *Nggak* ada yang berubah. Kantornya ini-ini saja," jawab Junus dengan nada bingung.

Polisi itu pun menjelaskan pernyataannya. Menurutnya, SDM di BPMP Papua sudah mulai berubah. Dulu, bila ia datang ke kantor BPMP Papua, sikap satpamnya dan pegawai di sini cenderung *cuek*, tapi sekarang berubah ramah.

"Mau ketemu siapa, Pak? Ada yang bisa kami bantu?" ucap Junus menirukan perkataan polisi tersebut. Mendengar cerita dari polisi itu, Junus kaget.

"Masa sih, Pak sampai segitunya?" ucap Junus.

Saat menceritakan kejadian tersebut, raut muka Junus menyiratkan kebanggaan. Ia bersyukur kondisi internal kantornya sudah mulai berubah. Pasalnya, polisi berpangkat kompol itu masih ingat saat ia mengunjungi BPMP Papua 2 tahun yang lalu.

"Saya pakai mobil dinas, pakai pakaian seragam kepolisian, *nggak* diapa-apakan, *nggak* ditegur juga," kenang Polisi itu.

"Saya *nggak* pernah menduga muncul pernyataan itu dari polisi tersebut," timpal Junus.

Selain itu, para staf lainnya juga berubah. Nuansa keras di kantornya tak lagi terasa. Ia mencontohkan kebiasaan tersenyum para pegawainya. Padahal dulu, kata Junus, mereka susah untuk melempar senyum. Memang, Junus cukup sering meminta para pegawainya untuk murah senyum.

"Bapak/Ibu, kalau tidak bisa membantu tamu, cukup senyum aja. Sudah cukup itu," ucap Junus.

(IV)

JUNUS diangkat sebagai Kepala BPMP Papua tanggal 27 Januari 2023. Sebelumnya ia telah malang-melintang bertugas di beberapa unit kerja Kemendikbudrstek seperti Direktorat SMA, Direktorat SMK, dan terakhir sebagai Ahli Madya Pengembang Penilai Pendidikan di Pusmendik.

Kesediaan Junus menjadi kepala BPMP Papua sempat ditanyakan kolega dan kerabatnya. Pasalnya, Papua merupakan provinsi yang tidak aman-aman saja. Konflik bisa pecah sewaktu-waktu. Ia pun jauh dari keluarganya yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan, Banten.

"Papua juga NKRI," jawab Junus saban ditanya alasannya.

"Mumpung masih ada umur, bisa bermanfaat untuk orang yang sangat-sangat membutuhkan," imbuhnya.

Junus menjelaskan bahwa pendidikan di Papua masih memprihatinkan. Bahkan, ia sempat mendengar pernyataan dari anggota DPRD Kabupaten Nabire bahwa ada lulusan SMA yang masih kurang lancar membaca.

"Bahkan, anggota dewan saja belum tentu bisa baca dengan lancar," ungkap Junus menirukan perkataan anggota DPRD tersebut.

Berangkat dari kondisi itu, Junus membulatkan tekad bahwa Ia ingin membantu dan memajukan pendidikan di Bumi Cenderawasih, dan memulainya dengan transformasi di internal tubuh BPMP Papua.

"Perbaikan internal dan meraih Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)," tegasnya.*

DARI TIM PERWALIAN
HINGGA MAPALUS PENDIDIKAN

Febry berhasil menunjukkan kegigihan, inisiatif, dan inovasi mampu menggerakkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat.

(I)

PROYEK pertama Febry H.J. Dien saat menjabat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara pada 2020 hanya satu yaitu transformasi organisasi. Ia memulainya dengan perubahan paradigma. Itu bukan hal mudah.

Ia lalu membentuk tim efektif. Paradigma dibangun: pekerjaan tak bisa diselesaikan oleh satu orang (*one man show*). "Dengan tim itu kami sanggup melaksanakan beberapa hal yang semula kami rasa sangat sulit untuk dicapai," ujar Febry H.J. Dien.

Tentu saja kebijakan anyar mengundang tanya untuk apa buat baru kalau yang ada sudah bagus? Itu resistensi untuk mempertahankan zona nyaman. "Zona nyaman ini ternyata setelah kita sandingkan dengan sebuah penilaian kinerja, tidak benar," kenang Febry.

Febry tahu perubahan tak pernah berjalan mulus. Selalu ada aral melintang. Pasti ada resistensi, keraguan, dan pengabaian.

Bahkan, Febry pernah diabaikan staf saat memimpin rapat. Namun, ia tak langsung menghakimi. Penilaian tidak bisa dilakukan saat itu juga. "Bukan masalah *like and dislike*. Saya menghindari konfrontasi karena yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memang tugas kita. Kenapa harus kita bujuk?" kata Febry.

Setelah mengidentifikasi kecenderungan para pegawainya, ia memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bekerja. Bagi yang tak mendukung akan tersaring dengan sendirinya. "Bagi orang yang tidak seirama, akan merasa bahwa memang mereka tidak bisa mengerjakannya. Mereka tidak mampu karena kurang informasi," ucap Febry. Mereka kemudian banyak bertanya dan menyampaikan protes. Namun, akhirnya, mereka diam sendiri.

Febry H.J. Dien, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara

Memang Febry tak mau ambil langkah frontal. Ia membuat sistem. Misalnya, tentang disiplin pegawai. Aturan diterapkan. Jika sebelumnya pelanggar aturan tidak dihukum, kini hal itu tidak berlaku lagi. Sanksi tetap ada. Namun, sistem yang bekerja. Pegawai diberitahukan tentang proses penilaian kinerja.

Penilaian kinerja berbasis penilaian diri (*self assessment*). Presensi pegawai menggunakan aplikasi sederhana Google Form. Pegawai yang tidak masuk kerja dan minta izin terdata. Data itu disampaikan ke setiap pegawai. Belakangan diketahui ada pegawai yang setiap hari minta izin keluar kantor. "Kita tidak melarang pegawai minta izin. Tapi setelah didata, akhirnya malu sendiri," ungkap Febry. "Jadi, yang menilai bukan lagi pimpinan." Melainkan sistem.

Teguran baru dilakukan setelah pelanggaran dilakukan tiga kali. Itu pun teguran lisan melalui bagian kepegawaian. Jika prosesnya berlanjut hingga Kasubag Umum dan hendak ditingkatkan lagi, baru Febry yang turun tangan. Semua ini sesuai dengan mekanisme birokrasi. Tak semua kebijakan harus ditangani langsung oleh Kepala. Mekanisme delegasi berjalan. Febry hanya menetapkan dua prinsip yang tak boleh dilanggar stafnya: ikut aturan dan tidak boleh fiktif.

Proses ini berjalan dengan diulang-ulang dan dijadikan kebiasaan (*habit*). Bagi Febry, tak mudah menerapkan kebijakan Pusat mengenai disiplin pegawai jika tidak dilakukan berulang-ulang.

Sejak Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, menggulirkan sejumlah program prioritas antara lain Program Sekolah Penggerak, Implementasi

Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, BBPMP/BPMP menjadi ujung tombak implementasi. Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen ini tidak lagi sekadar melakukan pemetaan mutu pendidikan di daerah. Situasi ini memerlukan pengawalan intens Kepala BBPMP/BPMP agar berbagai program itu berjalan mulus di daerah.

Kuncinya adalah *cascading*, penjabaran, dan pembagian tugas yang jelas. Jika penerapannya keliru, menurut Febry, akan membuat frustasi pegawai. Masalah diselesaikan sesuai dengan levelnya: pimpinan, staf, ketua kelompok kerja, dan seterusnya. Ada sistem pendelegasian ke bawah. Jika sistem ini berjalan lancar, tak ada yang mengalami frustasi.

Febry mengakui kadang diterpa kebingungan. Hal lumrah yang dihadapi orang yang bertubi-tubi didera penugasan. Namun situasi ini dapat ia lewati melalui forum diskusi dengan rekan sesama Kepala UPT. Sebab kondisi yang dialaminya juga dihadapi Kepala UPT lain. Ini merupakan proses transformasi internal yang perlu dilalui sekitar 3 - 6 bulan. "Kalau kita pintar merangkumnya, waktu yang kita perlukan untuk berpindah dari rasa tidak nyaman atau frustasi itu menjadi nyaman, semakin sempit," ungkapnya. "Kita juga dapat terhindar dari minimal rasa frustasi, kesalahpahaman, kesalahan pengambilan keputusan, dan sebagainya."

(II)

KEMBALI pada pembentukan tim efektif. Semangat perubahan di tubuh organisasi terus diembuskan Febry. Hal biasa-biasa saja harus berubah menjadi luar biasa, termasuk saat penyusunan program. Sebelumnya, program disusun untuk sekadar memenuhi kebutuhan laporan. Tentu saja semua orang bisa membuatnya. Febry ingin melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang berdampak bagi dinas pendidikan. Selama ini dinas pendidikan menganggap LPMP sebagai pelengkap saja.

Strategi disusun. Febry membentuk tim perwalian di 15 kabupaten/kota. Ia menyambangi seluruh kabupaten/kota itu. Ditemuinya para Kepala Dinas. Berdiskusi. Tukar pikiran. Nomor ponselnya disebar dan dibagikan kepada semua kepala dinas dan kepala sekolah. Misinya, Kemendikbudristek 'hadir' di daerah. Tim perwalian menjadi tempat berkonsultasi bagi 15 kabupaten/kota.

"Sekarang kalau ke daerah, pasti kepala dinas itu ingin mempertemukan saya dengan Kepala Daerah. Karena mereka pikir, BPMP Sulawesi Utara, sebagai perpanjangan Kemendikbudristek, pasti bawa sesuatu yang baik bagi mereka," kenang Febry. Strategi ini dinamakan pendampingan langsung melekat. Setiap

petugas wali menjalin komunikasi dengan dinas pendidikan. Tanya kebutuhan mereka dan undang kalau ada kegiatan. Kegiatan selesai diikuti dengan tindak lanjut berikutnya. Apa yang bisa dibantu oleh BPMP. "BPMP Sulawesi Utara lebih cenderung sekarang menjadi semacam konsultan. Kita tidak boleh menempatkan diri sebagai atasan," ujar Febry. Eksekutor lapangan tetap Pemda.

Agar sistem perwalian berjalan efektif, disediakan tempat pertemuan rutin. Selain itu, disiapkan pula aplikasi berupa dasbor (*dashboard*). Setiap wali melaporkan kinerja pendampingannya melalui dasbor itu. Perkembangan dasbor rutin dilaporkan ke grup *Whatsapp* (WA).

Untuk menindaklanjuti laporan, setiap wali kini tak *sungkan* lagi menghubungi langsung Kepala Dinas Pendidikan. Sebab, dulu, tiap bertemu Kepala Dinas Pendidikan, Febry selalu mengajak stafnya.Ia mengenalkan staf itu kepada Kepala Dinas. Staf itu siap membantu dan memfasilitasi keperluan Dinas. Ini, baginya, cara terbaik membangun kepercayaan. Relasi dibangun dengan dasar bahwa BPMP membawa manfaat bagi Dinas Pendidikan.

Upaya ini menuai sukses. Kepercayaan terbentuk. Banyak kegiatan dinas pendidikan digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Saat itu Penerimaan Negara Bukan Pajak Sulawesi Utara naik drastis 700%. Imbasnya, kegiatan kedinasan turut terdongkrak. Intensitas penggunaan fasilitas BPMP sebagai lokasi kegiatan mengalami lonjakan.

Febry bertanya-tanya dalam hati, kenapa pilihan lokasi kegiatan tertuju ke BPMP? Bila disejajarkan dengan hotel, fasilitas BPMP tergolong bintang 3. Padahal, di Manado menjamur hotel bintang 4 dan 5.

Jawaban mengejutkan mampir di telinga Febry. "Di hotel memang bagus. Semuanya tersedia. Tetapi yang kami perlukan tidak ada di hotel, apa? Suasana pembelajaran," Febry menirukan ucapan seorang pejabat dinas pendidikan.

BPMP Provinsi Sulawesi Utara terletak di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Luasnya 4 hektare. Lahan 2 hektare sudah terpakai, selebihnya area pepohonan. Suasana alam itu menciptakan situasi belajar yang kondusif. Orang berkegiatan di hotel, pikirannya tertuju dengan kegiatan lain, yaitu berbelanja dan cuci mata di mal. Sementara itu jika berkegiatan di BPMP, hanya terpantik keinginan belajar karena yang ada di sekitar mereka hanyalah pepohonan.

Febry juga sering diundang dinas pendidikan sebagai narasumber. Dari diskusi dengan pimpinan di dinas pendidikan, diketahui bahwa LPMP sebelumnya jika mengundang dinas pendidikan, yang hadir hanya 1 - 2 Kepala Dinas Pendidikan. Namun, kini situasi berbeda. Setiap BPMP menggelar rapat, semua perwakilan dinas pendidikan hadir. Kuncinya, semua Dinas diberi ruang untuk bicara. Mendengar pendapat dan harapan mereka.

Kunci utamanya adalah kepercayaan. Membuat pihak eksternal percaya dulu. Caranya, informasi tentang program prioritas Kemendikbudristek disampaikan tanpa membuat mereka bingung. Hal ini dilakukan dengan mematangkan konsep komunikasi kebijakan melalui proses kajian dan penyusunan jembatan informasi. Intinya, kebijakan Pusat tidak buru-buru disampaikan kepada Pemda. Ada proses internalisasi kebijakan dan pemantapan strategi komunikasi. Proses ini dilakukan oleh tim kecil.

Hal berikutnya yang juga penting ditunjukkan kepada Pemda adalah proses edukasi. Apa pun yang dilakukan UPT dirancang untuk memberi manfaat besar bagi Pemda. "Jangan sampai program-program itu, bagi mereka, hanya sekadar permintaan data," ucap Febry.

Febry tak menampik situasi bahwa relasi yang dibangun antar-Pemda juga dipengaruhi oleh perbedaan sikap politik. Namun, pendampingan UPT kepada Pemda dirancang sedemikian rupa agar tidak terkesan pro ke salah satu golongan atau partai tertentu. UPT tetap berperan sebagai konsultan. Sistem perwalian dikawal dengan mitigasi risiko.

Menyambangi semua Pemda bukan tanpa tantangan. Dari 15 kabupaten/kota yang disambangi, 80% Kepala Dinas Pendidikan menerimanya. Sisanya 20% mewakilkan kepada, misalnya, Kepala Bidang. Meski sedikit kecewa menggelayut di benaknya. Ia berpikir hal itu terjadi lantaran kekurangtahuan mereka mengenai manfaat BPMP dan masih kuatnya paradigma lama bersemayam di kepala. Kendati demikian, Febry tetap menunjukkan integritasnya. Ia konsultan. Mitra, bukan atasan, apalagi lawan. Ia tetap menjaga empati kepada Pemda.

Pernah di suatu daerah, Febry hanya diterima oleh Kepala Bidang. Tebersit rasa kecewa di benaknya. Namun, ia tetap menjalankan misi. Di akhir pertemuan, ia meminta nomor WA dan nomor telepon Kepala Dinas. Febry membuat grup WA berisi nomor semua kepala dinas dan Kepala BPMP. Di grup itu ia mengenalkan diri dan menyebarkan beragam informasi yang perlu diketahui oleh Pemda.

Upaya ekstra sabar itu kini menuai hasil. Semua Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan Pemda dan BPMP Provinsi Sulawesi Utara telah ditandatangani. Semua video testimoni sudah dikirim.

Penandatanganan PKS bukan akhir. Sebaliknya, sebuah awal dari kemitraan yang panjang. Selalu ada kesempatan kedua untuk memberi penjelasan komprehensif kepada Pemda tentang program-program prioritas Kemendikbudristek. Febri pun ingin memastikan usai acara sosialisasi, program yang disampaikan diimplementasikan oleh Pemda.

Selain intens memfungsikan grup WA, program advokasi juga dilakukan secara intensif. BPMP memosisikan diri sebagai pelayan. Ini satu cara terbaik untuk meningkatkan rasa percaya Dinas Pendidikan kepada BPMP.

Upaya itu berhasil. Di sebuah kabupaten, misalnya, operator Dapodiknya tidak berganti-ganti karena diampu oleh salah satu pejabat di dinas pendidikan. Jabatan ini memampukannya untuk mengatur dan mengontrol satuan pendidikan. Setelah dilakukan sosialisasi secara terbuka, akhirnya pejabat itu rela melepaskan akun Dapodik satuan pendidikan. "Tapi prosesnya itu tidak cepat," kenang Febry. "Sekitar satu tahun."

(III)

FEBRY masih ingat ucapan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Iwan Syahril, tentang pendekatan konsultatif dan asimetris. Pendekatan konsultatif terkait dengan pemosisian diri sebagai konsultan bagi Pemda. Febry telah menerapkannya kepada 15 kabupaten/kota yang diampunya. Sementara pendekatan asimetris terkait dengan kearifan lokal. Bahasa, kebiasaan, dan tata cara pergaulan perlu menjadi pertimbangan utama dalam menjalin relasi dengan Pemda.

Di atas semua itu, ucap Febry, adalah kemampuan membawa diri. Fleksibel dalam membangun hubungan. Dalam bertutur, gunakan kalimat persuasif, bukan instruktif.

Pendekatan asimetris kepada Pemda diwujudkan Febry dengan menciptakan Mapalus Pendidikan. Jika Kemendikbudristek menggunakan istilah 'episode' dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Febry menggunakan istilah 'babak' dalam menjalankan program ini. Hingga kini, Mapalus Pendidikan sudah memasuki babak ke-3. Mapalus berarti gotong royong.

Mapalus Pendidikan Babak I bergulir di masa pandemi COVID-19. Tepatnya sebulan setelah Febry diangkat sebagai Kepala BPMP (saat itu LPMP) pada Agustus 2020. Sebelumnya, ia telah membuat rancangan Mapalus sebagai proyek perubahan pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepemimpinan. Saat diangkat sebagai Kepala, ia tinggal melakukan eksekusi program.

Babak I Mapalus Pendidikan ini sangat sederhana. Febry mengumpulkan data berupa berbagai program inisiatif Pemda terkait mitigasi risiko dalam penanganan COVID-19. Sembari berkeliling manyapa para Kepala Dinas Pendidikan di 15 Kabupaten/Kota pada Agustus 2020, ia bersama tim BPMP mendata program di APBD dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan yang menopang pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ia kemudian mengundang 15

kepala dinas kabupaten/kota ke BPMP sebulan kemudian, 22 September 2020. Ke-15 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hadir. Mereka menandatangani Piagam Inisiatif di sebuah lapangan terbuka (video: s.id/mapalus1). "Semua Kepala Dinas datang untuk menandatangani piagam yang sebenarnya itu adalah anggaran mereka," ucapnya.

Kemudian, BPMP Provinsi Sulawesi Utara merilis kegiatan itu di media massa. Dijelaskan bahwa seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara mendukung program PJJ yang digaungkan Kemendikbudristek. Dampaknya sangat terasa. Mereka bangga atas piagam penghargaan yang diterima. Mereka akan tetap menganggarkan program mitigasi risiko PJJ di tahun mendatang.

Mapalus Pendidikan Babak II digelar tahun berikutnya. Pada 30 April—1 Mei 2021 itu, BPMP mengundang seluruh pemangku kepentingan pendidikan di daerah, termasuk Kementerian Agama, perguruan tinggi, organisasi guru, dan, tentu saja, media massa. Deklarasi bersama ditandatangani (video: s.id/mapalus2). Disepakati pula untuk meneruskan kerja sama itu dalam bentuk forum. Namanya Forum Komunikasi Pimpinan Pendidikan Daerah (FORKOPIMDIKDA). Terpilih Rektor Universitas Negeri Manado sebagai Ketua dan Febry sekretarisnya.

"Dari FORKOPIMDIKDA itu, dukungan terhadap BPMP Sulawesi Utara makin kuat. Kepercayaan pihak pendidikan di Sulawesi Utara termasuk Kemenag terhadap BPMP naik," ungkap Febry.

Mapalus Pendidikan Babak III digelar pada 19 Desember 2022. Babak ini berfokus pada pemaksimalan diseminasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. BPMP Provinsi Sulawesi Utara mempertemukan langsung Kemendikbudristek, melalui Direktorat Sekolah Dasar dan Pusat Studi Kebijakan Pendidikan (PSKP), dengan para pemangku kebijakan di daerah.

Dengan begitu diharapkan beragam informasi yang diterima daerah, seperti Rapor Pendidikan dan Asesmen Nasional, digunakan oleh masing-masing daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program peningkatan mutu pendidikan.

Cukup banyak penghargaan yang diberikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara pada acara ini: (1) Daerah Proaktif pada Anggaran Transformasi Pendidikan melalui APBD dan APBDP, (2) Daerah Proaktif Mendukung Program Prioritas Kemdikbudristek, (3) Daerah Responsif yang Mencapai Adoption Rate 100% Pertama dalam Platform Merdeka Mengajar, (4) Daerah Responsif dalam Aktivasi Akun belajar.id Kepsek dan PTK Pelaksana PSP Angkatan II , (5) Daerah Responsif sebagai Pendaftar Calon Kepala Sekolah Penggerak Terbanyak Angkatan III, (6) Daerah Responsif dalam Program Literasi dan Numerasi melalui Tim Pendamping Literasi Daerah, (7) Daerah Proaktif pada Regulasi Transformasi Pendidikan melalui SK Bupati untuk Kepala Sekolah Penggerak Angkatan I, II dan III, (8) Daerah Responsif pada Penerapan Transaksi Dana BOS Non Tunai (Bermitra dengan BPMP dalam Percepatan PMM, Pemda Melakukan Audiensi dengan Kemdikbudristek melalui Advokasi dan Pendampingan BPMP), (9) Daerah Responsif melalui Audiensi dengan Kemendikbudristek (Daerah yang Pertama Melakukan Audiensi dengan Kemdikbudristek melalui Advokasi dan Pendampingan BPMP), (10) Daerah Responsif melalui Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Sarana IT, (11) Daerah Responsif melalui Konsultasi Kemitraan Daerah, (12) Daerah Responsif pada Pelaksana Program Sekolah Penggerak Terbanyak Angkatan III, (13) Daerah Responsif sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak Terbanyak Angkatan II, (14) Daerah Proaktif pada Sinkronisasi Dapodik Terbaik Tahun 2022, (15) Daerah Responsif sebagai Daerah Pertama yang Melakukan Unduh Rapor Pendidikan dan Melakukan PBD, (16) Inisiatif PSP: Pembentukan MKPSP (Musyawarah Kerja Program Sekolah Penggerak), (17) Penghargaan Kemampuan Berkolaborasi Melaksanakan Penilaian Semester dan Asesmen Berbasis Android Tanpa Ketersediaan Jaringan.

Pada acara ini pula PSKP mengumumkan Bitung sebagai kota yang mendukung kebijakan prioritas Kemendikbudristek. Siniar (*podcast*) PSKP dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kota Bitung menghadirkan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Euginie N. Mantiri, dan Febry (video: ***s.id/siniar-bitung***).

Febry terus menggerakkan lembaga yang dipimpinnya untuk membuat perubahan di Sulawesi Utara. Dengan tim efektif yang bekerja tanpa kenal lelah. Perubahan, bagi Febry, adalah keniscayaan.*

STRATEGI PIAWAI MENGATUR PEGAWAI

Mudah sekali berucap 'Right man in the right place'. Nyatanya, perlu strategi dan pendekatan khusus agar tidak salah langkah.

TIMPANG. I Made Alit Dwitama merasakan itu saat menjabat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Ketimpangan terkait dengan kegiatan yang dilakukan antarseksi. Ada seksi yang menjalankan banyak kegiatan di luar kantor atau daerah. Ada pula seksi yang jarang mengadakan kegiatan. "Contohnya Kasubag, dia hanya *supporting*, jarang dapat kegiatan," jelas Made. Akhirnya timbul kecemburuan di antara para pegawai sebab banyak-sedikit kegiatan berbanding lurus dengan tebal-tipis pendapatan.

Tak ingin situasi berlarut-larut, Made memulai transformasi dengan menjalankan misi pertama: penyederhanaan administrasi kegiatan melalui jaringan digital. Pada 9 Maret 2020, ia meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perjalanan Dinas Lembaga (SIPPeDE). Aplikasi ini memudahkan pegawai LPMP dalam pembuatan laporan perjalanan dinas. Laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dibuat secara daring (*online*). Lumayan, menghemat banyak kertas.

Melalui SIPPeDE, penugasan perjalanan dinas diatur dan akan mudah terlihat pegawai yang banyak dan belum bertugas. "Jadi kita atur sesuai kompetensi juga," ungkap Made.

Selain membuat sistem secara digital, Made juga merotasi pegawai. Pegawai yang menetap lama di satu seksi dipindah ke seksi lain. Tak ada pegawai yang melekat di satu seksi. Made ingin mengubah pandangan pegawai bahwa mereka tidak bekerja untuk suatu seksi melainkan untuk LPMP.

Pegawai yang sering lembur juga 'kena sasaran'. Made melihat lembur tidak efektif. Kadang pekerjaan menumpuk di satu orang, sementara yang lain tidak bekerja. Problemnya, yang terbiasa tidak bekerja diam saja. Dampaknya, yang memegang banyak pekerjaan terpaksa lembur.

Prosedur Operasional Standar kemudian disederhanakan. Pekerjaan terbagi rata di antara para pegawai. Akhirnya, pegawai jarang lembur. "Teman-teman yang lembur, kan, punya anak dan keluarga di rumah." Situasi ini menjadi bekal bagi Made dalam menyongsong perubahan nomenklatur LPMP menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Perubahan ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan tertanggal 21 Maret 2022.

Secara struktur, Made mengadopsi model yang diterapkan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. "Kalau di pusat ada PDM 01 menangani PSP, di Bali ada BPMP Bali 01 menangani PSP juga. Jadi persis sama dengan Pusat," ujarnya. Selain itu, untuk memudahkan advokasi ke Pemda, ia membuat sistem perwalian masing-masing kabupaten.

Pada sistem perwalian berbasis kabupaten ini, setiap kabupaten dikoordinatori oleh seorang wali/pegawai BPMP. Di dalam satu perwalian tersebut terdapat penanggung jawab program prioritas Kemendikbudristek. Tim perwalian inilah yang mengawal semua Kebijakan Merdeka Belajar kepada Pemda (Pemda). Sinergitas ini, kata Made, akan memudahkan Pemda memahami KMB. *

SIAP MITIGASI, SUKSES ADVOKASI

Pergantian pejabat di daerah begitu cepat. Perlu mitigasi dan perencanaan matang agar kebijakan pendidikan yang dijalankan Pusat tetap berjalan mulus. Birokrat daerah lebih suka pendekatan informal.

(I)

PERGANTIAN jajaran pimpinan di birokrasi pemerintahan merupakan tantangan tersendiri bagi Made Alit Dwitama. Sebab, pergantian pimpinan selalu diikuti dengan perubahan kebijakan. Pergantian pimpinan ini juga menyebabkan kedekatan yang sudah terbangun akan hilang dan harus dimulai lagi dari awal. Untuk menghadapi dinamika ini, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali ini senantiasa menyiapkan mitigasi risiko advokasi Pemda.

Alit menyebut salah satu kabupaten di Bali. Sejak jadi Kepala BPMP, sudah tiga kali pergantian Kepala Dinas Pendidikan. Latar belakang kepala dinas yang terakhir ini bukan dari dinas pendidikan. Bisa dibayangkan upaya luar biasa keras yang harus dilakukan oleh kepala dinas pendidikan yang baru itu untuk memahami situasi pendidikan. Jika setelah paham yang bersangkutan diganti, hal ini menjadi tantangan baru bagi Alit. "Jadi memang saya harus advokasi berulang-ulang ya untuk membuat Beliau paham kebijakan Kemendikbudristek," ujar Alit.

I Made Alit Dwitama, Kepala BPMP Provinsi Bali.

Tantangan lainnya yaitu rangkap jabatan. Ada sekretaris Dinas Pendidikan menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) di tempat lain. Imbasnya, ia tidak bisa fokus menggarap program. Beberapa Kepala Bidangnya pun wajah baru. "Jadi kita harus mengulang lagi. Hampir sebagian besar tantangannya begitu," ungkap Alit.

Menghadapi problem tersebut, Alit menggunakan pendekatan *Design Thinking*. Di Bangli, contohnya, kabupaten yang bukan saja kekurangan sumber daya manusia pun juga kekurangan anggaran karena kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia melakukan beragam pendekatan, baik formal maupun informal. Sayangnya, ia belum bisa menggandeng mitra pembangunan karena belum ada dunia usaha/dunia industri yang masuk ke Bangli.

Saat melakukan pendekatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, Alit merasakan semangat menggebu dalam diri Kepala Dinas untuk memajukan pendidikan di Bangli. Dari beberapa kali pertemuan itu, Alit mulai memahami karakter dan pemikirannya serta tahu yang mereka butuhkan.

Alit kemudian membentuk tim di BPMP. Tim yang memang khusus bertugas untuk lebih sering mendampingi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli dalam meningkatan mutu pendidikan. "Harus lebih sering menyambangi mereka, lakukan komunikasi formal dan informal," ujar Alit kepada timnya.

Alit sudah melakukan pendekatan kepada mitra pembangunan seperti Sampoerna Foundation. Sayang, Sampoerna baru hanya menjalin kemitraan dengan Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar. Belum tertarik ke Bangli.

Hubungan dengan jajaran pimpinan Dinas Pendidikan dibangun secara egaliter oleh Alit. Tidak ada superioritas antarinstansi. Bahkan, ia kadang tak lagi memanggil Kepala Dinas Pendidikan dengan sebutan jabatan. Ia bahkan sudah terbiasa memanggil langsung namanya.

Masyarakat Bali memiliki budaya responsif. Jarang mau menyakiti pihak lain. Jika mereka tidak bisa hadir dalam pertemuan yang BPMP adakan karena kesibukan di tempat lain, itu hal wajar. Kepala Dinas Pendidikan tinggal meneleponnya, "Lit, saya *nggak* bisa datang ya. Ini banyak sekali sibuk," ujar Alit menirukan suara Kepala Dinas.

(II)

PENDEKATAN personal kepada jajaran Pemda berbeda-beda. Alit menyesuaikan diri dengan kesukaan dan hobi mereka. Dengan Bupati, ia biasa mengajaknya makan ikan bakar di warung. Dengan Kepala Dinas Pendidikan yang hobi motoran, ia juga ikut motoran. Kepala Dinas Pendidikan yang suka

I Made Alit Dwitama, Kepala BPMP Provinsi Bali (duduk pojok kanan) Foto bersama Dirjen Iwan Syahril dan Kepala BPMP Lainnya.

seni pertunjukan, Alit mendekatinya melalui cerita tentang drama.

Pendekatan advokasi informal seperti itu tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Alit sudah mengantisipasinya. Di awal tahun, ia bersama tim memetakan anggaran. Perencanaan dilakukan secara detail dan transparan. "Jadi semua orang tahu anggaran kita itu berapa untuk kegiatan advokasi ini. Siapa saja yang akan turun, kapan harus melakukannya," ungkap Alit.

Contoh pengalokasian anggaran untuk keperluan advokasi informal antara lain melalui perancangan pertemuan *Project Manajegement Office* (PMO). Rapat PMO dijadwalkan 12 kali dalam setahun. Dari 12 pertemuan itu, 6 pertemuan dirancang informal.

Pertemuan informal dengan birokrat daerah di warung makan menggunakan pola seperti kegiatan diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*—FGD) full day di hotel. Ada komponen uang konsumsi dan uang narasumber.

Pola pendekatan seperti ini terbukti efektif. Birokrat merasa nyaman. Mereka mulai memosisikan BPMP sebagai tempat berkonsultasi. Tak jarang diajak merumuskan kegiatan. Tempat bertanya tentang beragam kebijakan pendidikan. "Suatu kebahagiaan ketika kita merasa keberadaan kita dibutuhkan oleh mereka," ucap Alit.

Bupati dan Wali Kota di Bali, menurut Alit, tidak memiliki ego yang tinggi. Tak jarang ia berteleponan dengan mereka untuk berkonsultasi atau menentukan lokasi pertemuan. Asal mereka tidak sibuk, pertemuan mudah diadakan.

Mereka juga tidak terlalu ambil pusing dengan pengakuan penghargaan melalui sertifikat dan bentuk lainnya. Hubungan baik lebih diutamakan. "Mereka perlu apa kita respon dengan cepat. Itu yang sebenarnya yang lebih dipentingkan oleh mereka," ujar Alit.*

HASIL OPTIMAL
PENDEKATAN INFORMAL

Tak semua pendekatan efektif dilakukan secara formal. Diskusi santai dapat membuat orang berbagi harapan.

(I)

SUATU hari, Guritno Wahyu Wijanarko, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepulauan Bangka Belitung, menyambangi sebuah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Setelah diskusi santai ke sana-kemari, Kepala Bappeda menyampaikan curahan hati (curhat) kepadanya. Kata Kepala, ia merasa perlu melakukan pendampingan kepada Dinas Pendidikan terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mereka tidak tahu skala prioritas. Dalam menyusun suatu kegiatan, mereka tidak tahu hal yang harus dikerjakan lebih dulu. Mereka menjalankan pekerjaan tahun lalu dan direplikasi untuk tahun sekarang.

Kepala Bappeda tahu mereka harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mereka pun harus melihat dan menganalisis Rapor Pendidikan karena SPM Pendidikan berasal darinya. Keterbatasan anggaran memang menjadi problem. Namun masalah terberat adalah sumber daya manusia (SDM). "Masalah terberat sebetulnya adalah membangun suatu pola pikir yang membuatnya tahu apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan," ungkap Guritno.

Curhat orang Pemda, bagi Guritno, merupakan hal berharga yang tidak didapat dengan pendekatan formal. Ia datang ke sana untuk sekadar bertamu dan mengobrol santai. Seolah tak ada hal penting yang akan dibicarakan. Kedatangannya bukan bertujuan menyampaikan materi paparan. "Jangan sekali-kali kita menggurui orang daerah, tapi kita ajak mereka diskusi, kita ajak ngobrol gitu," ucapnya.

Menurut Guritno, mengajari Pemda adalah pola yang salah. Yang diperlukan yaitu membuka wawasan tentang kebutuhan mereka. Kita memancing mereka

agar berpikir terbuka. Misalnya, saat tahu nilai literasi daerah rendah, Guritno menunjukkan data Rapor Pendidikan lalu menanyakan pendapat Pemda. Bukan menyodorkan jawaban atas masalah yang dialami Pemda. Dengan begitu, Pemda akan berpikir untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pendekatan tersebut lebih terasa menunjukkan empati.

(II)

PADA akhirnya ini tentang posisi. Tentang trik membantu mereka menyelesaikan masalah. Tak perlu menuntut mereka harus seperti yang kita inginkan. Posisikan saja sebagai teman yang ingin membantu menyelesaikan sesuatu. "Jadi posisikan kita sebagai orang yang membantu dinas, bukan orang yang memerintahkan dinas," tutur Guritno.

Pernah, suatu ketika, BPMP, konsultan, Dinas Pendidikan, dan Bappeda berkumpul. Mencari solusi atas kondisi Pemda yang stagnan. Dimulai dengan diskusi mengenai Perencanaan Berbasis Data. "Kita ajak mereka berpikir terkait dengan Rapor Pendidikan," kenang Guritno.

Setelah peristiwa itu, Guritno mendengar kabar ada seorang pegawai Bappeda di Belitung Timur bercerita kepada temannya di Balai Guru Penggerak. Pegawai Bappeda merasa takjub karena diajak berdiskusi dengan BPMP untuk memikirkan program yang mesti dijalankan. Guritno menyimpulkan penempatan posisi UPT selaku pendamping yang tidak menggurui dapat menumbuhkan kesadaran baru di tubuh Pemda.

Kesimpulan itu, tambah Guritno, tidak bisa digeneralisasi. Tidak semua orang berpikir demikian. Tetapi, ajakan Pemda untuk mengajak BPMP berdiskusi di kesempatan mendatang menunjukkan BPMP telah menjadi mitra yang dibutuhkan.

Guritno, Kepala BPMP Provinsi Bangka Belitung

Hal ini kemudian menjadi pola Guritno dalam melakukan pendekatan kepada Pemda. Pendekatan dialog tanpa menggurui diperlukan tanpa terpaku pada bahan diskusi dalam materi paparan. Paradigma bertumbuh dan kolaboratif harus ditanamkan secara komunal, bukan individu. "Paling tidak kita mencoba membangun kerangka berpikir yang sama," ungkapnya.

Bersama Mas Menteri, Guritno saat mengikuti LDP I di Jakarta (sebelah kanan)

Perencanaan pendidikan harus didasari pada data, bukan keinginan. PBD menjadi instrumen pendukungnya. Kegiatan yang berjalan pun harus bisa diukur. "Selama ini, kan, tidak pernah diukur. Pokoknya bikin kegiatan, duit habis, ya sudah," ucap Guritno.

Perencanaan kegiatan berupa pelatihan kepada guru, misalnya, perlu melibatkan siswa selaku subjek yang menerima perlakuan. Siswa harus dipastikan menerima manfaat dari program yang dijalankan. Keberhasilan pelatihan kepada guru dilihat dari perubahan yang terjadi pada siswa.

Bekerja, tambah Guritno, bukan hanya karena adanya anggaran. Suatu program tidak berhasil bukan karena ditunjang anggaran semata melainkan niat pelaksananya. "Tanpa anggaran pun kita bisa kok bikin program," katanya.

Per Mei 2023 Guritno setahun menjabat Kepala BPMP. Ia belum tahu banyak karakter orang-orang Pemda. Oleh karena itu, ia rajin bertanya kepada pegawainya ihwal karakter dan jejaring Pemda. Dengan melakukan pemetaan dan membangun jejaring, ia tahu cara memengaruhi mereka. Beragam pendekatan informal dipilih sesuai dengan hobi dan kebiasaan orang-orang Pemda.

Guritno mensinyalir kondisi stagnan suatu daerah kadang dipengaruhi oleh potensi alamnya. Warganya dimanja dengan berbagai kekayaan alam sehingga lupa untuk membangun hal esensial yang menjamin keberlangsungan kesejahteraan yaitu pendidikan. Langkah yang perlu dilakukan adalah pendekatan empatik guna membangun kesadaran warga. "Berempati dulu. Terus membangun kepercayaan diri mereka. Supaya organisasi itu bergerak, tidak stagnan."

Guritno mengakui tujuan yang sudah direncanakan tak mudah dicapai. Perlu waktu dan kesabaran ekstra. Harus dialog dan terus mendekatkan diri dengan beragam pemangku kepentingan. Namun, satu prinsip yang membuatnya senantiasa optimis melakukan advokasi kepada Pemda, adalah pendekatan informal selalu membuahkan hasil yang optimal.

(III)

PENDEKATAN informal juga dilakukan Guritno kepada pegawai di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena menurutnya, selama ini dialog kurang dikedepankan.

Ia kemudian memberi contoh tentang kelas (*grade*) jabatan. Ada pegawai yang naik kelas jabatan namun tidak tersosialisasi sehingga menimbulkan pertanyaan bagi pegawai lain.Ia lalu memanggil dan berdiskusi dengan pegawai itu. Melalui dialog, pegawai mudah terbuka dalam menyampaikan keluh kesahnya. Pendekatan dialog inilah yang menjadi jurus sakti Guritno dalam merangkul simpati para pegawai.

Pendekatan yang sama diterapkan kepada pegawai yang bekerja di luar kantor. Ia tak segan-segan menjalin komunikasi dengan, misalnya, sopir dan tukang kebun, n*ongkrong* sambil *ngopi* dengan mereka. Dari mereka beragam informasi seputar kantor didapatkan.

Beragam informasi yang didapat dari pegawai di dalam dan luar kantor menjadi amunisi pelengkap Guritno untuk menilai kinerja seorang pegawai, selain kompetensi, tentu saja. Ketika melakukan rotasi, ia sudah mendapatkan gambaran komplet profil mereka. "Pergeseran jabatan atau pergeseran amanah itu sebetulnya belum tentu *punishment*. Bisa jadi karena dia *nggak* cocok di tempat itu. Jadi jangan dibawa baper," ujarnya.*

TAK SEKADAR MENGGANTI NAMA

Perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP menambah beban pekerjaan dan menuntut perubahan mindset.

HENDRI PUTRA tak menyangka perubahan nomenklatur itu berdampak besar. Ini tak sekadar penggantian nama! LPMP, baginya, telah menjalankan fungsi-fungsi peningkatan mutu di Kepulauan Riau. Namun, setelah berganti menjadi BPMP, tugasnya sebagai Kepala SubBagian terasa lebih berat.

Selagi bernama LPMP, tugas-tugas berjalan baik. Namun, setelah berganti menjadi BPMP, ia merasa harus bekerja lebih ekstra. Waktu 1x24 jam terasa tak cukup. Kini, strategi advokasi dan pendampingan lebih tajam menyasar pucuk pimpinan daerah seperti Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Tak cukup menyambangi Dinas Pendidikan.

"Kalau hanya mendekati kepala dinas, jika mereka tidak bisa memberikan penguatan luar biasa, tidak akan diiyakan oleh kepala daerahnya," ungkap Hendri.

Kini, strategi berubah, dan tak mudah. Advokasi lebih ditekankan agar regulasi dan kebijakan Pemda mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Beragam pendekatan dikerahkan demi mencapai tujuan tersebut. Dan, sekali lagi, ini tak mudah.

Djohan Achmadi, Kepala BPMP Provinsi Lampung.

Terlebih SDM di BPMP secara kuantitas belum memadai untuk menangani beban kerja yang baru. Enam puluh personel BPMP termasuk PNS, PPNPN, dan petugas keamanan mendapatkan penugasan tak kenal waktu.

"Pulang hari ini, besok sudah penugasan lagi," ujar Hendri. Namun, ia bersyukur, penambahan beban kerja masih tertangani dengan baik.

Senada dengan Hendri, Ahmad Junaidi, Ketua Reformasi Birokrasi BPMP Kepulauan Riau, menuturkan bahwa evaluasi-evaluasi yang menyangkut proses transformasi dilakukan mulai dari persoalan tata kelola, sumber daya manusia, akuntabilitas pengawasan, hingga pelayanan publik.

"Semua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," kata Junaidi.

Di samping itu, beban-beban kerja dapat diringankan dengan kelompok kerja yang ada. Junaidi mengaku ada empat pokja yang terbentuk, yakni Pokja 1 Kemintraan, Pokja 2 inovasi-transformasi pembelajran, Pokja 3, data, dan Pokja 4 tata kelola.

"Semua memiliki peran penting untuk menyukseskan apa yang menjadi capaian-capaian," ungkapnya.

Sementara itu, Djohan Achmadi, Kepala BPMP Provinsi Lampung, mengatakan bahwa soal SDM tak bisa ditawar lagi. Baginya, yang ada dioptimalkan.

Itulah yang Djohan Achmadi lakukan di BPMP Provinsi Lampung, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah (Kemendikbudristek) di daerah,

"Apapun yang terjadi ya harus dilaksanakan, mengikuti arahan dan instruksi dari Pusat," ucapnya.

Termasuk SDM. Mengelola SDM dan anggaran memerlukan kreativitas. Khususnya program dan kegiatan yang harus dieksekusi.

"Walaupun memang agak bertambah banyak," bebernya.

Menghadapi hal itu, Djohan mengaku tidak kewalahan.

"Ya Bismillahirrahmanirrahim sajalah!" sahut Djohan.

Beban akibat perubahan tersebut tak cukup sampai di sana. Bagi Guritno Wahyu Wijanarko, Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perubahan nomenklatur menuntut para pegawainya untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan. Tak bisa tidak.

Oleh karena itu, pelan-pelan pola pikir diubah sehingga menghasilkan kebiasaan baru. Dapat dimaklumi jika masa transisi memerlukan waktu. Namun, setelah masa itu berganti, kata Guritno, strategi transformasi internal dan advokasi Pemda harus dikuatkan.

Saat menjadi LPMP, para widyaiswara melatih guru. Bicara di depan kelas. Menjadi seorang pengajar. Kini, setelah berubah menjadi BPMP, tantangan itu berubah. Mereka menjadi widyaprada.

"Sekarang tuh tuntutannya beda. Mereka dituntut untuk melakukan analisis," tuturnya. "Mereka belum terbiasa dengan itu. Begitu kita melakukan suatu program, pasti balik lagi ke pelatihan, pelatihan, pelatihan."

Hal itu terjadi karena selama ini pola kerja yang berlangsung adalah menerima saja apa yang disampaikan oleh Pusat. Tak perlu sentuhan kreativitas untuk penyesuaian dengan situasi yang tengah berkembang. "Mengubah mindset bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam satu-dua bulan," tegasnya.

Oleh karena itu, pelan-pelan pola pikir diubah sehingga menghasilkan kebiasaan baru. Dapat dimaklumi jika masa transisi memerlukan waktu. Namun, setelah masa itu berganti, kata Guritno, strategi transformasi internal dan advokasi Pemda harus dikuatkan.

Guritno percaya dengan kekuatan SDM. Seberat apa pun tugas yang diemban akan terasa ringan jika ditangani oleh SDM mumpuni. "Tapi seringan apapun tugas kalau SDM-nya tidak mumpuni ya jadi berat," katanya.*

CARA MUDAH DEKATI KEPALA DAERAH

Ada beragam cara untuk mendekati kepala daerah. Pendekatan informal lebih efektif daripada pendekatan formal.

POLITIK. Made Alit Dwitama menilai pendekatan kepada kepala daerah juga harus mempertimbangkan unsur politik. Kepala daerah diangkat melalui proses politik dan melibatkan partai politik. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali ini percaya jalur politik turut memengaruhi prioritas seorang kepala daerah dalam menentukan kebijakan. Ia telah membuktikannya.

Di daerah, mitra politik seorang Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia memasukkan agenda pertemuan dengan anggota DPRD dalam proses advokasi Pemda. Pendekatan ke mereka juga dimulai dengan pemetaan hobi dan kesukaan, dilanjutkan dengan pertemuan informal. Setelah dekat secara individual, penyampaian maksud advokasi terhadap kepala daerah menjadi lebih mudah.

Bertemu dengan kepala daerah gampang-gampang susah. Padatnya agenda Gubernur/Bupati/Wali Kota memaksa mereka menyeleksi pihak-pihak yang ingin beraudiensi dengannya. Ada skala prioritas. Jika kepentingan BPMP kepada Guernur/Bupati/Wali Kota disampaikan langsung oleh anggota DPRD yang merupakan rekan politik Kepala Daerah, semuanya akan lebih mudah. Mereka mungkin akan membatalkan sejumlah pertemuan dengan pihak lain dan memprioritaskan pertemuan dengan BPMP. “Politik itu penting. Pengaruhnya luar biasa,” kata Alit.

Kesadaran itu merembet kepada stafnya. Kini pertemuan dengan anggota Dewan tak melulu melibatkan dirinya. Ia mendelegasikannya kepada mereka. Mereka sudah percaya diri jika bertemu langsung dengan anggota Dewan. “Jadi, sekarang teman-teman sudah terbiasa berrtemu dengan DPRD,” ucapnya.

Jika Alit menggunakan pendekatan politik, Djohan Achmadi, Kepala BPMP Provinsi Lampung, menggunakan pendekatan kekerabatan. Djohan bercerita

Para Kepala BPMP foto bersama Iwan Syahril, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen.

saat ia menjabat Kepala BPMP Provinsi Bengkulu. Saat itu, sebelum berkirim surat ke Bupati, ia mengumpulkan staf.

"Ayo teman-teman, siapa yang kenal Bupati A, Bupati B, atau Bupati C?" ujar Djohan, menirukan percakapan dengan para pegawainya.

"Oh, ya, kami!" Seorang staf, kerabat seorang bupati angkat suara.

Akhirnya pertemuan dengan bupati yang dituju terjadi. Tidak makan banyak waktu. Bertemu beberapa sejumlah kepala daerah tanpa melalui jalur birokrasi melainkan jalur keluarga, menurutnya, sangat efektif. "Malah itu jauh lebih cepat. Bisa dalam dua hari ketemu Pak Bupati," ungkap Djohan.

Saat bertemu Bupati, Djohan menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana urgensi dan manfaat Program Sekolah Penggerak (PSP). Dialog dilanjutkan dengan penyampaian harapan dukungan dari Bupati. "Itu seru juga. Pak Bupati sampai terus tanda tangan MoU," kenang Djohan. Sosialisasi dan advokasi program-program prioritas Kemendikbudristek cepat dilakukan dengan pendekatan ini.

Pendekatan memangkas birokrasi juga turut memangkas aspek prioritas (*priority*). Dalam melakukan eksekusi terhadap sejumlah surat audiensi, tentu bupati turut mempertimbangkan unsur kedekatan personal. Pemohon audiensi dari unsur keluarga dan teman satu organisasi biasanya lebih diprioritaskan ketimbang pemohon dari instansi struktural tak dikenal.

Djohan juga mempertimbangkan pendekatan hobi dan olahraga kepala daerah. Bupati Mesuji, Lampung, misalnya, berasal dari latar belakang pendidikan. Fokus pembangunan daerah tentu melalui bidang pendidikan. Ia senang olahraga, jalan-jalan, dan organisasi. "Kita coba sesuaikan," kata Djohan. Ia memilih pendekatan informal untuk mendekati Bupati.

Lebih berhasil mana antara pendekatan informal dan formal? Djohan tidak melihat berhasil atau tidak berhasil, melainkan cepat atau lama. Sebab, di kamusnya tak mengenal istilah 'gagal'. Ia menjalankan dan membandingkan pendekatan keluarga dan birokrasi yang digunakannya. Pendekatan kepada gubernur dilakukan secara formal. Jalur birokrasi murni. Akibatnya, urusannya panjang. Berbeda dengan pendekatan keluarga yang tercapai di hitungan hari.

Guritno Wahyu Wijanarko, Kepala BPMP Kepulauan Bangka Belitung, memilih pendekatan komunikasi. Pola komunikasi terhadap birokrat daerah berbeda-beda. Kepada Kepala Dinas Pendidikan yang lebih banyak berada dalam tataran kebijakan, ia tak menempatkan diri sebagai pemangku yang membawa banyak konsep. "*Power point*-nya tidak usah banyak-banyak," ujarnya. Khawatir Sang Kepala Dinas merasa digurui.

Dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pun, setelah memetakan profilnya, ia tidak menggunakan bahan paparan saat bertemu. Ia cukup berbincang dengannya. Setelah 'memancing', tahu keluhan, dan dengar harapannya, ia segera pergi dengan segudang rencana.*

LANJUT STUDI
TINGKATKAN PERCAYA DIRI

Banyak cara meningkatkan kapasitas pegawai. Salah satunya dengan mendorong mereka melanjutkan studi. Sinar Alam melakukannya.

Rabu malam, 6 September 2023. Langit Palu begitu cerah. Dengan setelan kaus merah 'Merdeka Berpikir', celana jins belel biru, dan topi krem yang tak pernah beringsut dari kepalanya, Sinar Alam duduk santai menghadap meja. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah itu tak pernah melepas senyum kala bicara. Malam itu, di café tengah kota yang sebentar lagi tutup, ia mengurai pengalaman. Cerita tentang transformasi di Lembaga yang dipimpinnya.

Bagi Sinar, paling susah mengubah orang. Paling mudah mengubah fisik kantor. Ia mengalami sendiri. Sebelum menjabat Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, ia telah mengubah drastis fisik kantor LPMP Provinsi Sulawesi Barat. Itu saat ia menjabat Kepala di sana. Semua beres dengan uang.

Namun Sinar sadar, perubahan fisik kantor tak berbanding lurus dengan perubahan penghuninya. Sesuatu yang menurutnya paling susah dilaksanakan. "Mendorong staf kita untuk mau belajar, mau mengembangkan diri, itu yang paling inti," ucapnya. "Transformasi itu harus dari sana."

Sinar Alam,
Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah.

Keyakinan itu dijalaninya. Transformasi organisasi, baginya, tidak dimulai dari program, melainkan Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai minimal punya rasa percaya diri. Percaya diri untuk tampil di hadapan pemangku kepentingan.

Salah satu upaya Sinar untuk membangun rasa percaya diri pegawainya adalah dengan menumbuhkan semangat belajar dalam diri mereka. Mendorong mereka kembali mendalami keterampilan yang relevan dengan kebutuhan. "Kita tidak akan pernah memberi, menghasilkan kinerja yang bagus, kalau mereka tidak dikembangkan," ujarnya.

Sinar kemudian mendorong pegawainya untuk melanjutkan studi atau kursus.

Penumbuhan semangat belajar terkondisikan jika pegawai melanjutkan studi. Oleh karena itu, Sinar mendorong para pegawai untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Minimal S-2. Ia pun merekomendasikan lokasi perguruan tinggi yang dipilih pegawainya berbeda dengan perguruan tinggi saat menempuh S-1. Lokasi belajar baru memberi pengalaman yang berbeda.*

"Mendorong staf kita untuk mau belajar, mau mengembangkan diri, itu yang paling inti."

TAK LENGAH
DI TENGAH POLITIK DAERAH

Bukan rahasia bahwa kontestasi politik di daerah sering menyentuh ranah sekolah. BPMP dituntut cerdas 'mengamankan' KMB.

BERSERAGAM batik warna-warni, Muhammad Askari duduk menghadap keempat tamunya: tiga dari Jakarta dan satu stafnya. Teh kotak dan sejumlah air mineral tersaji di atas meja.

Selasa siang, 16 Mei 2023, raut wajah mantan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah itu tampak sedikit gusar. Situasi politik Sultra sedang tidak baik-baik saja. Ia baru saja menerima telepon dari rekan di Jakarta, mengabarkan bahwa terjadi kesalahan analisis terhadap kriteria penerima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek. Intinya: Gubernur Sultra batal menerima anugerah itu. Padahal dua minggu lagi acara itu dihelat di Candi Prambanan, D.I. Yogyakarta.

Askari sudah menduga sebelumnya. Ia telah mengerahkan segenap kemampuan untuk mencegah pelanggaran itu. Namun, di daerah, politik bisa mengubah apa saja. Gubernur menandatangani Surat Keputusan Nomor 231 Tahun 2023 tentang pengangkatan Kepala Sekolah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra. Problemnya, pada SK Gubernur itu, Kepala Sekolah pelaksana PSP kena imbas pencopotan. Ini menyalahi Peraturan Mendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Komitmen Gubernur untuk tidak mengganti Kepala Sekolah pelaksana PSP pun tercoreng.

Muhammad Askari, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Askari tahu motif kebijakan itu yang, tentu saja, mengerucut pada satu kesimpulan: politik. Penggantian kepala sekolah, di daerah mana saja, dipengaruhi oleh dukungan politik dan proses politik berikutnya. Namun, sebagai perwakilan Pusat di daerah, Askari berusaha netral. Ia tak mau terlibat jauh dalam sengkarut perpolitikan daerah. BPMP terus menyosialisasikan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021."Walaupun daerah memahami, tapi di lapangan itu cukup sulit," ujarnya.

Melakukan pemetaan perilaku Pemda, bagi Askari, sangat penting. Terlebih di tengah situasi dinamika Pilkada dan Pilpres. Dengan bekal materi *Social Style* dan *Power Map* dari *LDP*, Askari dan pegawainya optimis berhasil melakukan advokasi.

Bersama tim BPMP, Askari tetap mendorong Pemda untuk menerbitkan Perda. Dikawalnya sejumlah Pemda Kabupaten/Kota untuk menyusun regulasi. Payung bagi KMB. Prioritas pada tiga kebijakan: PSP, IKM, dan PBD.

Hasilnya, setelah melalui proses pemetaan yang panjang, dari 15 kabupaten dan 2 kota di Sultra, ditetapkan sejumlah daerah yang akan didorong untuk menerbitkan Perda. Hingga akhir Oktober 2023, ada 9 Pemda yang sudah menerbitkan Perda berupa Perwali dan Perbup. Kesembilan Pemda itu yaitu Kota Baubau, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Langkah awal yang dilakukan terhadap mitra Pemda yaitu membangun komitmen mereka. BPMP melakukan asesmen ihwal kebersediaan Bupati/Wali Kota memenuhi komitmen. "Saat ini sedang berproses dan mengantisipasi dari masa transisi ini. Ini tentu sangat besar dinamika politiknya," ungkap Askari.*

Dengan bekal materi Social Style dan Power Map dari LDP, Askari dan pegawainya optimis berhasil melakukan advokasi.

LEADERSHIP
IS PAINFUL. LEADERSHIP
HARUS MEMBAWA PERUBAHAN,
DAN SEORANG LEADER ITU

HARUS BERANI MENGAMBIL RISIKO

NADIEM ANWAR MAKARIM MENDIKBUDRISTEK

BAGIAN IV

REFLEKSI

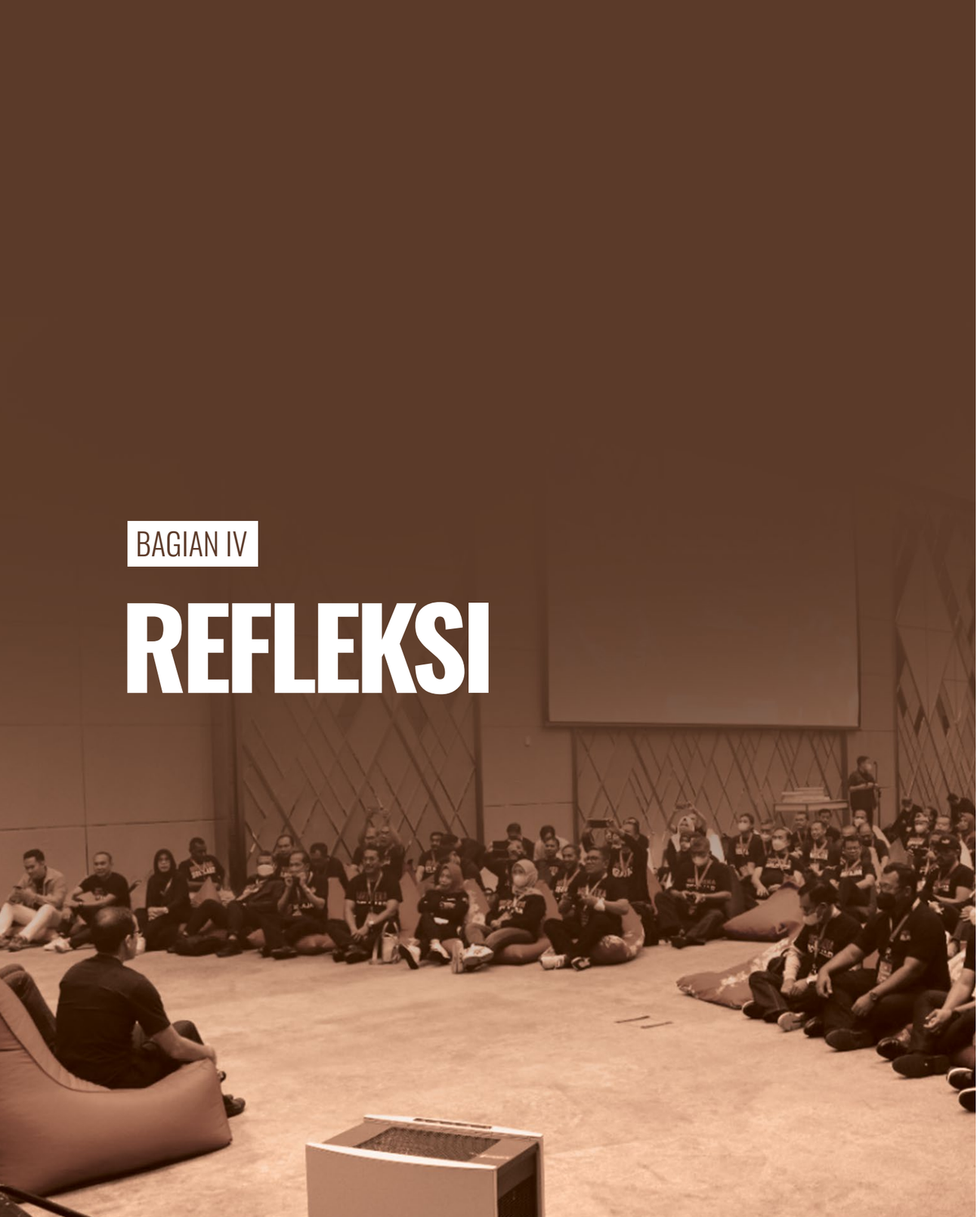

MENTORING, UPAYA MENINGKATKAN ADVOKASI

Mentoring para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen merupakan sebuah upaya berempati kepada kinerja Kepala BBPMP/BPMP, sekaligus dorongan meningkatkan kinerja mereka.

JUM'AT pagi, medadak ada pesan masuk di Aplikasi WA saya. "Mas, posisi ada di manakah? Dengan Pak Hasbi ini," demikian isi pesannya. Seketika saya kaget, mengingat yang mengirim pesan adalah orang nomor satu di Direktorat Sekolah Dasar.

"Alhamdulillah, ada di lantai 14 gedung E Pak," jawab saya seketika.

Singkat cerita, saya diminta untuk hadir dalam sebuah rapat yang di antara pembahasannya adalah upaya memotret kinerja PDM-05 Kemitraan Daerah selama tahun 2023.

Muhammad Hasbi,
Direktur SD sekaligus Supervisor PDM-05 Kemitraan Daerah.

"Program mentoring ini banyak membantu teman-teman untuk meningkatkan kualitas advokasi di daerah. Mereka jadi tahu, harus bagaimana menghadapi pemerintah daerah yang memiliki beragam karakter."

Usai rapat, Muhammad Hasbi, Direktur SD sekaligus Supervisor PDM-05, mengatakan bahwa PDM-05 senantiasa berempati kepada seluruh Kepala BBPMP/BPMP di 34 provinsi Indonesia, dan senantiasa berupaya membantu mereka dalam peningkatan kompetensinya seiring perubahan tugas dan fungsi BBPMP/BPMP, yang saat ini fokus melaksanakan advokasi KMB kepada Pemda.

Selain itu, ada juga mentoring para pejabat eselon II kepada Kepala BBPMP/BPMP di 34 provinsi Indonesia, sebagai bentuk empati sekaligus motivasi meningkatkan kinerja mereka.

"Program mentoring ini banyak membantu teman-teman untuk meningkatkan kualitas advokasi di daerah. Mereka jadi tahu, harus bagaimana menghadapi pemerintah daerah yang memiliki beragam karakter," kata Hasbi di ruang kerjanya yang terletak di Gedung E Lantai 18, Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta.

Mentoring para pejabat eselon II tersebut, berdasarkan instruksi Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Iwan Syahril, dan dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2023.

Lokasi mentoring masing-masing pejabat eselon II di lingkungan Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen adalah sebagai berikut: Direktur PAUD melakukan mentoring kepada BBPMP Jawa Tengah, BPMP Aceh, BPMP Kalimantan Utara, BPMP Sulawesi Tenggara, dan BPMP DI Yogyakarta.

Direktur SMP kepada BBPMP Sulawesi Selatan, BPMP Kep. Bangka Belitung, BPMP DKI Jakarta, BPMP Kalimantan Timur, BPMP Riau, dan BPMP Sumatera Selatan.

Direktur SMA kepada BPMP Sulawesi Utara, BPMP Lampung, BPMP Maluku, BPMP Maluku Utara, BPMP Papua, dan BPMP Sulawesi Tengah.

Direktur PMPK kepada BBPMP Jawa Barat, BPMP Gorontalo, BPMP Bali, BPMP Bengkulu, BPMP Kalimantan Barat, dan BPMP Nusa Tenggara Barat.

Muhammad Hasbi ketika mendampingi peserta LDP II di Hotel Mercure Batavia Jakarta.

Sekretaris Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen kepada BPMP Papua Barat, BBPMP Jawa Timur, BBPMP Sumatera Barat, BPMP Kalimantan Tengah, dan BPMP Banten.

Sementara itu, Hasbi selaku Direktur SD, memperoleh tugas mentoring kepada BPMP Kalimantan Selatan, BPMP Kepulauan Riau, BPMP Nusa Tenggara Timur, BPMP Jambi, BPMP Sulawesi Barat, dan BPMP Sumatera Utara.

"Semua berkesan. Tapi kalau boleh menceritakannya, saya kagum pada BPMP Sumatera Utara. Karena sebenernya, Pak Irwan Syafii (Kepala BPMP Sumatera Utara, red) itu setahun lagi pensiun. Tapi saat saya mentoring, beliau tidak memperlihatkan sebagaimana orang yang akan pensiun," cerita Hasbi.

"Tetap saja kinerjanya bagus, program-programnya bagus, hubungan dengan pejabat daerah bagus, itu yang membuat saya kagum pada beliau," tambahnya.

Kekaguman Hasbi juga ditujukan pada Herdiana, Kepala BPMP Nusa Tenggara Timur.

"Walaupun masih 3 bulan, dia sudah berhasil ngumpulin gubernur dan bupati se-NTT untuk diajak MoU mengenai pengangkatan guru penggerak menjadi kepala satuan pendidikan. Itu berat lho. Itu tantangan, yang menurut saya sangat berat."

"Walaupun masih 3 bulan, dia sudah berhasil *ngumpulin* gubernur dan bupati se-NTT untuk diajak MoU mengenai pengangkatan guru penggerak menjadi kepala satuan pendidikan. Itu berat *lho*. Itu tantangan, yang menurut saya sangat berat," kata Hasbi.

"Kenapa? Karena bupati dan gubernur tanda tangan bahwa mereka bersedia mengangkat guru penggerak menjadi kepala satuan pendidikan atau pengawas sekolah. *Matches* dengan prgram utama Mas Menteri," tegasnya.

Meski demikian, Hasbi juga memberikan informasi bahwa mereka masih mengalami tantangan dalam menjalankan advokasi KMB.

"Kalau *struggle* itu pasti. Tapi hanya bagian -bagian tertentu. Dan itu wajar, karena kan selalu ada tantangan dalam melakasnaakan tugas," ujarnya.

Hasbi melanjutkan bahwa di antara tantangan Kepala BBPMP/BPMP adalah sikap apriori dari pemerintah daerah.

"Itu yang kadang-kadang sangat menantang. Bagaimana kemudian kita membalikkan keadaan; dari arpirori, tidak mau tahu, menjadi mendukung, atau bahkan merasa memiliki. Itu tantangan advokasi," pungkasnya.*

MENGUJI KEPEMIMPINAN, MENGUKIR PERUBAHAN

Kebijakan Merdeka Belajar sejak awal direncanakan berbentuk gerakan yang melibatkan banyak pihak, kolaboratif, dan terukur. Meskipun demikian, fokus perubahan terletak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan.

(I)

BERULANG kali Nadiem Anwar Makarim mengulas senyum. Di hadapannya, 74 Kepala UPT menatapnya dengan penuh semangat. Berkaus hitam bertuliskan Merdeka Belajar, ia menyendarkan bahunya dengan santai ke punggung sofa merah. Wajahnya tergurat ceria kala Iwan Syahril, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, bertanya kepadanya tentang makna kepemimpinan (*leadership*).

"Berat sekali pertanyaan ini," kata Nadiem dengan senyum lebar. Kaki kirinya masih menyilang di atas kaki kanan. Para peserta *Leadership Development Program I*, di Pondok Indah Jakarta Selatan pada 13 Desember 2022 itu, menyimak khidmat di sofa masing-masing.

Nadiem memulai cerita. Suaranya datar dan agak melengking. Mayoritas pembelajarannya, katanya, berasal dari krisis dan kegagalan. "Saya hampir tidak belajar apapun dari kesuksesan atau pencapaian saya," ungkapnya. Ia banyak belajar dari situasi menantang dan kesusahan karena dari sanalah kesadaran untuk berkembang menyapa batinnya.

Kepemimpinan sejati, bagi Nadiem, sangat menyakitkan (*painful*). Tak ada kepemimpinan yang signifikan membawa perubahan tanpa diiringi rasa sakit. "*Leadership is painful* dan memang seharusnya *painful* karena itu satu-satunya hal yang akan membuat kita tumbuh sebagai pemimpin," katanya.

Itu sinyal kuat dari Nadiem yang ditujukan kepada para Kepala UPT. Gerakan Merdeka Belajar tak akan mudah dijalankan. Selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Dan, situasi itulah yang memang dialami oleh para Kepala UPT. Transformasi internal dan advokasi Pemerintah Daerah (Pemda) tak semudah

Dari kiri:
Febry H.J. Dien, Kepala BPMP Sulawesi Utara, yuli Haryanto, Kepala BPMP Kalimantan Selatan, dan Warsita Kepala BPMP Kepulauan Riau.

membalik telapak tangan. Cucuran peluh dan tetesan air mata tersimpan rapat di kelopak mata para Kepala UPT. Mereka saksi hidup begitu dinamisnya perubahan daerah yang harus ditaklukkan.

(II)

TENTU saja kadarnya berbeda-beda. Semua Kepala UPT pasti telah merasakannya. Rasa sakit, sebagaimana Nadiem pernah dan sedang rasakan, menjadi prasyarat tak terbantahkan bagi seorang pemimpin. Transformasi di tubuh BBPMP/BPMP bukan hal mudah. Advokasi Pemda bukan pekerjaan satu malam.

Cobalah simak dan rasakan kisah sejumlah Kepala UPT ini. Mereka menghabiskan waktu, tenaga, dan harta. Menekan perasaan, mengobral empati, dan menahan marah. Frustasi, emosi, dan sakit hati dipendam dalam-dalam di sanubari. Senyum, tawa, dan gembira dipajang lama-lama. Mereka melakukan itu semua demi perubahan di daerah demi Gerakan Merdeka Belajar!

Warsita, Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau, sampai mendaki Gunung Daik demi meraih dukungan Bupati Lingga. Gunung tertinggi di Kepulauan Riau setinggi 1.165 meter di atas permukaan laut itu hanya bisa ditaklukkan dengan keahlian seorang pemanjat tebing. Hasilnya luar biasa. Tiap tahun alokasi anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Lingga terus meningkat.

Muslihuddin, Kepala BPMP Provinsi Aceh, yang rela menempuh jarak 250 kilometer selama 9 jam demi mencangkul di ladang bersama Bupati Aceh

Dari kiri:
Muslihuddin, Kepala BPMP Aceh (saat ini Kepala BBPMP Sumatera Barat), Nugraheni Triastuti, Kepala BBPMP Jawa Tengah, dan Jarwoko, Kepala BPMP Kalimantan Utara

Barat Daya yang juga eks anggota Gerakan Aceh Merdeka. Ia pun menyulap kantin menjadi warung kopi agar para pegawainya betah di kantor. Sebanyak 21 kabupaten/kota di Aceh disambanginya demi bercakap langsung dengan pimpinan daerah dan menyampaikan kebijakan prioritas Pusat.

Jarwoko, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, harus sabar menghadapi kenyataan saat kali pertama menjabat. Tak punya staf, anggaran, aset, dan kantor. Selanjutnya melewatkan malam di warung kopi dan tempat karaoke demi sedikit perbincangan informal dengan pejabat Pemda. Ia menjalaninya dengan penuh ketelatenan hingga kini.

Nugraheni Triastuti, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, harus ekstra sabar menghadapi ulah dan permintaan pegawainya saat integrasi LPMP dan BP PAUD dan Dikmas. Ia juga mesti super tegar saat diabaikan pegawai lantaran kebijakan pemangkasan pejabat yang meniadakan eselonisasi.

Akhirnya, kerja keras tak bisa bohong. Mereka mulai memetik hasil. Memanen kesuksesan. BPMP menjadi partner, konsultan, dan teman berbagi bagi Pemda. Apapun pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program pendidikan, BPMP selalu dilibatkan dan dijadikan tempat bertanya.

Taktik dan strategi Kepala UPT pun diuji. Adaptasi terhadap dinamika daerah, yang sering dibumbui aroma politik lokal, dihadapi dengan siasat yang cerdas. Slogan 'Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi' tak sekadar pemanis bibir, melainkan kata kunci membuat perubahan.

Warsita menemui para Tokoh Masyarakat Melayu yang nasihatnya didengar oleh para kepala daerah. Jarwoko menemani aparatur minum saraba di kedai kopi. Muslihuddin menggunakan pendekatan informal berbasis kearifan lokal kepada kepala daerah. Yuli Haryanto, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, membuat acara bersama anggota DPRD agar mudah menghubungi Gubernur. Febry H.J. Dien, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara, memberi penghargaan kepada seluruh Bupati/Wali Kota atas dukungan terhadap kebijakan Pusat.

Akhirnya, kerja keras tak bisa bohong. Mereka mulai memetik hasil. Memanen kesuksesan. BPMP menjadi partner, konsultan, dan teman berbagi bagi Pemda. Apapun pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program pendidikan, BPMP selalu dilibatkan dan dijadikan tempat bertanya.

(III)

FEDDY DJUNAEDI, Tim Staf Khusus Menteri, melihatnya sebagai proses. Belum semua UPT, dalam kacamatanya, telah bertransformasi secara utuh. Transformasi bukan pekerjaan mudah, begitu pula advokasi Pemda. Semua dipengaruhi oleh potensi SDM masing-masing UPT dan dinamika daerah. "Ada yang cepat, ada yang butuh waktu lama," ujarnya. "Jadi apa yang sudah dilakukan oleh UPT yang sudah bertranformasi dengan baik, menurut kita sudah bagus ya."

Feddy Djunaedi, Tim SKM.

Menurut Feddy, waktu tidak berpihak kepada Kemendikbudristek. Peningkatan kapasitas SDM dan upaya advokasi Pemda mesti berjalan bersamaan. Tidak bisa menunggu SDM siap baru melakukan advokasi. Ia hanya memastikan program peningkatan SDM seperti LDP akan terus dilakukan.

Dengan begitu, kesan selama ini UPT sebagai pengantar surat berubah menjadi pemecah masalah (*problem solver*).

Sebagai pemecah masalah, tambah Feddy, bukan saatnya lagi UPT meminta arahan dan menunggu petunjuk teknis (Juknis). Ketika terjadi kebuntuan di daerah, UPT dituntut mampu mencari solusi. Materi penguatan yang disampaikan dalam LDP menjadi bekal kuat bagi UPT untuk menghadapi beragam persoalan di daerah.

Feddy melihat program penguatan kapasitas Kepala UPT seperti LDP telah menunjukkan dampak baik. Tak ada lagi yang mengambinghitamkan organisasi tertentu dan meminta arahan pimpinan. Mereka berani mengambil keputusan sendiri. "Jadi yang penting itu perubahan perilaku. Oleh karena itu, perubahan mindset itu yang kita hargai," ucapnya.

Kesuksesan paling dasar yang dinilai berhasil, menurut Feddy, adalah jika semua UPT mulai sadar mengenai Tusi dan paradigma baru. Tranformasi UPT dipandang berhasil jika Pemda yang diadvokasi mendukung program Kemendikbudristek melalui pengalokasian anggaran di APBD, penerbitan Perda, dan mengerahkan SDM Pemda untuk melakukan kegiatan tersebut.

Satu hal yang masih menantang, bagi Feddy, terkait dengan *Project Management Office* (PMO). Keberadaan PMO ditujukan untuk memastikan

Kepala UPT Kemendikbudristek serius menyimak arahan Mas Menteri tentang kepemimpinan pada kegiatan LDP I di Jakarta.

perubahan berjalan sesuai perencanaan. Ia seperti satuan tugas yang mengawal perubahan yang dikehendaki. Bentuk kegiatannya antara lain menyusun *Project Charter*; membuat *Project Plan*; menggelar pertemuan rutin untuk memonitor pencapaian, tantangan, dan risiko; serta pencanangan tindak lanjut.

Namun, sayang, kegiatan PMO masih terlihat administratif. Pertemuan antarpihak dilihat sekadar pertemuan semata. Padahal, yang terpenting adalah tindak lanjut dari pertemuan itu, sehingga masalah yang dibahas pada pertemuan itu tidak muncul lagi pada pertemuan berikutnya.

Perencanaan kerja menggunakan Aplikasi Microsoft Project juga kurang diperbarui (*update*). Ia berharap Microsoft Project dipakai sebagai laporan Kepala UPT. Laporan kerja tidak dibuat dalam bentuk paparan *Powerpoint* dan *Excel* yang terpisah. "Itu akan memaksa yang di bawah untuk menggunakan *tools* yang sudah ada," kata Feddy.

Kendati pemanfaatan aplikasi itu masih kurang, Feddy angkat jempol dengan pola kerja PMO. Para pemangku tidak lagi bekerja sendiri-sendiri dan tidak terkotak-kotak. Mereka sudah bisa bekerja sama. "Tidak hanya UPT, di Pusat pun kerjanya sudah lintas unit utama," ucapnya bangga. Ia mencontohkan

Tranformasi UPT dipandang berhasil jika Pemda yang diadvokasi mendukung program Kemendikbudristek melalui pengalokasian anggaran di APBD, penerbitan Perda, dan mengerahkan SDM Pemda untuk melakukan kegiatan tersebut.

LDP dilaksanakan secara bergiliran antara Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen; Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan; dan Ditjen Vokasi.

Di UPT sendiri, kebijakan PMO beragam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. "Ada UPT yang per kabupatan/kota dipegang satu orang, yang harus menguasai semua kebijakan yang ingin dijual. Ada UPT yang satu orang spesialis untuk satu kebijakan dan harus bisa ke semua daerah. Ada pula yang kombinasi keduanya," rinci Feddy.

Feddy menegaskan arah Kebijakan Merdeka Belajar. Dengan jumlah episode yang terus bertambah, sasarannya hanya satu yaitu peningkatan kualitas sekolah melalui transformasi pembelajaran.

Episode KMB pun jangan dimaknai sebagai kebijakan yang harus diterapkan serentak di semua satuan pendidikan. Program Sekolah Penggerak (PSP), misalnya, didesain untuk diterapkan ke sebagian kecil sekolah, tidak sampai 20%. "Kalau yang kecil itu bisa menggerakkan dan mengimbas ke yang lain, semuanya bisa bergerak," jelas Feddy.

Feddy berharap para pemangku kepentingan merasakan nilai tambah UPT. UPT menjadi pihak pertama yang diingat, dimintai tolong, dan dimintai nasihat terkait peningkatan pendidikan di daerah. "Kehadirannya di daerah betul-betul menjadi partner yang diingat dan selalu diandalkan oleh Pemda," ucapnya.*

Sebuah Penghargaan untuk UPT Penggerak

LAGU ini dipersembahkan kepada para Kepala dan pegawai Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Sebentuk kecil penghargaan atas dedikasi mengemban amanah menjalankan transformasi dan advokasi Pemerintah Daerah (Pemda). Dedikasi atas jerih payah, pengorbanan, dan keteguhan dalam memperjuangkan Kebijakan Merdeka Belajar.

Merdeka Belajar adalah mimpi yang dibangun oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Sesuatu yang tak mudah dicapai. Namun, dengan keyakinan kuat, ia mencoba mewujudkan mimpi itu.

Tujuan utamanya adalah membangun manusia merdeka. Manusia yang berbudaya Pancasila. Dengan membangkitkan raga, rasa, dan karya yang terkandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila, mimpi membangun manusia merdeka akan tercipta.

Kondisi yang diinginkan adalah sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Ramah kepada mereka. Memperhatikan minat dan kebutuhan mereka. Serta tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dengan begitu, anak-anak dapat belajar dengan penuh semangat, pantang menyerah, dan tak kenal lelah sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Akan tetapi, tentu saja itu bukan perkara mudah. Banyak tantangan dan aral melintang. Namun, dengan berbagi masalah dan bahagia serta dengan gerak bersama, setiap tantangan pasti akan mudah dihadapi..

Apa pun kondisinya, Kepala dan pegawai BBPMP/BPMP tetap mendengar dengan empati; mencoba merasakan yang dihadapi oleh Pemda, masyarakat, dan warga sekolah; bekerja sepenuh hati, penuh percaya diri, dan tanpa pamrih; dan menjadi mitra, konsultan, dan teman curhat bagi mereka kapan pun dan dimana pun.

Tujuan besar itu dihimpun dalam sebentuk mimpi dan menjadi milik bersama semua pemangku kepentingan, Pemerintah, Pemda, masyarakat, dan orang tua. Mimpi itu hanya dapat diwujudkan dengan bergerak bersama dan memperjuangkan perubahan dalam bingkai Merdeka Belajar.*

Duta Merdeka Belajar

lirik : Billy Antoro/Feddy Djunaedi/ Budi Priantoro
Arransemen : Ismail Ulak (Prodigies)

Mari wujudkan mimpi kita
Bersama kita pasti bisa
Kutahu ini takkan mudah
Tapi ku yakin kan tercipta

Bangun manusia merdeka
Berbudaya Pancasila
Bangkitkan raga, rasa, dan karsa
Agar mimpi tercipta

Reff I:
Sekolah aman dan nyaman
Ramah anak tiada perbedaan
Belajar penuh semangat
Menjadi pelajar sepanjang hayat

Reff II:
Itulah mimpi kita
Mlari wujudkan bersama
Berjuang untuk berubah
Serentak wujudkan Merdeka Belajar!

Coda I:
Masalahmu masalahku
Senyummu kebahagiaanku
Bersama hadapi setiap tantangan
Demi masa depan

Coda II:
Mendengar dengan empati
Bekerja Sepenuh hati
Menjadi duta penuh solusi

Reff I:
Sekolah aman dan nyaman
Ramah anak tiada perbedaan
Belajar penuh semangat
Menjadi pelajar sepanjang hayat

Reff II:
Itulah mimpi kita
Mlari wujudkan bersama
Berjuang untuk berubah
Serentak wujudkan Merdeka Belajar!

Merdeka Belajar!
Merdeka Belajar!
Merdeka Belajar!

TAUTAN
VIDEO DUTA
MERDEKA BELAJAR
Scan me

KEAMANAN, KENYAMANAN, DAN KEBAHAGIAAN MURID SELAMA PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN ADALAH TUJUAN MERDEKA BELAJAR

Daftar Narasumber

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	TEMPAT/MEDIA
1	Nadiem Anwar Makariem	Mendikbudristek	191211	Youtube Kemendikbudristek
2	Iwan Syahril	Dirjen PAUD, Dikdas,dan Dikmen	210527	Youtube Kemendikbudristek
3	Pramudianto	Coach	230224	Hotel Mercure Batavia
4	Muslihuddin	Kepala BPMP Aceh	230224	Hotel Mercure Batavia
5	Djohan Ahmadi	Kepala BPMP Lampung	230224	Hotel Mercure Batavia
6	Febry Dien	Kepala BPMP Sulawesi Utara	230224	Hotel Mercure Batavia
7	I Made Alit Dwitama	Kepala BPMP Provinsi Bali	230302	Royal Padjajaran Suites
8	Yuli Haryanto	Kepala BPMP Kalimantan Selatan	230302	Royal Padjajaran Suites
9	Guritno WW	Kepala BPMP Bangka Belitung	230320	Kantor Setditjen PAU Dikdas dan Dikmen
10	Budi Priantoro	PMO PDM-05 Kemitraan Daerah	230429	Vila Dago Pamulang
11	Heru Sulistyo	Kadisdik Kepulauan Riau	230511	Restoran Apung Kepulauan Riau
12	Warsita	Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau	230511	Kantor BPMP Kepulauan Riau
13	Armaisal	Kepsek SMAN 1 Toapaya Kepulauan Riau	230512	SMAN 1 Toapaya Kepulauan Riau
14	Sisilia & Zaki	Siswa SMAN 1 Toapaya Kepulauan Riau	230512	SMAN 1 Toapaya Kepulauan Riau
15	Pita Nauli, dkk	Guru SMAN 1 Toapaya Kepulauan Riau	230512	SMAN 1 Toapaya Kepulauan Riau
16	Hendri Putra	Kasubag BPMP Kepulauan Riau	230512	Kantor BPMP Kepulauan Riau
17	Ahmad Junaidi	RBI BPMP Kepulauan Riau	230512	Kantor BPMP Kepulauan Riau
18	Muhammad Askari	Kepala BPMP Sulawesi Tenggara	230516	Kantor BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara
19	Hari Purwantio	Kepala BGP Kalimantan Utara	230522	Restoran Cendana
20	Jarwoko	Kepala BPMP Kalimantan Utara	230522	Kantor BPMP Kaltara
21	Eko Purdiyanto	Kepsek SMPN 1 Tanjung Selor Kalimantan Utara	230523	SMPN 1 Tanjung Selor
22	Neni, dkk	Guru SMPN 1 Tanjung Selor Kalimantan Utara	230523	SMPN 1 Tanjung Selor
23	Keyesh	Siswa SMPN 1 Tanjung Selor Kalimantan Utara	230523	SMPN 1 Tanjung Selor
24	Siti Mawarni	Sekdisdik Kab. Bulungan Kalimantan Utara	230523	Kantor Disdik Kabupaten Bulungan
25	Suparmin Seto	Kadisdik Kab. Bulungan Kalimantan Utara	230523	Kantor Disdik Kabupaten Bulungan
26	Achmad	Kadisdik Kab. Nunukan Kalimantan Utara	230524	Sahabat Warung 77, Tarakan
27	Jamaluddin	Kadisdik Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh	230528	Hotel Alana Yogyakarta
28	Azwardi	Pj Bupati Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh	230528	Hotel Alana Yogyakarta
29	Muhammad Anhar	Kadisdik Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	230529	Abhayagiri Venue and Dining, DIY
30	Aulia Oktafiandi	Bupati Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	230529	Abhayagiri Venue and Dining, DIY
31	Sinar Alam	Kepala BPMP Sulawesi Tengah	230906	Palu, Sulawesi Tengah
32	Nilam Suri	PIC PDM-05 Kemitraan Daerah	230913	Hotel Ciputra Jakarta
33	Nugraheni Triastuti	Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah	230915	Grand Mercure Jakarta Kemayoran
34	Junus Simangungsong	Kepala BPMP Papua	230921	Kantor BPMP Provinsi Papua
35	Feddy Djunaedi	Tim SKM Kemendikbudristek	231004	Daring
36	Muhammad Hasbi	Direktur SD	231016	Kantor Direktur SD, Kemendikbudristek
37	Komalasari	Plt. Direktur PAUD.	231019	Aplikasi WA

Daftar Pustaka

Billyantoro dan M Adib Minanurohim. 2023. *Cahaya Di Ufuk Timur: Perjalanan Transformasi Program Sekolah Penggerak Angkatan Kesatu Tahun Pertama.* Jakarta Pusat. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 2020. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024.*

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak*. Jakarta: Puslitjak, Balitbang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.*

Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1962. *Karja Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. 2022. *Refleksi Satu Tahun Program Sekolah Penggerak: Mendorong Transformasi Dua Arah untuk Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Regulasi

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Pengerak
7. Nota Kesepahaman Antara Kemendikbudristek dengan Kemendagri Nomor: 10/IV/NK/2021 dan Nomor: 420/2702/SJ Tentang Implementasi Program Merdeka Belajar Di Daerah

BUKU Duta Merdeka Belajar ini merupakan sepenggal kisah beberapa UPT Kemendikbudristek c.q. BBPMP/BPMP dalam menjalankan tugas transformasi organisasi dan advokasi Kebijakan Merdeka Belajar kepada unsur-unsur pemerintah daerah, sesuai dengan wilayah penugasan masing-masing.

Transformasi yang dimaksud berhubungan dengan penyesuaian organisasi terhadap struktur organisasi yang saat ini lebih luwes, pembentukan dan penyelarasan gugus tugas PDM dengan kementerian, hingga penguatan SDM terutama yang berhubungan dengan Kebijakan Merdeka Belajar beserta episode-episodenya.

Sementara itu, advokasi yang dimaksud berhubungan dengan upaya BBPMP/BPMP menyosialisasikan Kebijakan Merdeka Belajar kepada unsur-unsur pemerintah daerah agar mereka memahami, berterima, dan berkomitmen menjalankan Kebijakan Merdeka Belajar, yang nota bene merupakan bagian dari amanat Konstitusi dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Pelaksanaan tugas advokasi ini dijalankan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekaan formal seperti workshop, seminar, lokakarya. Kedua, pendekatan informal seperti pertemuan di kedai kopi/teh, warung makan, karaoke keluarga, dan di acara adat dan/atau keagamaan. Dua pendekatan ini saling melengkapi implementasi tugas BBPMP/BPMP dalam advokasi Kebijakan Merdeka Belajar kepada unsur-unsur pemerintah daerah.

Sebagian buku ini ditulis dengan gaya penulisan jurnalisme sastrawi, yaitu karya jurnalistik yang menggabungkan disiplin jurnalisme, riset akademis, dan daya pikat sastra. Genre ini mensyaratkan liputan mendalam, tetapi memikat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

ISBN 978-623-118-004-9